

# FORUM BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

*Jurnal Ilmiah STIE Multi Data Palembang*

## Dewan Redaksi

- Pembina : Johannes Petrus, S.Kom., M.T.I.,CFP® (*Ketua STIE MDP*)
- Penanggung jawab : M.Rizky Pribadi, M.Kom (*Kepala LPPM STIE MDP*)
- Ketua Penyunting : Dr. Anton Arisman, SE., M.Si., Ak., CA
- Penyunting Ahli : 1. Prof. H. Syamsurijal, Ak, Ph.D. (*Universitas Sriwijaya*)  
2. Prof. Dr. Kamaludin, S.E., M.M (*Universitas Bengkulu*)  
3. Dr. Istijanto, M.M., M.Com. (*Prasetiya Mulya Business School*)  
4. Dr. H. Zakaria Wahab, MBA. (*Magister Manajemen UNSRI*)  
5. Dr. H. Zamzami, S.E., M.Si. (*Universitas Jambi*)  
6. Dr. Lukluk Fuadah, SE., MBA., Ak., CA (*Pasca Sarjana UNSRI*)  
7. Dr. Yulizar Kasih, SE., M.Si. (*STIE MDP*)
- Penyunting Pelaksana : 1. Siti Khairani, S.E., Ak, M.Si.,CFP®  
2. Retno Budi Lestari, S.E., M.Si  
3. Kardinal, SE., M.M., CFP®
- Sekretariat : Trisnadi Wijaya, S.E., S.Kom., M.Si
- Penerbit : STIE Multi Data Palembang
- Alamat : Jl. Rajawali 14 Palembang 30113 Telp. 0711-376400  
Fax. 0711-376360 E-mail: redaksi@stie-mdp.ac.id

Forum Bisnis dan Kewirausahaan adalah jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan gagasan dalam bidang manajemen, akuntansi, perpajakan, ekonomi, dan kewirausahaan. Jurnal ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun (September dan Maret) dan bertujuan untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian terbaru dan gagasan dalam bidang manajemen, akuntansi, ekonomi, dan kewirausahaan kepada masyarakat ilmiah.

# FORUM BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

*Jurnal Ilmiah STIE Multi Data Palembang*

## DAFTAR ISI

### **Evaluasi Pada Proyek Pembangunan Jalan Kalimantan Kota Bengkulu Dengan Menggunakan Metode Program Evaluation And Review Technique (PERT)**

Sandi Zahari Putra, Trisna Murni  
Universitas Bengkulu 69 - 83

---

### **Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Untuk UMKM Kerajinan Souvenir Di Kelurahan 30 Ilir Palembang**

Siti Khairani, Raisa Pratiwi  
STIE MDP, Palembang 84 - 93

---

### **Pengaruh Komite Dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance***

T. Husain, Syamsu Alang  
STMIK Widuri, Jakarta 94 - 106

---

### **Pengaruh Keterkaitan Religiusitas, Sosial Ekonomi Dan Sikap *Love Of Money* Dalam Etika Penggelapan Pajak Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat**

Icha Fajriana  
STIE MDP, Palembang 107 - 121

---

### **Hubungan Kualifikasi Standar Kerja Dengan Penempatan Pegawai Pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pringsewu**

Yoeyong Rahsel, Wulandari  
STMIK Pringsewu, Lampung 122 - 132

---

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi Perusahaan, Dan Reputai KAP Terhadap *Timeliness* Dengan *Audit Delay* Sebagai Variabel Intervening**

Havieza Dwy Cahya dan Cherrya Dhia Wenny  
STIE MDP, Palembang 133 - 143

---

Pedoman Penulisan Artikel 144 - 147

Biodata Penulis 148 - 150

Indeks Penyunting/Mitra Bestari 151

Abstrak Volume 8 Nomor 1 152 - 154

Indeks Jurnal Volume 8 Nomor 1 155

# Evaluasi Pada Proyek Pembangunan Jalan Kalimantan Kota Bengkulu Dengan Menggunakan Metode Program Evaluation And Review Technique (PERT)

Sandi Zahari Putra, Trisna Murni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu  
trisnasri@yahoo.co.id

**Abstract:** *This study aims to analyze the time, cost, and probability of completing the road construction project in Kota Bengkulu using the PERT method (Program Evaluation and Review Technique). The type of data used is secondary data obtained from PT Rodateknindo Purajaya contractors. The data obtained shows that the completion of the road construction project takes 180 days, with a total project cost of Rp. 7,865,146,000. When analyzed using the PERT method, it turns out that the project completion time can be faster which is 143 days with the probability of project completion being 99.99%, and there are no additional costs.*

**Keywords:** *time, cost, network planning, PERT, probability.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis waktu, biaya, dan probabilitas penyelesaian proyek pembangunan jalan di Kota Bengkulu menggunakan metode PERT (Evaluasi Program dan Teknik Tinjauan). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kontraktor PT Rodateknindo Purajaya. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa penyelesaian proyek pembangunan jalan memakan waktu 180 hari, dengan total biaya proyek sebesar Rp. 7,865,146,000. Ketika dianalisis menggunakan metode PERT, ternyata waktu penyelesaian proyek dapat lebih cepat yaitu 143 hari dengan probabilitas penyelesaian proyek menjadi 99,99%, dan tidak ada biaya tambahan.

**Kata kunci:** waktu, biaya, perencanaan jaringan, PERT, probabilitas.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan proyek konstruksi merupakan rangkaian dari kegiatan yang saling bergantung satu sama lain. Semakin besar suatu proyek, menyebabkan semakin banyak pula masalah yang harus dihadapi. Mulai dari perencanaan kita dihadapkan pada pengaturan sumber daya seperti tenaga kerja, biaya, waktu, peralatan dan lain sebagainya, sampai pada pelaksanaan proyek. Jika hal-hal tersebut tidak ditangani dengan benar, berbagai masalah akan muncul seperti keterlambatan penyelesaian proyek, penyimpangan mutu, pembiayaan membengkak, pemborosan sumber daya dan lain sebagainya yang sangat merugikan bagi pelaksanaan proyek (Kareth *et al.*, 2012).

Dalam usaha untuk meningkatkan kualitas infrastruktur Kota Bengkulu, pemerintah Kota Bengkulu membangun jalan dan drainase di Jalan Kalimantan Kota Bengkulu dengan menggunakan anggaran APBD (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu). Dalam penyelesaian proyek tersebut, diperlukan jasa kontraktor. Proyek ini dikerjakan oleh PT. Rodateknindo Purajaya. Durasi penyelesaian proyek disepakati oleh kontraktor yaitu selama 180 hari, yang dilaksanakan mulai tanggal 7 Juli 2017 sd. 30 Desember 2017 dan nilai kontrak sebesar 7,8 miliar rupiah (Surat Perjanjian Kerja, 2017).

Selama ini menurut karyawan PT. Rodateknindo Purajaya, dalam merencanakan penjadwalan proyek, PT. Rodateknindo Purajaya belum menggunakan pedoman yang pasti untuk

menentukan berapa lama kira – kira waktu yang optimal untuk penyelesaian proyek. *Time schedule* yang dibuat oleh pelaksana tidak dihasilkan dari jaringan kerja melainkan hasil estimasi subyektif pengalaman dilapangan. Sehingga *time schedule* yang dihasilkan tidak dapat menjabarkan secara detail apakah *time schedule* tersebut berasal dari lintasan kritis atau tidak. Untuk memperbaiki *time schedule* agar lebih optimal diperlukan suatu analisis *network planning* yang lebih baik, salah satunya dengan cara analisis *network planning* dengan menggunakan metode PERT.

Adapun PERT memiliki fokus pada penjadwalan suatu proyek melalui koordinasi dan sinkronisasi semua elemen yang merupakan bagian dari proyek dan menyelesaikan proyek secepat mungkin. Metode PERT memungkinkan untuk mengestimasi dampak dari ketidakpastian waktu dari penyelesaian setiap pekerjaan dari proyek yang berdampak pada ketidakpastian durasi proyek secara keseluruhan (Hall, 2012).

Tingkat ketepatan estimasi waktu penyelesaian proyek ditentukan oleh tingkat ketepatan perkiraan durasi setiap kegiatan di dalam proyek. Selain ketepatan perkiraan waktu, penegasan hubungan antar kegiatan suatu proyek juga diperlukan untuk perencanaan suatu proyek. Dalam mengestimasi waktu dan biaya di sebuah proyek maka diperlukan optimalisasi. Optimalisasi biasanya dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada serta meminimalkan risiko namun tetap mendapatkan hasil yang optimal (Dayanti, 2010).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Risnawati (2014), dengan menggunakan metode PERT, waktu penyelesaian proyek yang dilakukannya lebih cepat dibandingkan dengan yang ditentukan pada kontrak kerja. Penelitian – penelitian sebelumnya yang juga dilakukan oleh (Aditya, 2011; Misrali et al., 2015; Aqilah, 2015; Susanty et al., 2016; Shofa et al., 2017) membuktikan bahwa penerapan *network planning* menggunakan metode PERT (*Program Evaluation and Review Technique*), mampu mengoptimalkan waktu dan biaya pada suatu proyek.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil topik manajemen proyek, yang berkaitan dengan penjadwalan proyek dengan judul “Evaluasi Pada Proyek Pembangunan Jalan Kalimantan Kota Bengkulu Dengan Menggunakan Metode PERT”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok penelitian ini adalah: berapa waktu optimal, biaya optimal dan probabilitas penyelesaian proyek pembangunan Jalan Kalimantan Kota Bengkulu dengan menggunakan metode PERT.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah: untuk menganalisis waktu optimal, biaya optimal dan probabilitas penyelesaian proyek pembangunan Jalan Kalimantan Kota Bengkulu dengan menggunakan metode PERT.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Proyek**

Menurut *Project Management Body of Knowledge* (PMBOK, 2000), proyek adalah suatu upaya yang bersifat sementara yang dilakukan untuk membuat suatu produk, layanan, atau hasil yang unik. Cleand dan Realand (1994), mengatakan proyek adalah gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Heizer & Render (2014), manajemen Proyek meliputi tiga fase yaitu:

- a. Perencanaan, pada fase ini mencakup penetapan sasaran, mendefinisikan proyek, dan organisasi timnya.
- b. Penjadwalan, pada fase ini menghubungkan orang, uang, dan bahan untuk kegiatan khusus dan menghubungkan masing-masing kegiatan satu dengan yang lainnya.
- c. Pengendalian, perusahaan mengawasi sumber

daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Perusahaan juga merevisi atau mengubah rencana dan menggeser atau mengelola kembali sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan waktu dan biaya.

## 2.2 PERT (*Program Evaluation and Review Tehcnique*)

Menurut Ervianto (2009), PERT dikembangkan sejak tahun 1958 oleh US Navy dalam proyek pengembangan *Polaris Missile System*. Teknik ini mampu mereduksi waktu selama dua tahun dalam pengembangan sistem senjata tersebut dan sejak itu mulai digunakan secara luas. Sedangkan menurut Heizer dan Render (2014), PERT merupakan teknik manajemen proyek yang menggunakan tiga perkiraan waktu untuk setiap aktivitas. PERT dapat membantu para manajer melakukan penjadwalan, pemantauan, serta pengendalian proyek – proyek besar dan kompleks.

PERT merupakan suatu metode yang bertujuan sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan, maupun gangguan dan konflik produksi; mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan berbagai bagian sebagai suatu keseluruhan pekerjaan; dan mempercepat selesainya proyek (Levin dan Kirkpatrick, 1977).

PERT merupakan metode untuk menentukan jadwal dan anggaran dari sumber-sumber, sehingga suatu pekerjaan yang sudah ditentukan terlebih dahulu dapat diselesaikan tepat pada waktunya. PERT merupakan suatu fasilitas komunikasi dalam hal bahwa PERT dapat melaporkan kepada manajer, perkembangan yang terjadi, baik yang bersifat menguntungkan maupun tidak.

PERT dapat menjaga agar para manajer mengetahui dan mendapat keterangan ini secara teratur. Lebih dari itu semua, PERT merupakan suatu pendekatan yang baik sekali untuk mencapai penyelesaian proyek tepat pada waktunya.

### 2.2.1 Dasar-dasar PERT

Menurut Levin dan Kirkpatrick (1977), ada

dua konsep yang harus diperhatikan sehubungan dengan PERT:

1. *Event*: Suatu *event* (kejadian) adalah suatu keadaan yang terjadi pada saat tertentu.
2. *Aktivitas*: Suatu aktivitas adalah pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kejadian.

Dalam jaringan PERT, kejadian biasanya dilukiskan dalam bentuk lingkaran, dan aktivitas-aktivitas dilukiskan dalam bentuk tanda panah yang menghubungkan dua buah lingkaran.

### 2.2.2 Kerangka Kerja PERT

Menurut Heizer dan Render (2014), PERT mengikuti enam langkah dasar sebagai berikut:

1. Menetapkan proyek dan menyiapkan struktur penguraian kerjanya.
2. Membangun hubungan antara aktivitas-aktivitasnya. Memutuskan aktivitas yang harus dilakukan lebih dahulu dan aktivitas yang harus mengikuti aktivitas lain.
3. Menggambar jaringan yang menghubungkan keseluruhan aktivitas.
4. Menetapkan perkiraan waktu dan/atau biaya untuk setiap aktivitas.
5. Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Hal ini disebut jalur kritis.
6. Menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek.

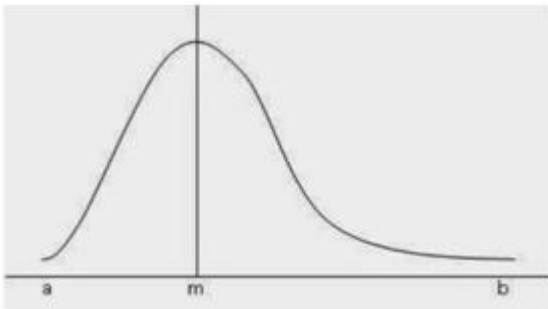
### 2.2.3 Probabilitas PERT

Dalam PERT, kita menggunakan distribusi probabilitas berdasarkan tiga perkiraan waktu untuk setiap perkiraan berikut (Heizer & Render, 2014):

1. Waktu optimistis (a): Waktu yang dibutuhkan oleh sebuah aktivitas jika semua hal berlangsung sesuai rencana. Dalam memperkirakan nilai ini, biasanya terdapat probabilitas yang kecil (katakanlah 1/100) bahwa aktivitas akan  $< a$ .
2. Waktu pesimistis (b): Waktu yang dibutuhkan sebuah aktivitas dengan asumsi kondisi yang ada

sangat tidak diharapkan. Dalam memperkirakan nilai ini, biasanya terdapat probabilitas yang kecil (juga 1/100) bahwa waktu aktivitas > b.

3. Waktu realistis (m): Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas yang paling realistis.



**Gambar 1: Probabilitas Perkiraan Waktu Metode PERT (Heizer & Render, 2014)**

### 2.3 Network Planning

Perencanaan jaringan kerja (*network planning*) adalah suatu model yang banyak digunakan dalam penyelenggaraan proyek, yang produknya berupa informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam diagram jaringan kerja yang bersangkutan (Herjanto, 2003). Jaringan kerja merupakan metode yang dianggap mampu menyuguhkan teknik dasar dalam menentukan urutan dan kurun waktu kegiatan unsur proyek, dan pada giliran selanjutnya dapat dipakai memperkirakan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan (Soeharto, 1999).

Sebelum menggambarkan diagram *network* perlu diingat (Badri, 1997):

- a. Panjang, pendek, maupun kemiringan anak panah sama sekali tidak mempunyai arti, dalam pengartian letak pekerjaan, banyak durasi maupun sumberdaya yang dibutuhkan.
- b. Aktifitas – aktifitas apa yang mendahului dan aktifitas-aktifitas apa yang mengikuti.
- c. Aktifitas – aktifitas apa yang dapat bersama-sama.
- d. Aktifitas – aktifitas itu dibatasi saat mulai dan saat selesai
- e. Waktu, biaya, dan *resources* yang dibutuhkan dari aktifitas-aktifitas ini.

- f. Kepala anak panah menjadi pedoman arah dari setiap kegiatan.
- g. Besar kecilnya lingkaran juga tidak mempunyai arti, dalam pengertian penting tidaknya suatu peristiwa.

### 2.4 Jalur Kritis (*Critical Path*)

Menurut Adegoke (2011), Jalur kritis adalah rantai kegiatan melalui jaringan dan berisi kegiatan yang tidak bisa ditunda. Jalur kritis mempunyai kemungkinan siklus waktu terkecil untuk proses tersebut. Jalur kritis akan memberikan perkiraan proses siklus waktu. Sedangkan menurut Heizer dan Render (2014), Jalur kritis adalah jalur waktu terpanjang yang terdapat diseluruh jaringan. Dalam melakukan analisis jalur kritis menurut Heizer dan Render (2014), digunakan proses *two-pass* yang terdiri atas *forward pass* dan *backward pass* untuk menentukan jadwal waktu suatu aktivitas.

ES dan EF ditentukan selama *forward pass*. LS dan LF ditentukan selama *backward pass*. ES (*earliest start*) adalah waktu paling awal suatu aktivitas dapat dimulai dengan asumsi semua pendahulunya sudah selesai. EF (*Earliest Finish*) adalah waktu paling awal suatu aktivitas dapat selesai. LS (*Late Start*) adalah waktu terakhir suatu aktivitas dapat dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. LF (*Late Finish*) adalah waktu terakhir suatu aktivitas dapat selesai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek.

#### 2.4.1 Forward Pass

Aturan Waktu Mulai Paling Awal. Sebelum suatu aktivitas dapat dimulai, semua pendahulu langsungnya harus diselesaikan.

- (a) Jika suatu aktivitas hanya mempunyai satu pendahulu langsung, ES-nya sama dengan EF dari pendahulunya.
- (b) Jika suatu aktivitas mempunyai beberapa pendahulu langsung, ES-nya adalah nilai maksimum dari semua EF pendahulunya, yaitu:

$$ES = \text{Max} \{EF \text{ semua pendahulunya langsung}\}$$

Aturan Selesai Paling Awal. Waktu selesai paling awal (EF) dari suatu aktivitas adalah jumlah dari waktu mulai paling awal (ES) dan waktu aktivitas itu sendiri, yaitu:

$$EF = ES + \text{Waktu aktivitas} \dots \dots \dots (1)$$

Aturan Waktu Mulai Paling Lambat. Waktu mulai paling lambat (LS) dari suatu aktivitas adalah selisih dari waktu selesai paling lambat (LF) dan waktu aktivitasnya yaitu:

$$LS = LF - \text{Waktu aktivitas} \dots \dots \dots (2)$$

**2.4.2 Backward Pass**

Aturan Waktu Selesai Paling Lambat. Sekali lagi, aturan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebelum suatu aktivitas dapat dimulai, seluruh pendahulu langsungnya harus diselesaikan.

- (a) Jika suatu aktivitas adalah pendahulu langsung dari hanya satu aktivitas, LF-nya sama dengan LS dari aktivitas yang secara langsung mengikutinya.
- (b) Jika suatu aktivitas adalah pendahulu langsung dari lebih dari satu aktivitas, maka LF adalah minimum dari seluruh nilai LS dari aktivitas-aktivitas yang secara langsung mengikutinya, yaitu:

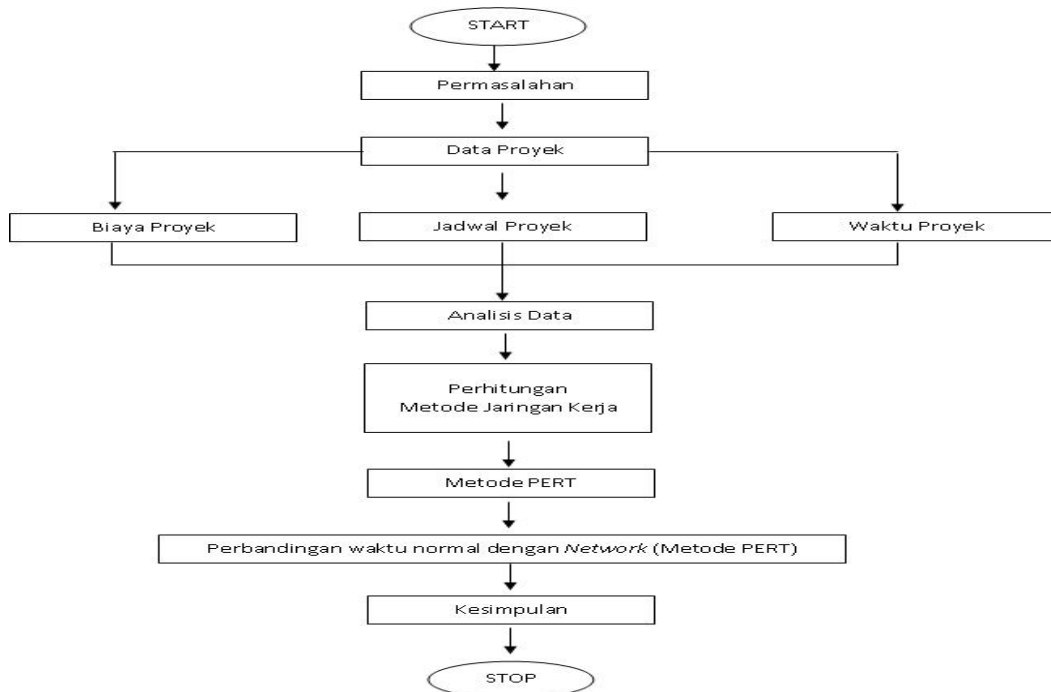
$$LF = \text{Min} \{LS \text{ dari seluruh aktivitas langsung yang mengikutinya}\}$$

**2.5 Anggaran Biaya**

Biaya total proyek merupakan penjumlahan biaya langsung dengan biaya tidak langsung. Biaya total proyek sangat tergantung terhadap penyelesaian proyek, semakin lama proyek selesai maka biaya yang dikeluarkan akan semakin besar (Soeharto, 1999).

**2.6 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk menganalisis metode PERT dalam meningkatkan waktu pelaksanaan proyek yang optimal serta biaya yang efisien. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2: Kerangka Pemecahan Masalah**

Dalam pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi sering terjadi keterlambatan akibat berbagai hal yang menyebabkan terjadinya kerugian waktu dan biaya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan suatu analisis pada setiap kegiatan. Agar keseluruhan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, maka aktifitas-aktifitas tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan metode PERT. Kerangka konseptual diatas menjelaskan proses penelitian.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2016).

Riset deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendefinisikan siapa yang terlibat didalam suatu kegiatan, apa yang dilakukannya, kapan dilakukan, dimana dan bagaimana melakukannya (Cooper dan Shindler, 2003).

#### **3.2 Definisi Operasional**

Operasional variabel dalam PERT dapat diuraikan sebagai berikut (Adegoke, 2013):

1. *PERT event*, suatu titik tanda dimana mulai atau selesainya satu atau lebih kegiatan, ini tidak memerlukan waktu sumberdaya, PERT event menandai selesainya satu atau lebih kegiatan dan tidak dapat dicapai sebelum semua kegiatan yang mengarah pada kegiatan ini sudah selesai.
2. *Predecessor event*, sebuah kejadian yang secara langsung mendahului beberapa kegiatan lain tanpa

gangguan dari kejadian lain, ini dapat berupa akibat lebih dari satu kegiatan.

3. *Successor event*, kejadian yang secara langsung mengikuti kejadian lain tanpa gangguan dari kejadian lain, ini dapat berupa akibat lebih dari satu kegiatan.
4. *PERT activity*, merupakan performa nyata dari kegiatan, kegiatan ini memerlukan waktu serta sumber daya, dan dapat dianggap sebagai representasi dari waktu, usaha, serta sumbernya yang digunakan untuk bergerak dari satu kegiatan kekegiatan berikutnya.
5. *Optimistic time*, kemungkinan minimum waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan, dengan mengasumsikan segala sesuatu dalam kondisi ideal dan lebih baik dari keadaan normal.
6. *Pessimistic time*, kemungkinan maksimal waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan, dengan mengasumsikan segala sesuatu berjalan tidak sesuai harapan namun tanpa terjadinya bencana alam.
7. *Most likely time*, estimasi terbaik waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dengan mengasumsikan segala sesuatu berjalan dengan normal.
8. *Expected time*, estimasi waktu terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan mengasumsikan segala sesuatu berjalan dengan normal (implikasinya adalah bahwa *expected time* merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh suatu kegiatan jika kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dalam periode waktu).
9. Rencana anggaran biaya proyek, biaya proyek adalah anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan proyek, dalam hal ini merupakan penggunaan dana untuk melaksanakan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. Dalam mengerjakan suatu proyek, aspek biaya diperhitungkan dengan membuat hubungan biaya dan waktu (*duration*)



untuk setiap aktifitas yang dilakukan. Biaya dalam hal ini hanya biaya langsung saja, tidak termasuk biaya administrasi, supervisi dan lain – lain.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data skunder. Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan, dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya (Sekaran, 2011). Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang ada pada PT. Roda Teknindo Purajaya Kota Bengkulu.

### 3.4 Populasi dan Unit Analisis

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dari karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Sedangkan menurut Arikunto (2002), populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh aktivitas proyek pada PT. Roda Tekniknindo Purajaya Kota Bengkulu yang dilaksanakan pada periode 2017 – 2018. Unit analisis pada penelitian ini adalah Pembangunan Jalan Kalimantan Kota Bengkulu.

### 3.5 Metode Analisis

Metode PERT digunakan dalam penelitian ini karena PERT memegang peranan yang sangat penting bukan hanya dalam hal peningkatan akurasi penentuan waktu kegiatan, tetapi juga dalam hal pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan-kegiatan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi jalur kritis dalam grafik, grafik ini merepresentasikan model dari proyek. Implementasi algoritma PERT didasarkan pada metode jalur kritis (Dobravsky dan Daskocil, 2013).

Estimasi ekspektasi waktu penyelesaian diperoleh dari tiga estimasi, yaitu: kondisi pesimistik, normal, dan optimistik. Formula yang digunakan untuk menghitung ekspektasi waktu penyelesaian setiap aktivitas adalah sebagai berikut (Soeharto, 1999):

$$te = \frac{a+4m+b}{6} \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan:  
te = expected duration    a = waktu optimis  
m= waktu realistis        b = waktu pesimis

Dengan menggunakan konsep te maka jalur kritis dapat diidentifikasi. Pada jalur kritis berlaku slack = 0. Rentang waktu pada tiga angka estimasi PERT menandai derajat ketidakpastian dalam estimasi kurun waktu. Besarnya ketidakpastian tergantung pada besarnya angka a dan b. Deviasi standar kegiatan dirumuskan sebagai berikut (Heizer dan Render, 2014):

$$\sigma = \frac{1}{6} (b - a) \dots\dots\dots (6)$$

Keterangan:  
σ = standar deviasi kegiatan  
a = waktu optimis  
b = waktu pesimis

Varians estimasi waktu penyelesaian dapat dihitung dengan formula:

$$\sigma^2 = \left(\frac{b-a}{6}\right)^2 \dots\dots\dots (7)$$

Keterangan:  
σ<sup>2</sup> = varians kegiatan  
a = waktu optimis  
b = waktu pesimis

#### a. Mencari Jalur Kritis

Menurut Chase dan King (1995), Jalur kritis dapat dicari dengan terlebih dahulu menghitung *Earliest Start* (ES), *Latest Start* (LS), *Earliest Finish* (EF), dan *Latest Finish* (LF). Untuk menghitung ES dan EF seluruh pekerjaan, dimulai dari awal sampai akhir proyek (*forward pass*). Formula untuk mencari EF adalah sebagai berikut:

$$EF = ES + t \dots \dots \dots (1)$$

Untuk menghitung LS dan LF, dimulai dari akhir proyek menuju awal proyek (backward pass). Formula untuk menghitung LS adalah sebagai berikut:

$$LS = LF - t \dots \dots \dots (2)$$

Untuk selanjutnya adalah mengidentifikasi setiap aktivitas yang termasuk kedalam jalur kritis. Operasinya dengan menghitung *slack time* (waktu menganggur), formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Slack = LS - ES = LF -$$

**b. Mengetahui Probabilitas Mencapai Target Jadwal**

Untuk mengetahui probabilitas mencapai target jadwal dapat dilakukan dengan menghubungkan antara waktu yang diharapkan (TE) dengan target T(d) yang dinyatakan dengan rumus:

$$Z = \frac{T(d) - TE}{S} \dots \dots \dots (9)$$

- Keterangan:  
 z = angka kemungkinan mencapai target  
 T(d) = target jadwal  
 TE = jumlah waktu lintasan kritis  
 S = deviasi standar kegiatan

**4. PEMBAHASAN DAN HASIL**

Proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan waktu awal dan akhir penyelesaiannya (dan biasanya selalu dibatasi oleh waktu, dan seringkali juga dibatasi oleh sumber pendanaan), untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik, dan umumnya menghasilkan sebuah perubahan. Dalam gambaran umum proyek terdapat berbagai elemen dari proyek diantaranya; profil proyek, perencanaan waktu proyek, perencanaan anggaran biaya proyek yang dijabarkan secara lengkap.

**4.1 Profil Proyek**

Jalan Kalimantan kota Bengkulu merupakan jalan penghubung yang sangat penting dan rentan mengalami kerusakan. Jalan ini juga sering mengalami banjir saat musim hujan datang. Dalam usaha untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kota Bengkulu, pemerintah kota Bengkulu membangun Jalan dan *drainase* di jalan Kalimantan kota Bengkulu dengan menggunakan anggaran APBD tahun anggaran 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.865.146.000,00 dan waktu penyelesaian proyek selama 180 hari.

**4.2 Perencanaan Waktu Proyek**

Dalam menentukan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan proyek pembangunan jalan Kalimantan ini perlu untuk memperhatikan faktor cuaca, ketersediaan material, komunikasi, dana, serta semangat kerja para karyawan. Dengan perencanaan ini diharapkan dapat tercapainya suatu koordinasi dan komunikasi yang sangat diperlukan dalam proses pengawasan. Selanjutnya ditentukan jadwal kegiatan-kegiatan dari proyek tersebut dengan menerjemahkannya kedalam suatu diagram yang sesuai dengan skala waktu yang digunakan, proses ini disebut sebagai penjadwalan proyek. Berikut adalah waktu yang direncanakan untuk pelaksanaan proyek pembangunan jalan Kalimantan kota Bengkulu.

**Tabel 1:** Rencana Waktu Proyek

Deskripsi Kegiatan	Durasi (hari)
Umum	37
Drainase	37
Struktur	60
Pekerjaan Tanah	8
Perkerasan berbutir	3
Perkerasan aspal	28
Pelebaran Perkerasan dan Bahu	4
Pengembalian Kondisi dan Pek. Minor	3
<b>Umum</b>	<b>180</b>
<b>Jumlah hari</b>	<b>180</b>

Sumber: PT Rodateknindo Purajaya 2017

### 4.3 Perencanaan Anggaran Biaya Proyek

Perencanaan anggaran biaya dalam suatu proyek dibuat berdasarkan uraian pekerjaan yang disusun menurut jenis pekerjaan yang ada dalam pelaksanaan konstruksi dan berdasarkan gambar kerja dengan memperhitungkan segala biaya pengadaan bahan maupun alat. Berikut ini adalah rekapitulasi rencana anggaran biaya proyek.

**Tabel 2:** Biaya Proyek Pembangunan Jalan Kalimantan Kota Bengkulu

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1	<b>Divisi 1. Umum</b>	
A	Mobilisasi	55.250.000,00
B	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	33.280.000,00
C	Manajemen mutu	23.250.000,00
2	<b>Divisi 2. Drainase</b>	
A	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	54.735.539,03
B	Pasangan batu dengan mortar	593.275.289,74
C	Gorong-gorong pipa beton bertulang dia 75-85 cm	26.731.100,16
D	Gorong-gorong pipa beton bertulang dia 75-85 cm	27.589.545,60
3	<b>Divisi 3. Pekerjaan tanah</b>	
A	Galian biasa	1.817.781,24
B	Galian struktur 0-2 meter	45.345.348,87
C	Galian perk. Beraspal tanpa cold miling machine	14.119.270,72
D	Galian perkerasan berbutir	5.300.826,77
E	Timbunan pilihan dari sumber galian	123.386.524,77
F	Penyiapan badan jalan	182.282,98
4	<b>Divisi 4. Pelebaran perkerasan dan bahu jalan</b>	
A	Lapisan pondasi agregat kelas S	220.761.068,79
5	<b>Divisi 5. Perkerasan berbutir</b>	
A	Lapis pondasi agregat kelas A	90.628.617,77

**Tabel 2:** Biaya Proyek Pembangunan Jalan Kalimantan Kota Bengkulu Lanjutan

5	<b>Divisi 5. Perkerasan berbutir</b>	
A	Lapis pondasi agregat kelas A	90.628.617,77
B	Lapis pondasi agregat kelas B	15.948.636,34
6	<b>Divisi 6. Perkerasan aspal</b>	
A	Lapis resap pengikat-aspal cair	26.952.458,67
B	Lapis perekat- aspal cair	86.360.478,87
C	Laston lapis aus (AC – WC)	1.659.510.271,35
d	Laston lapis antara (AC – BC)	2.652.318.271,32
e	Bahan/aditif anti pengelupasan	35.788.900,00
7	<b>Divisi 7. Struktur</b>	
a	Beton mutu sedang dengan fc = 20 mpa	565.956.496,61
b	Beton mutu sedang dengan fc = 20 mpa	54.938.930,87
c	Beton mutu sedang dengan fc = 10 mpa	13.650.118,32
d	Baja tulangan BJ 24 polos	158.614.847,44
e	Baja tulangan BJ 32 ulir	300.269.970,00
f	Baja tulangan BJ 32 ulir	151.847.142,47
g	Pasangan batu	9.257.149,81
8	<b>Divisi 8. Pengembalian kondisi dan pek. Minor</b>	
a	Marka jalan thermoplastic	66.429.836,38
b	Marka jalan thermoplastic	36.646.632,57
<b>Sub Total (A)</b>		<b>7.150.133.391,46</b>
<b>PPN (10% X A)</b>		<b>715.013.339,15</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7.865.146.730,60</b>
<b>DIBULATKAN</b>		<b>7.865.146.000,00</b>

Sumber: PT Rodateknindo Purajaya 2017

### 4.4 Hasil Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi sehingga menjadi informasi tersebut dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan juga menggunakan metode PERT (*Program Evaluation*

and Review Technique). Adapun analisis data dalam metode PERT dapat dilihat dari penjelasan dibawah ini.

**4.4.1 Analisis Hubungan Antar Kegiatan Proyek**

Penentuan urutan kegiatan proyek pada umumnya disusun berdasarkan tata cara kerjanya. Berikut ini akan diperlihatkan keterkaitan antara kegiatan yang ada dalam proyek pembangunan jalan Kalimantan kota Bengkulu.

**Tabel 3:** Hubungan Antar Kegiatan Proyek

No	Jenis Kegiatan	Kode Kegiatan	Kegiatan Sebelumnya
1	Umum	A	-
2	Drainase	B	A
3	Struktur	C	A
4	Pekerjaan Tanah	D	B,C
5	Pekerasan Berbutir	E	D
6	Perkerasan Aspal	F	E
7	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	G	F
8	Pengembalian Kondisi dan Pek. Minor	H	G

Sumber: Rodateknindo Purajaya, 2017

**4.4.2 Penyusunan Diagram Network**

Setelah hubungan keterkaitan dan waktu antar masing-masing kegiatan diketahui, maka diagram *network* dapat digambarkan. Diagram *network* ini menunjukkan keterkaitan antar kegiatan satu dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dalam *network*, menyusun komponen-komponen sesuai urutan logika ketergantungannya merupakan dasar pembuatan jaringan kerja, sehingga di ketahui urutan kegiatan dari awal mulainya proyek sampai dengan selesainya proyek secara keseluruhan. Dalam pembuatan *network* ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dari hubungan antar kegiatan yang

disusun menjadi mata rantai urutan kegiatan yang sesuai dengan logika ketergantungan, yaitu:

1. Suatu kegiatan dapat dikerjakan secara bersamaan dengan kegiatan lainnya.
2. Suatu kegiatan hanya dapat dikerjakan apabila kegiatan sebelumnya sudah selesai dikerjakan.
3. Suatu kegiatan dapat dikerjakan secara tersendiri tanpa harus menunggu kegiatan sebelumnya (Dummy).

Berikut ini adalah *network planning* dari proyek pembangunan jalan Kalimantan kota Bengkulu.

**4.4.3 Menentukan Lintasan Kritis**

Yang dimaksud dengan lintas kritis pada langkah ini adalah jalur yang terdiri dari rangkaian kegiatan dalam lingkup proyek, yang bila terlambat akan mengakibatkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Kegiatan yang berada dalam jalur ini disebut kegiatan kritis.

Lintasan kritis dapat diketahui dengan menggunakan perhitungan ES-EF dan LS-LF pada masing-masing kegiatan proyek. Perhitungan EF-ES dan LS-LF diperoleh melalui proses *forward pass* dan *backward pass*. Perhitungan *forward pass* dimulai dari awal sampai akhir proyek dan nantinya akan diperoleh EF paling akhir dari kegiatan proyek. EF diperoleh dari ES ditambah dengan waktu kegiatan tersebut. EF terakhir tersebut merupakan waktu tercepat penyelesaian proyek. Sedangkan perhitungan *backward pass* dimulai dari akhir proyek menuju awal proyek. LS diperoleh dari LF dikurangi dengan waktu pada kegiatan tersebut. Suatu kegiatan dikatakan kritis apabila memiliki *slack* (waktu longgar) sama dengan nol, artinya EF dan LF atau ES dan LS memiliki nilai yang sama. *Slack* dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Slack} = \text{LS} - \text{ES} = \text{LF} - \text{EF}$$

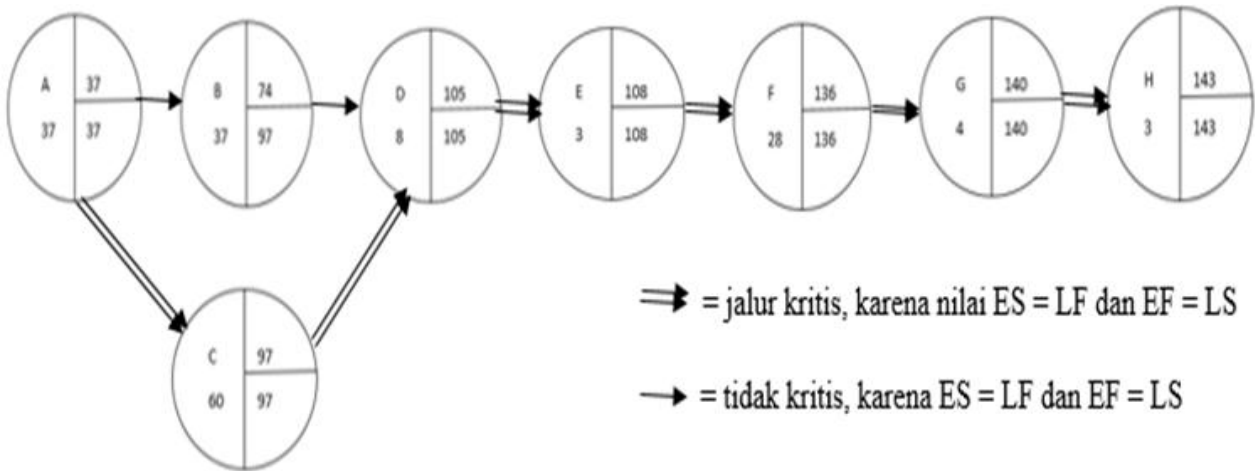
Ket:

LS = *Latest Start* adalah Waktu terakhir suatu aktivitas dapat dimulai sehingga tidak

menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek.  
 ES = *Earliest Start* adalah Waktu paling awal suatu aktivitas dapat dimulai dengan asumsi semua pendahulunya sudah selesai.  
 LF = *Latest Finish* adalah Waktu terakhir suatu aktivitas dapat selesai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek.

EF = *Earliest Finish* adalah Waktu paling awal suatu aktivitas dapat selesai.

Lintasan kritis dari kegiatan pembangunan jalan Kalimantan kota Bengkulu ini dapat dilihat dari gambar diagram *network* dengan perhitungan *forward pass* dan *backward pass*. Apabila nilai *forward pass* berbeda dengan nilai *backward pass* maka kegiatan itu bukan merupakan kegiatan kritis.



**Gambar 3: Jalur Kritis Proyek Pembangunan Jalan Kalimantan Kota Bengkulu**

Sumber: Data Peneliti Diolah

A: Umum	E: Perkerasan Berbutir
B: Drainase	F: Perkerasan Aspal
C: Struktur	G: Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
D: Pekerjaan Tanah dan Pekerjaan Minor	H: Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor

Pada Gambar 3. dapat kita lihat bahwa kegiatan yang ditunjukkan oleh dua anak panah merupakan kegiatan keritis, Karena nilai ES dan LF nya sama. Sedangkan kegiatan yang ditunjukkan satu anak panah bukan merupakan kegiatan kritis, karena nilai ES dan LF nya berbeda. Kegiatan yang merupakan jalur kritis adalah A, C, D, E, F, G, dan H. Sedangkan yang bukan merupakan Kegiatan kritis adalah kegiatan B.

Pada tabel 4 berikut ini dapat dilihat hasil perhitungan waktu optimis dan waktu pesimis masing-masing pekrjaan pada proyek pembangunan

jalan Kalimantan kota Bengkulu ini dilakukan untuk mencari ekspektasi penyelesaian proyek pembangunan jalan Kalimantan kota Bengkulu.

**Tabel 4: Perhitungan Waktu Optimis dan Pesimis**

Kegiatan	Waktu Normal	Waktu Optimis (a)	Waktu Pesimis (b)
A	37	23,73	50,27
B	37	25,46	48,54
C	60	45,65	76,35
D	8	6,91	9,09
E	3	3	3
F	28	19,7	36,21
G	4	4	4
H	3	3	3

Sumber: Data Peneliti Diolah

Setelah ketiga estimasi waktu telah diperoleh, maka ekspektasi waktu (yang diharapkan) dari masing – masing kegiatan juga dapat ditentukan dengan cara:

$$T = \frac{a + 4m + b}{6}$$

**Tabel 5:** Hasil Perhitungan Ekspektasi Waktu (Waktu yang Diharapkan)

Kegiatan	Waktu Normal	Waktu Optimis (a)	Waktu Pesimis (b)	Ekspektasi Waktu
A	37	23,73	50,27	37
B	37	25,46	48,54	37
C	60	45,65	76,35	60
D	8	6,91	9,09	8
E	3	3	3	3
F	28	19,7	36,21	28
G	4	4	4	4
H	3	3	3	3

Sumber: Data Peneliti Diolah

Pada Tabel 5. dapat kita lihat bahwa ekspektasi waktu penyelesaian waktu proyek pembangunan jalan Kalimantan kota Bengkulu dari total waktu pengerjaan masing-masing proyek, maka ekspektasi waktu penyelesaian proyek pembangunan Jalan Kalimantan Kota Bengkulu adalah 180 hari.

#### 4.4.4 Menentukan Varians Berdasarkan Perkiraan Waktu

Untuk menghitung dispersi (*dispertion*) atau varians waktu penyelsaian kegiatan (*variance of activity time*), dapat digunakan rumus:

$$\text{Varians} = \left[ \frac{b - a}{6} \right]^2$$

Pada Tabel 6. Variasi dalam kegiatan yang berbeda pada jalur kritis dapat mempengaruhi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan dan

memungkinkan terjadinya penundaan. PERT menggunakan varians kegiatan jalur kritis untuk membantu menentukan varians proyek keseluruhan dengan menjumlahkan varians kegiatan kritis. Berikut adalah varians waktu penyelesaian kegiatan pada jalur kritis:

**Tabel 6:** Perhitungan Varians untuk Masing – masing Kegiatan

Kegiatan	Waktu Normal	Waktu Optimis (a)	Waktu Pesimis (b)	Varian (v)
A	37	23,73	50,27	19,55
B	37	25,46	48,54	14,77
C	60	45,65	76,35	26,14
D	8	6,91	9,09	0,13
E	3	3	3	0
F	28	19,7	36,21	7,56
G	4	4	4	0
H	3	3	3	0

Sumber: Data Peneliti Diolah

**Tabel 7:** Varians Waktu Penyelesaian Kegiatan pada Jalur Kritis

Kegiatan Kritis	Varians
A	19,55
C	26,14
D	0,13
E	0
F	7,56
G	0
H	0
<b>Total Varians</b>	<b>53,38</b>

Sumber: Data Peneliti Diolah

Pada Tabel 7. diatas diperoleh nilai varians waktu penyelesaian proyek berdasarkan lintasan

kritis adalah sebesar 53,38 dengan standar deviasi adalah  $\sqrt{53,38} = 7,30$  hari.

#### 4.4.5 Menentukan Probabilitas Waktu Penyelesaian Proyek

Berdasarkan perhitungan varians diatas, waktu penyelesaian kegiatan yang melewati lintasan kritis adalah 4,90 hari. Dengan menggunakan kurva normal dapat ditentukan probabilitas waktu penyelesaian proyek dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai deviasi normal (Z) = [batas waktu – waktu yang diharapkan] / standar deviasi

$$Z = \frac{180 - 143}{7,30} = \frac{37}{7,30} = 5,06$$

Pada tabel kurva normal dapat dikonversikan  $Z = 5,06$  adalah sama dengan  $0,99999660 = 99,99\%$ . Jadi besarnya probabilitas proyek dapat diselesaikan dalam waktu 143 hari adalah sebesar 99,99 % dan tidak terjadi perubahan biaya sehingga selisih waktu pengerjaan dapat digunakan perusahaan untuk pengecekan dan perbaikan.

**Tabel 8:** Perbandingan Hasil Waktu dan Biaya Proyek pada Pekerjaan Normal dan Menggunakan Analisis PERT

Keterangan	Normal	Analisis PERT	Selisih
Waktu penyelesaian proyek (hari)	180	143	37
Total biaya penyelesaian proyek (RP.000)	7.865.146,00	7.865.146,00	Rp.0

Sumber: Data Peneliti Diolah

Dengan menggunakan analisis *Network Planning* dengan metode PERT (*Program Evaluation and Review Technique*), proyek pembangunan Jalan Kalimantan Kota Bengkulu ini dapat terselesaikan dalam jangka waktu 143 hari sehingga perusahaan

dapat menghemat waktu penyelesaian proyek selama 37 hari dari waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan yaitu selama 180 hari.

Dengan selisih waktu 37 hari tersebut, dapat digunakan oleh pihak kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan yang lain. Sementara biaya proyek yang dikeluarkan adalah sama yaitu biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.7.865.146.000,00, yang menunjukkan bahwa walau penyelesaian proyek dengan metode PERT lebih cepat tapi tidak ada biaya tambahan yang muncul.

Dalam penelitian ini tidak terjadi perubahan biaya karena, dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Jalan Kalimantan Kota Bengkulu ini sistem pembiayaan yang dilakukan adalah menggunakan sistem borongan, artinya untuk setiap pengerjaan masing-masing kegiatan biaya yang digunakan adalah tetap sesuai dengan anggaran biaya pada perusahaan. Pada metode PERT ini tidak dilakukan percepatan pengerjaan proyek, sehingga tidak membutuhkan penambahan tenaga kerja yang bisa menyebabkan penambahan biaya.

Dari analisis yang telah dilakukan, biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pembangunan jalan Kalimantan kota Bengkulu didapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan jumlah biaya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan kegiatan proyek tersebut. Hal ini terlihat dari analisis yang telah dilakukan jika proyek tidak menggunakan metode *network planning* dengan metode PERT, maka proyek tersebut membutuhkan total biaya sebesar Rp.7.865.146.000,00. Sedangkan jika pengerjaan proyek menggunakan metode *network planning* dengan metode PERT, maka proyek tersebut membutuhkan dana yang sama besarnya jika perusahaan tidak menggunakan metode PERT yaitu sebesar Rp. 7.865.146.000,00.

Dalam penelitian ini tidak terjadi perubahan biaya karena, dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan Kalimantan kota Bengkulu ini sistem pembiayaan yang dilakukan adalah menggunakan sistem borongan, artinya untuk setiap pengerjaan masing-masing kegiatan biaya yang

digunakan adalah tetap sesuai dengan anggaran biaya pada perusahaan.

Jadi, dengan menggunakan metode PERT (*Program Evaluation and Review Technique*) dalam perencanaan pembangunan jalan Kalimantan kota Bengkulu perusahaan dapat mempercepat waktu penyelesaian proyek tanpa mengeluarkan biaya tambahan, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan waktu dan biaya pengerjaan proyek.

Hal ini sesuai dengan penelitian – penelitian sebelumnya yang juga dilakukan oleh (Aditya, 2011; Misrali et al., 2015; Aqilah, 2015; Susanty et al., 2016; Shofa et al., 2017) membuktikan bahwa penerapan *network planning* menggunakan metode PERT (*Program Evaluation and Review Technique*), mampu mengoptimalkan waktu dan biaya pada suatu proyek.

Dari hasil penelitian ini dihasilkan bahwa metode PERT memiliki keunggulan diantaranya, seperti yang dikemukakan Heizer & Render (2008), diantaranya; sangat berguna terutama saat menjadwalkan dan mengendalikan proyek besar, konsep yang lugas atau secara langsung dan tidak memerlukan hitungan matematis yang rumit, jaringan grafis membantu melihat hubungan antar kegiatan secara cepat, analisis jalur kritis dan waktu slack membantu menunjukkan kegiatan yang perlu diperhatikan lebih dekat, dokumentasi proyek menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk kegiatan yang beragam, dapat diterapkan untuk proyek yang bervariasi, berguna dalam mengawasi jadwal dan biaya.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode PERT waktu optimal pembangunan jalan Kalimantan kota Bengkulu adalah 143 hari. Berarti terjadi penghematan waktu kerja yaitu 37 hari dari yang sebelumnya 180 hari. Sementara biaya proyek

yang dikeluarkan adalah tetap. Proyek tersebut tersebut diperkirakan memiliki peluang sebesar 99,99 % untuk dikerjakan dalam jangka waktu 143 hari.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis, maka dapat disarankan bahwa sebaiknya PT Rodateknindo Purajaya menerapkan *network planning* dengan metode PERT dalam membuat suatu perencanaan waktu dan biaya pada proyek – proyek yang akan dilaksanakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Adegoke, A.S. 2011, *Measuring Process Effectiveness Using CPM/PERT*, International Journal of Business and Management, 6 (6): 286.
- [2] Aditya, N. 2011, *Analisis Network Planning pada Konsep Hunian Modern dan Alami Perumahan Permata Indah Jember*, Skripsi Tidak Dipublikasikan, Program Sarjana Universitas Jember, Jember.
- [3] Aqilah, N. K. L. 2015, *Otimisasi Waktu pada Prosedur Pelelangan dan Penjadwalan Proyek dengan Menggunakan Metode PERT pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) IV Cabang Makasar*, Skripsi Tidak Dipublikasikan, Universitas Hasanudin Makasar, Makasar.
- [4] Arikunto, S. 2002, *Metodologi Penelitian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- [5] Badri, S. 1997, *Dasar-dasar Network Planning*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- [6] Cleand, D. I., dan Realand, L. R. 1994, *Project Management: Strategic Design and Implementation (Vol. 4)*, McGraw-Hill, New York.
- [7] Cooper, D. R., dan Schindler, P. S. 2003, *Business Research Methods*, McGraw-Hill Companies, Inc, New York.



- [8] Dayanti, E. 2010, *Optimalisasi Pelaksanaan Proyek dengan Metode PERT dan CPM*, Skripsi Tidak Dipublikasikan, Universitas Diponegoro, [Vol. 8 No. 2 Maret 2019](http://Optimalisasi Pelaksanaan Proyek dengan Metode CPMPERT, pdf (Objek Application/pdf) [20 Januari 2018], Semarang.</a></p><p>[9] Doubravsky, K., dan Doskocil, R. 2013, <i>Risk Analysis of Stochastic PERT Graph</i>, <i>Trends Economic and Management</i>, 7 (14): 35 – 43.</p><p>[10] Ervianto, I. W. 2009, <i>Manajemen Proyek Konstruksi, Edisi Revisi</i>, Andi, Yogyakarta.</p><p>[11] Hall, N. G. 2012, <i>Project Management: Recent Developments and Research Opportunities</i>, <i>Journal of System Sciene and System Engineering</i>, 21 (2): 129 – 143.</p><p>[12] Heizer, J., dan Rander, B. 2014, <i>Manajemen Operasi</i>, Edisi Ketujuh, Salemba Empat, Jakarta.</p><p>[13] Herjanto, E. 2003, <i>Manajemen Produksi dan Operasi</i>, Cetakan Ketiga, PT. Grasindo, Jakarta.</p><p>[14] Kareth, M., Tarore, H. J., Tjakra, Walangitan, D. R. O. 2012, <i>Analisis Optimalisasi Waktu dan Biaya dengan Program Primavera 6.0 (Studi Kasus: Proyek Perumahan Puri Kelapa Gading)</i>, <i>Jurnal Sipil Statik</i>, 1 (1): 53-59.</p><p>[15] Levin, R., dan Kirckpatrick, C. 1977, <i>Perencanaan dan Pengendalian dengan PERT dan CPM (Network Planning)</i>, Balai Aksaran, Jakarta.</p><p>[16] Management. Body of Knowledge. (PMBOK® Guide). 2000, <i>Project Management Institute</i>, Newtown Square, Pennsylvania, USA.</p><p>[17] Misrali, Bambang, E. G. dan Joko, A. N. 2015, <i>Evaluasi Penjadwalan Waktu dan Biaya pada Proyek Pembangunan Gedung Kelas di Fakultas Ekonomi Universitas Jember dengan Metode PERT</i>, Artikel Ilmiah Mahasiswa.</p><p>[18] Misrali. 2015, <i>Evaluasi Penjadwalan Waktu dan Biaya pada Proyek Pembangunan Gedung Kelas di Fakultas Ekonomi Universitas Jember dengan Metode PERT</i>, Skripsi Tidak Dipublikasikan, Program Sarjana Universitas Jember, Jember.</p></div><div data-bbox=)

## Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Untuk UMKM Kerajinan Souvenir Di Kelurahan 30 Ilir Palembang

Siti Khairani<sup>1)</sup>, Raisa Pratiwi<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> STIE Multi Data Palembang

Jalan Rajawali No. 14 Palembang

E-mail: siti\_kh@stie-mdp.ac.id<sup>1)</sup>, raisapратиwi@stie-mdp.ac.id<sup>2)</sup>

**Abstract:** MSMEs are part of the creative industry, which is a business activity that focuses on creation and innovation. Indonesia is a country that is rich in culture and traditions that can be a source of creativity. The classic problems that are generally faced by MSMEs are business management problems which include production problems, capital marketing and access to capital in banks. These problems can be overcome by providing training and assistance to MSMEs in order to develop more competitively with other MSME actors. One form of training and assistance that can be given to MSMEs is training in making financial reports. The financial report is a condition that must be met by businesses to apply for loan capital assistance to banking institutions. This study aims to determine the extent to which SMEs can find out about recording / accounting, financial reports and the introduction of operational activities, investment activities, financial activities and financing. The training was held both places of Palembang Typical Souvenirs, namely sweet songket and yusuf effendi, each of which has 5 (five) employees including the owner. The results of the study show that the majority of business people have been able to find out about accounting records, preparation of financial reports and information on financing for investment and business operations development after training has been held.

**Keywords:** Training, Financial Report, UKM, Craft Souvenir

**Abstrak:** UMKM merupakan bagian dari industri kreatif, yang merupakan suatu kegiatan usaha yang fokus pada kreasi dan inovasi. Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budaya serta tradisi yang bisa menjadi sumber kreativitas. Permasalahan klasik yang pada umumnya dihadapi oleh UMKM adalah masalah manajemen usaha yang meliputi masalah produksi, pemasaran permodalan dan akses permodalan di perbankan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM agar dapat berkembang lebih kompetitif dengan pelaku UMKM lainnya. Salah satu bentuk pelatihan dan pendampingan yang dapat diberikan kepada UMKM adalah pelatihan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mengajukan bantuan modal pinjaman ke lembaga perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana para pelaku UKM dapat mengetahui mengenai pencatatan/akuntansi, laporan keuangan serta pengenalan kegiatan operasional, kegiatan investasi, kegiatan keuangan dan pembiayaan. Pelatihan dilaksanakan kedua tempat UKM Souvenir Khas Palembang yaitu cantik manis songket dan yusuf effendi dimana masing – masing memiliki 5 (lima) orang pegawai yang termasuk pemilik. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pelaku usaha telah dapat mengetahui mengenai pencatatan akuntansi, penyusunan laporan keuangan dan informasi mengenai pembiayaan untuk pengembangan investasi dan operasional usaha setelah diadakannya pelatihan.

Kata kunci: Pelatihan, Laporan Keuangan, UKM, Kerajinan Souvenir

### 1. PENDAHULUAN

UMKM merupakan bagian dari industri kreatif, yang

merupakan suatu kegiatan usaha yang fokus pada kreasi dan inovasi. Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budaya serta tradisi yang bisa menjadi

sumber kreativitas. kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2014 adalah Rp 784,82 triliun dan pada 2015 menjadi Rp 852 triliun atau meningkat 8,6 persen.

“Dari total kontribusi tersebut, sub-sektor kuliner, kriya, dan *fashion* memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi kreatif. Sub-sektor kuliner tercatat berkontribusi sebesar 41,69 persen, kemudian *fashion* sebesar 18,15 persen, dan kriya sebesar 15,70 persen. Selain itu, industri film bertumbuh 10,28 persen, musik 7,26 persen, seni/arsitektur 6,62 persen, dan *game* tumbuh 6,68 persen. (Kompas.id:2017 dalam Khairani dan Raisa, 2018).

Berdasarkan data di atas, seharusnya UMKM mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan pihak lainnya agar dapat dibina dan dikembangkan sehingga UMKM mampu menjadi penopang perekonomian Indonesia dan sekaligus memberdayakan masyarakat secara mandiri. (Khairani dan Raisa, 2018).

Permasalahan klasik yang pada umumnya dihadapi oleh UMKM adalah masalah manajemen usaha yang meliputi masalah produksi, pemasaran permodalan dan akses permodalan di perbankan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM agar dapat berkembang lebih kompetitif dengan pelaku UMKM lainnya.

Salah satu bentuk pelatihan dan pendampingan yang dapat diberikan kepada UMKM adalah pelatihan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha jika ingin mengajukan bantuan modal pinjaman ke lembaga perbankan.

Laporan keuangan secara sederhana merupakan hasil dari proses pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan, yang disusun secara sistematis untuk menghasilkan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi (PSAK NO. 1 (revisi 2009): 2009). Selain itu laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam menyusun laporan keuangan hendaklah disajikan secara lengkap dan benar sesuai dengan kenyataan-kenyataan ekonomi yang terjadi di perusahaan mengenai keberadaan dan operasi entitas. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan arus kas selama periode,

Namun kenyataannya masih banyak perusahaan khususnya UMKM belum membuat laporan keuangan yang lengkap dan benar. Pihak bank dan fiskus seringkali mengeluhkan ketidakmampuan dan atau kelemahan-kelemahan UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Kondisi ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan pelaku UMKM, minimnya pengetahuan mereka dalam membuat pembukuan dan laporan keuangan, kurang memahami Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta tidak ada aturan pemerintah yang mewajibkan mereka untuk membuat laporan keuangan.

Propinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang, mempunyai sentra UMKM yang tersebar di beberapa tempat. Salah satunya adalah UMKM kerajinan souvenir khas Palembang. Sentra UMKM kerajinan souvenir khas Palembang berada di Kelurahan 30 ilir yang juga merupakan pusat pembuatan dan penjualan songket Palembang.

Sebagian besar UMKM kerajinan souvenir merupakan usaha rumahan dengan tenaga kerja yang berjumlah kurang lebih dua sampai dengan lima orang. Manajemen usaha masih bersifat sederhana karena belum adanya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. UMKM kerajinan souvenir yang

menjadi pengamatan penulis adalah usaha kerajinan souvenir milik Ibu Nyayu Nurhayati dan usaha kerajinan souvenir milik Bapak Yusuf Effendi yang sekarang dikelola oleh anak beliau yang bernama Nyayu Rahmawati.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada artikel ini penulis akan menganalisis mengenai kemampuan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dengan perumusan masalah bagaimana kemampuan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan.

Tujuan kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan untuk UMKM kerajinan souvenir di kelurahan 30 ilir Palembang adalah:

- 1) untuk mensosialisasikan pentingnya pembuatan laporan keuangan,
- 2) untuk membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan bagaimana menganalisa kemajuan usaha melalui laporan keuangan,
- 3) membantu pihak yang terkait khususnya pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya pembuatan laporan keuangan.

Adapun manfaat pendampingan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM agar para peserta mempunyai kemampuan untuk membuat laporan keuangan dan meningkatkan usaha kerajinan souvenir kelak dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga berguna untuk masyarakat di sekitarnya dengan meningkatkan derajat ekonomi masyarakat.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah (UM)**

Pengertian Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah (UM) terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan usaha tersebut. Selama ini pengertian (penggolongan) UMKM diatur oleh pemerintah melalui keputusan menteri keuangan yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003

tanggal 29 Januari 2003, kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dasar yang dipakai dalam mendefinisikan dan menggolongkan jenis UMKM tersebut adalah sifat kepemilikan, jumlah kekayaan bersih usaha, hasil penjualan (omzet), dan jumlah pengajuan kredit kepada bank. (Kasih, 2018).

Menurut Kuncoro (2013) dalam Kasih (2018), secara umum usaha mikro dan kecil memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Manajemen pengelolaan usaha yang masih sederhana,
- 2) Rendahnya akses usaha mikro dan kecil terhadap lembaga kredit,
- 3) Belum memiliki status badan hukum,
- 4) Terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu.

Sedangkan secara khusus usaha mikro dapat dikenali dari ciri-ciri berikut:

- 1) Jenis barang/komoditi yang dijual tidak selalu tetap,
- 2) tempat usaha tidak selalu menentang,
- 3) belum memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha,
- 4) belum memiliki administrasi keuangan yang sederhana sekalipun,
- 5) pemilik usaha atau pelaku usaha belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai,
- 6) tingkat pendidikan pemilik atau pelaku usaha rata-rata relative rendah,
- 7) pemilik usaha secara umum belum mampu mengakses permodalan bank, tetapi sudah banyak yang memanfaatkan lembaga keuangan non bank,
- 8) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Menurut Tambunan (2009) dalam Putra (2017), UMKM memiliki beberapa permasalahan yaitu masalah internal yang meliputi: kurangnya permodal, terbatasnya Sumber Daya Manusia, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi usaha. Sedangkan masalah eksternal meliputi iklim usaha belum sepenuhnya kondusif dengan kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuhkan kembangkan UMKM, terbatasnya sarana dan

prasarana usaha, kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 2.2 Pelaporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK ETAP

Kriteria UMKM Kriteria usaha kecil Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil menengah, usaha menengah dan usaha besar adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro Kriteria dari Usaha Mikro ialah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil Kriteria dari Usaha Kecil ialah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: Kriteria dari Usaha Menengah ialah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Laporan keuangan merupakan proses akhir dari kegiatan akuntansi. Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen perusahaan kepada para pemilik modal. Laporan keuangan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009) paragraph

9 dalam Waluyo (2014), laporan keuangan adalah satu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Sedangkan sebagai tujuan laporan keuangan dimaksudkan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Hal tersebut tampak laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statement*) agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lainnya.

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

- 1) laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode,
- 2) laporan laba rugi komprehensif selama periode,
- 3) laporan perubahan ekuitas selama periode,
- 4) laporan arus kas selama periode,
- 5) catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya, dan
- 6) laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Sedangkan menurut Kasmir (2013), tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan
8. Informasi keuangan lainnya.

### **2.3 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang dicapai oleh perusahaan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti jika diperbandingkan dan dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang dapat mendukung keputusan yang diambil.

Laporan Keuangan menurut Munawir (2004) adalah sebuah hasil dari proses akuntansi yang akan digunakan sebagai alat yang bertujuan untuk berkomunikasi antara data keuangan serta aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2006) yaitu merupakan suatu media yang sangat penting yang digunakan untuk menilai prestasi serta kondisi ekonomis suatu perusahaan. Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK tahun 2009 adalah sebagai berikut: Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau prospektus.

### **3. METODE**

Sifat dari kegiatan ini adalah berbasis kebutuhan dan kemampuan responden, maka metode yang digunakan dalam pelaksanaannya adalah dengan pendekatan partisipatif (*participative approach*) dimana responden terlibat langsung baik dalam FGD

(*focus group discussion*), wawancara, berkonsultasi, dan menentukan keputusan tindakan. Pelaksanaan kegiatan melalui 4 tahapan berikut:

- 1) Tahap Persiapan dan Perencanaan Tim pelaksana melakukan persiapan dan perencanaan dalam bentuk:
  - (a) Sosialisasi Implementasi Pengabdian. Pada tahap ini tim pelaksana akan memaparkan maksud dan tujuan, metode dan teknis pelaksanaan kegiatan, serta melakukan FGD untuk menyepakati prioritas masalah yang dihadapi dan alternatif solusinya.
  - (b) Penyusunan Program Kegiatan. Tim pelaksana melakukan FGD dengan kedua mitra untuk menentukan bentuk, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Program kegiatan terdiri dari penyuluhan pentingnya kreativitas dan inovasi produk; pelatihan pemasaran dan promosi usaha;
- 2) Tahap Implementasi Kegiatan Tim pelaksana akan memulai kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan disepakati bersama dengan responden. Kegiatan pelatihan menggunakan metode ceramah dan diskusi (tanya jawab) sedangkan penentuan keputusan lain berdasarkan hasil FGD dengan responden. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan terdiri aspek keuangan kegiatan pendampingan dan pelatihan pembuatan laporan keuangan metode yang digunakan dengan cara mengadakan ceramah mengenai dasar-dasar akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Diakhir pemberian materi dilanjutkan dengan tanya jawab serta melakukan praktek bagaimana cara pembuatan laporan keuangan yang baik untuk kegiatan operasional, kegiatan investasi, kegiatan keuangan dan pembiayaan, pembuatan buku persediaan, buku hutang, buku piutang dan buku kas.
- 3) Tahap Evaluasi dan Monitoring Kegiatan dimonitoring oleh tim sendiri dan melihat apa saja kendala dan masalah yang muncul di lapangan. Kemudian dilakukan evaluasi apabila memang muncul kendala dan masalah untuk selanjutnya dicarikan solusi agar kegiatan tetap berlangsung dengan baik sesuai yang diharapkan.

Metode yang digunakan adalah FGD dengan responden.

- 4) Tahap Refleksi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh umpan balik terhadap manfaat maupun dampak yang dirasakan mitra setelah dilakukan pelatihan dan pembinaan. Hal ini diperlukan sebagai masukan bagi pelaksanaan kegiatan serupa di masa datang. Metode yang digunakan adalah FGD dengan responden.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses pencatatan transaksi keuangan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Masalah klasik UMKM di Indonesia salah satunya adalah belum menerapkan akuntansi sebagai sarana untuk mencatat transaksi keuangan hingga ke penyusunan laporan keuangan. Hampir 90% kondisi tersebut terjadi di Indonesia.

Alasan utama yang selalu dikemukakan oleh pelaku UMKM adalah karena akuntansi itu susah dan ribet apalagi kalau harus menyusun laporan keuangan, belum lagi masalah sumber daya manusia yang terbatas keahliannya. Untuk itu, maka tim pengabdian dari STIE Multi Data Palembang melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan untuk UMKM kerajinan souvenir yang berlokasi di 30 Ilir Palembang.

Beberapa hal yang diperoleh dari pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dapat diuraikan dalam pembahasan berikut ini:

Para peserta sudah memahami akan adanya bukti transaksi. Bukti transaksi berupa nota ataupun kwitansi jarang mereka simpan dan langsung diberikan kepada pembeli, jika ada pembeli minta nota atau kwitansi baru dibuatkan. Begitupun dengan bukti pembelian kadang ada yang disimpan, jadi tidak semua transaksi ada bukti transaksi dan tidak disimpan dengan rapi. Kondisi ini menunjukkan

bahwa pelaku UMKM memahami akan adanya bukti transaksi tetapi bukti transaksi tersebut tidak digunakan untuk menyusun laporan keuangan.

Bukti transaksi tersebut ada yang direkap dan ada yang tidak sehingga bukti transaksi tersebut tidak dapat dilanjutkan dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu mereka juga belum menerapkan pencatatan laporan keuangan dengan baik. Para pelaku usaha hanya membuat catatan kecil yang tidak dilakukan rekapitulasi sehingga menyebabkan kendala mengenai keberadaan *asset* yang tidak tercatat ataupun penjualan yang masih belum tercatat yang mengakibatkan ketidakdisiplinan siklus perputaran uang pada UKM bahkan berdampak pada kerugian.

Dari kondisi tersebutlah maka tim pengabdian merasa perlu untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya bukti transaksi sebagai dokumen usaha dan menyarankan untuk menyimpan semua jenis bukti transaksi tersebut, serta memberikan pelatihan mengenai cara membuat Laporan Laba/Rugi, Neraca, Perubahan Modal dan Arus Kas.

Berikut adalah beberapa hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada UKM Kerajinan Souvenir Palembang di Kelurahan 30 Ilir:

##### a) Pengenalan Dasar – Dasar Akuntansi

Pengenalan dasar-dasar Akuntansi bagi UMKM merupakan proses yang penting sebagai pedoman para pelaku UKM dalam menyusun laporan keuangan. Beberapa informasi keuangan yang dapat diperoleh UKM dalam mempraktekkan akuntansi adalah para UKM dapat memperkirakan Informasi kinerja, Informasi posisi dana, Informasi Perubahan Modal dan Informasi Pemasukan dan Pengeluaran Kas dari usaha yang telah dijalankan oleh pelaku UKM.

Dalam pelatihan ini para pelaku UKM diberikan pendampingan untuk dapat mencatat hasil penjualan beserta komponen – komponen laporan keuangan dalam periode berjalan sehingga dapat mengetahui secara pasti laba bersih, harta, modal dan

kewajiban dari usahanya. Berikut hasil angket yang telah dibagikan kepada masing – masing pegawai UKM Kerajinan Souvenir Palembang di Kelurahan 30 ilir yang terdiri dari dua UKM yaitu Cantik manis Songket dan Yusuf Effendi mengenai pengenalan pencatatan Akuntansi.

**Tabel 1.** Pengenalan Dasar – Dasar Akuntansi

Mengenal Akuntansi/Pencatatan		
Mengenal Akuntansi/Pencatatan	Frekuensi	Presentase
Ya	8	80
Tidak	2	20

Sumber : Data Diolah

### **b) Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelatihan penyusunan laporan keuangan yang diberikan kepada para pelaku UKM yaitu dengan pendampingan secara khusus dan pemberian materi serta memberikan solusi dalam permasalahan menyusun laporan keuangan di UKM Kerajinan Souvenir Palembang di Kelurahan 30 ilir.

Dalam memahami Informasi Kinerja UKM, para pelaku UKM diberikan pelatihan penyusunan laporan laba rugi agar UKM dapat mencatat penjualan periode sebelumnya dan dibandingkan dengan penjualan periode berjalan serta pencatatan beban – beban untuk menghitung laba/ rugi bersih dari usaha sehingga menjadikan para pelaku usaha dapat mempertimbangkan kebijakan yang akan dibuat dalam usahanya.

Informasi Dana UKM merupakan hal yang belum sama sekali disadari oleh pelaku UKM sehingga terdapat masalah dalam pencatatan asset yang dimiliki oleh UKM dan para pemilik tidak mengetahui secara persis mengenai kepemilikan total asset. Dalam pencatatan Akuntansi untuk memahami informasi dana UKM dihasilkanlah laporan neraca untuk mencerminkan dana berupa asset yaitu harta atau aktiva serta sumber – sumber modal para pelaku UKM yang didapat dari modal sendiri atau berupa hutang.

Hal tersebut merupakan hal penting yang harus diketahui oleh UKM untuk mengetahui gambaran mengenai posisi keuangan usahanya. Untuk mengetahui sumber pendanaan dari usaha para pemilik perlu memahami informasi perubahan modal bagi pemilik usaha dimana para pelaku usaha diberikan pelatihan mengenai penyusunan laporan perubahan ekuitas dan komponen dalam laporan tersebut.

Pelatihan diberikan bertujuan agar para pemilik dapat mengetahui perkembangan modal usaha. Informasi pemasukan dan pengeluaran secara keseluruhan telah dicatat oleh para pelaku UKM sebelum adanya pelatihan khusus dalam menyusun laporan keuangan namun kendala yang dihadapi yaitu tidak adanya rekapitulasi atau buku akuntansi serta pengumpulan bukti transaksi yang tidak dicatat secara kolektif membuat ada beberapa kekurangan yang baru disadari oleh para pemilik setelah beberapa lama dari transaksi tersebut terjadi.

Dalam hal ini para pemilik diberikan pelatihan mengenai pencatatan laporan arus kas. Semakin baik pencatatan yang dilakukan para pelaku UKM maka akan semakin sukses usaha yang dijalaninya.

Dari beberapa pelatihan yang diberikan, ada beberapa pertanyaan kepada responden yang dibuat dalam bentuk angket dan diberikan kepada peserta pelatihan yaitu mengenai pemahaman dalam menyusun laporan laba/rugi dihasilkan bahwa sebanyak 90% dari responden mengetahui penyusunan laporan laba/rugi setelah diadakannya pelatihan. Para responden menganggap bahwa komponen dalam laba/rugi masih bisa diterima dan dipahami dengan mudah oleh para responden.

**Tabel 2.** Pencatatan Laba/Rugi

Mengetahui Pencatatan Laba/Rugi		
Mengerahui Pencatatan Laba/Rugi	Frekuensi	Presentase
Ya	9	90
Tidak	1	10

Sumber : Data Diolah



Pelatihan mengenai penyusunan laporan neraca atau laporan posisi keuangan masih banyak para peserta yang belum terlalu memahami komponen penyusunan laporan Neraca.

Hal tersebut terlihat dari hasil angket yang telah dibagikan hanya 30% dari responden yang mengetahui pencatatan laporan neraca. Alasan yang diberikan oleh responden dikarenakan sebagian responden menganggap bahwa komponen dalam laporan neraca terlalu kompleks dan waktu pembelajaran yang masih tergolong singkat.

**Tabel 3.** Pencatatan Neraca

Mengetahui Pencatatan NERACA		
Mengetahui Pencatatan NERACA	Frekuensi	Presentase
Ya	3	30
Tidak	7	70

Sumber : Data Diolah

Dalam pelatihan pencatatan perubahan modal sebagian responden dapat mengetahui mengenai tata cara dalam pencatatan perubahan modal yaitu sebanyak 60% dari responden. Namun masih ada 40% dari responden yang masih belum terlalu paham mengenai laporan perubahan modal.

**Tabel 4.** Pencatatan Perubahan Modal

Mengetahui Pencatatan Perubahan Modal		
Mengetahui Pencatatan Perubahan Modal	Frekuensi	Presentase
Ya	6	60
Tidak	4	40

Sumber : Data Diolah

Pelatihan pencatatan Arus Kas dapat lebih mudah dipahami oleh responden sehingga sebagian besar dari responden dapat mengikuti dengan baik ilmu pengetahuan yang diberikan selama pelatihan mengenai tata cara penyusunan pencatatan Arus kas yaitu sebanyak 80% responden menjawab dapat mengetahui pencatatan arus kas namun masih ada sebanyak 20% dari responden masih belum mengetahui secara jelas mengenai pencatatan arus kas.

**Tabel 5.** Pencatatan Arus Kas

Mengetahui Pencatatan Arus kas		
Mengetahui Pencatatan Arus kas	Frekuensi	Presentase
Ya	6	60
Tidak	2	20

Sumber : Data Diolah

### c) Pengenalan kegiatan operasional, kegiatan investasi, kegiatan keuangan dan pembiayaan

UKM Kerajinan Souvenir Palembang di Kelurahan 30 ilir merupakan bisnis keluarga yang dikelola secara turun temurun. Para pelaku UKM masih kurang memahami mengenai pengetahuan dasar – dasar operasional, pengembangan investasi dalam usaha serta kegiatan keuangan. UKM Kerajinan Souvenir Palembang di Kelurahan 30 ilir masih belum memiliki pembiayaan dari pihak eksternal, rata – rata dari para pelaku UKM tersebut masih mengelola menggunakan modal sendiri sehingga pengembangan usaha masih belum maksimal.

Para pelaku UKM memberikan respon yang sangat positif mengenai materi pembiayaan dikarenakan para pelaku UKM menganggap hal tersebut merupakan bagian yang penting yang ingin mereka ketahui dalam pengembangan usahanya. Kegiatan pelatihan yang dilakukan memberikan pengetahuan dasar bagi para UKM untuk dapat mengajukan pinjaman bagi pihak eksternal dengan melakukan pencatatan laporan keuangan yang tertib sehingga para pelaku UKM dapat memenuhi syarat pengajuan pembiayaan. Dalam kegiatan pelatihan dilakukan juga sosialisai kepada para pelaku UKM untuk mengikuti seminar – seminar dari Perbankan dalam pengajuan pembiayaan usaha sehingga para pengusaha dapat mengetahui syarat terbaru dalam pembiayaan dan memahamicara pengembangan investasi dalam usahanya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan pembuatan laporan keuangan bagi UKM Kerajinan Souvenir Palembang di Kelurahan 30 Ilir Palembang adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan dasar – dasar akuntansi yang diberikan kepada pelaku UKM memberikan respon yang positif karena sebagian besar dari para pelaku UKM dapat mengetahui mengenai akuntansi pencatatan dapat dilihat dari sebanyak 80% dari responden menjawab mengenal Akuntansi walaupun dalam realisasinya para pelaku UKM masih belum melakukan pencatatan laporan keuangan secara tertib dan sesuai kaidah akuntansi.
2. Pelatihan penyusunan laporan keuangan, sebagian dari responden dapat mengikuti materi yang diberikan yaitu menyusun laba/rugi, neraca, perubahan, modal dan arus kas. Sebagian besar laporan keuangan mendapat respon positif yaitu lebih dari 50% responden menjawab mengetahui mengenai pelatihan laporan keuangan yang diberikan. Namun, laporan neraca hanya dapat dipahami oleh 30% dari responden saja dikarenakan sebagian responden menganggap bahwa komponen dalam laporan neraca terlalu kompleks dan waktu pembelajaran yang masih tergolong singkat.
3. Para pelaku UKM sangat antusias dengan Pengenalan kegiatan operasional, kegiatan investasi, kegiatan keuangan dan pembiayaan. Para pelaku UKM masih mengelola usaha dengan modal sendiri sehingga dengan adanya pelatihan ini para pelaku UKM dapat memahami pengajuan pembiayaan untuk investasi dan operasional usahanya.

## **5.2 Saran**

Minimnya penerapan sistem akuntansi yang dilakukan oleh usaha kecil dan menengah dikarenakan kurangnya keinginan dari pelaku usaha kecil dan menengah untuk melakukan pencatatan atau

pembukuan untuk usahanya, pelaku UKM masih belum mempunyai motivasi atau keinginan untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mempermudah para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam melakukan usahanya diharapkan adanya bimbingan dan kerjasama dari pihak-pihak terkait terutama Dinas UMKM Kota Palembang untuk dapat membina dan memberikan pelatihan yang lebih intensif lagi bagi para pelaku UKM, agar usaha mereka jadi jauh lebih baik kedepannya. Dan diharapkan pula bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar dapat menerapkan ilmu yang telah di berikan di dalam menjalankan usahanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Harahap, Sofyan Syafri. 2006, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [2] Kasmir. 2013, *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- [3] Kasih, Yulizar. 2018, *Dasar-dasar Kewirausahaan*, STIE MDP, Palembang
- [4] Khairani, Siti dan Pratiwi, Raisa, 2018, *Peningkatan Omset Penjualan Melalui Diversifikasi Produk dan Strategi Promosi pada UMKM Kerajinan Souvenir Khas Palembang*, *Carrade: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Makasar.
- [5] Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi). 2009, *Dewan Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta
- [6] Putra, Adi Vico. 2017, *Kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Menyusun Laporan Keuangan (Studi Kasus UMKM AA Cetring dan UMKM Nini Catering di Kota Padang)*, Poltek Negeri Padang.

- [7] S. Munawir. 2004, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Ke-4, Liberty, Yogyakarta.
- [8] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, *Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*, Jakarta.

## Pengaruh Komite Dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

T. Husain<sup>1)</sup>, Syamsu Alang<sup>2)</sup>

<sup>1</sup> STMIK Widuri Jakarta

email: thusain1819@gmail.com

<sup>2</sup> STIE Bhakti Prasetya Karya Praja

email: syamsualang@yahoo.com

**Abstract:** This research is aim to examine and establish sciantifically the effect of the committee and quality audit on the tax avoidance to sub-sectors infrastructure and construction non building companies listed on the Indonesian Stock Exchange. Measurement of tax avoidance in this research using formulas of effective tax rate (ETR) on divide the amount of corporate tax income by earnings before taxes during the period. This study is a causal research with quantitative approach. The population in this research is sub-sectors infrastructure and construction non building companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2013-2017. The sampling technique used purposive sampling and counting in amount of 8 companies. Data collected using literature study and documentation. Data obtained through of www.idx.co.id and company official website. Methods of data analysis using logistic regression analysis model. These results of this study indicate that committee and quality audit have no significant effect either simultaneously or partially test on the tax avoidance.

**Keywords:** effective tax rate (ETR), audit committee, audit quality, tax avoidance.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara ilmiah pengaruh dari komite dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor infrastruktur dan konstruksi non bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengukuran *tax avoidance* pada penelitian ini menggunakan rumus tarif pajak efektif (ETR) dengan membandingkan besarnya pajak penghasilan perusahaan dibagi dengan laba sebelum pajak dalam satu periode. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor infrastruktur dan konstruksi non bangunan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan ditetapkan sebanyak 8 perusahaan. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Data diperoleh melalui situs www.idx.co.id dan *website* resmi perusahaan. Metode analisis data menggunakan model analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun secara parsial terhadap *tax avoidance*.

**Kata kunci:** tarif pajak efektif (ETR), komite audit, kualitas audit, *tax avoidance*.

### 1. PENDAHULUAN

Optimalisasi penerimaan target pendapatan pada sektor perpajakan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi agenda utama yang harus didukung oleh semua pihak dan elemen masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah terkait upaya pengamanan pencapaian target pendapatan dan perpajakan antara lain optimalisasi pemeriksaan yang berfokus pada sektor-sektor unggulan dari masing-masing Kantor Wilayah (Kanwil), mencegah adanya praktik *transfer pricing* dan kecurangan serta *data*

*matching*. Kebijakan APBN 2016 Pemerintah dengan target penerimaan pendapatan negara sebesar Rp1.822,5 triliun dengan sumbangan perpajakan mencapai 75 persen atau sebesar Rp1.360,2 triliun dapat dijadikan momentum sebagai tahun dimana perpajakan menjadi motor penggerak pembangunan menuju negara yang modern (Haryanto, 2016). Adanya mekanisme *self assessment* dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan perubahan ke-4 UU Pajak Penghasilan, UU Nomor 36 Tahun 2008 hingga penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau *tax amnesty* yang

meniadakan sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan dijadikan sebagai sumber pendanaan utama yang dibidik oleh Pemerintah guna menopang perekonomian Indonesia.

Kebebasan yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya sendiri menyebabkan wajib pajak dapat melakukan aktivitas manajemen pajak untuk menekan beban pajak terutangnya melalui teknik penghindaran, pada satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal) sedangkan di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Diantari dan Ulupui:2016).

Teknik perpajakan yang dipakai oleh wajib pajak harus dicegah Pemerintah dalam upaya mengurangi dan memberikan kesempatan pada pihak manajemen yang secara aktif melakukan perencanaan pajak yang agresif (Hasan et al., 2016). Setelah program *tax amnesty* berakhir pada 31 Maret 2017, Pemerintah mengultimatium kepada para pengemplang pajak (*tax avoider*) yang akan mengusut dan memberikan sanksi berat karena merupakan pelanggaran yang serius atas asas keadilan pajak, keadilan ekonomi dan keadilan sosial (Lako, 2017).

Praktik *tax avoidance* merupakan implementasi dari penerapan *corporate governance* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya, tidak adanya mekanisme pengawasan yang memadai (Vidiyanti, 2017). Komite audit merupakan salah satu struktur *corporate governance* yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan jumlahnya ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang diketuai oleh komisaris independen. Komite audit ini berfungsi sebagai pengawasan internal dan berkontribusi dalam pembuatan laporan keuangan khususnya pada perusahaan-perusahaan publik (Cahyono, Andini dan Raharjo, 2016).

Praktik tidak hanya dipengaruhi oleh peran sentral komite audit sebagai salah satu struktur *corporate governance* yang berasal dari pihak internal. Faktor yang berasal dari pihak eksternal yang juga berdampak pada praktik penghindaran pajak adalah kualitas audit. Kualitas audit dapat diukur

dengan menggunakan proksi dikeluarkannya opini audit *going-concern* oleh auditor kepada kliennya (Francis, dalam Darwin, 2016).

Kantor akuntan publik atau KAP dengan ukuran dan reputasi yang lebih besar disebut dengan *Big 4* memiliki kecenderungan untuk menjaga nama baik mereka dengan tidak memiliki ketergantungan terhadap kliennya sehingga diyakini dapat menghilangkan tekanan dari klien terhadap mereka dibandingkan dengan KAP selain *Big 4*. Opini ini dapat dijadikan sebagai salah satu proksi untuk menilai kualitas audit yang dilakukan oleh auditor karena sifatnya yang lebih independen maka secara teoritis auditor akan cenderung mengeluarkan opini audit *going-concern*.

Perkembangan bisnis pada sektor konstruksi bangunan di Indonesia dengan paradoks infrastruktur dan pertumbuhan usaha pemerintahan Jokowi secara signifikan dinilai dapat memperbaiki kondisi infrastruktur di seluruh Indonesia yang didasari oleh alasan yang baik untuk mendorong dunia usaha melalui pengadaan barang publik yang diperlukan untuk aktivitas ekonomi, seperti jalan, rel, bandara, pembangkit listrik dan jaringan, atau sistem irigasi (LPEM FEB UI, 2018:10).

RPJMN direncanakan dengan 2.650 km jalan baru pada segmen Trans Sumatera, Trans-Jawa, Non-Trans Jawa, Samarinda-Balikpapan, Manado-Bitung, dan seterusnya yang dibangun dalam 3 tahun pertama pemerintahan Jokowi melebihi total panjang jalan tol yang dibangun selama 40 tahun sebelumnya. Keterbatasan kemampuan anggaran negara untuk mencakup semua pendanaan infrastruktur yang dipimpin oleh BUMN, keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur menjadi sangat penting untuk strategi pembangunan infrastruktur jangka panjang yang berkelanjutan. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam strategi ini dimana dalam 5 (lima) tahun terakhir, Indonesia telah mengalami masa pertumbuhan investasi infrastruktur yang lambat dari pihak swasta.

Praktik *tax avoidance* dalam kaitannya dengan komite audit dan kualitas audit telah dilakukan

oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah Damayanti dan Susanto (2015), Vidiyanti (2017), dan Eksandy (2017).

Beberapa penelitian tidak menunjukkan hasil yang konsisten seperti penelitian Damayanti dan Susanto serta Vidiyanti (2017) yang tidak membuktikan pengaruh komite audit dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian Eksandy (2017) hanya membuktikan pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan.

Kemudian, penelitian yang menggunakan profitabilitas dengan proksi *return on assets* juga cukup banyak diteliti diantaranya dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015), Ismi dan Linda (2016), Saifudin dan Yunanda (2016), Mulyani, Kusmuriyanto dan Suryarini (2017), serta Vidiyanti (2017). Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang konsisten seperti penelitian Pradipta dan Supriyadi (2015), Saifudin dan Yunanda (2016), Mulyani, Kusmuriyanto dan Suryarini (2017) serta Vidiyanti (2017) yang menggunakan profitabilitas dengan pengukuran *return on assets* mempengaruhi praktik *tax avoidance*.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian di atas menjadi penting dan menarik untuk dikaji lebih lanjut karena masih menggunakan objek penelitian sebelum implementasi Standar Pelaporan Keuangan berbasis IFRS (*International Financial Reporting Standard*) yang berlaku efektif secara menyeluruh sejak tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Perkembangan bisnis pada sub sektor infrastruktur dan konstruksi non bangunan menjadi salah satu yang melatarbelakangi pemilihan objek pada penelitian ini.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **2.1 Teori Agensi**

Teori agensi merupakan teori yang mendasari hubungan antara pemilik (*principal*) dengan pihak

manajemen (*agent*) yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Scott (2015:340) mendefinisikan teori agensi “*Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contract to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent’s interest would otherwise conflict with those of the principal*”.

Perbedaan kepentingan di atas dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena kemungkinan *agent* tidak bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Kebijakan *tax amnesty* dapat memberikan kesempatan pihak manajemen untuk melaporkan penghasilan kena pajak (PKP) seminimal mungkin tanpa adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan.

Standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengizinkan pihak manajemen untuk mengambil suatu kebijakan dalam mengaplikasikan metode akuntansi guna menyampaikan informasi mengenai kinerja perusahaan kepada pihak eksternal sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi positif atau negatif. Kecenderungan manajer yang rasional akan memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kepentingannya yang menyebabkan timbulnya asimetri informasi yang mendorong pihak *agent* menggunakan asimetris informasi dengan melakukan *tax avoidance* dalam mekanisme *tax management* yang menjadikan keuntungan tersendiri yang tidak dapat didapatkan dari kerjasama yang terjadi dengan pihak *principal*.

### **2.2 Komite Audit**

Arens *et al.* (2014), definisi komite audit adalah: “*Audit committees is a selected number of members of a company’s board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management, most audit committees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not a part of company management.*”

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan

Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Emiten atau perusahaan publik (OJK, 2015).

Jumlah komite audit juga harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat. Komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan satu dari beberapa alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang obyektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan.

### 2.3 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan dapat dipahami dengan memisahkan antara pengertian kualitas dan audit. Menurut ISO 8402: dalam Quality Vocabulary, kualitas adalah *the totality of features characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs of costumers*. Dari pengertian di atas, kualitas produk dan jasa dapat ditinjau dari sudut pandang *perfomance, features, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetis, dan perceived quality*. Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014).

Audit didefinisikan atas pemeriksaan secara obyektif terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan yang dilakukan oleh seorang akuntan (Tandiontong, 2016:159,67).

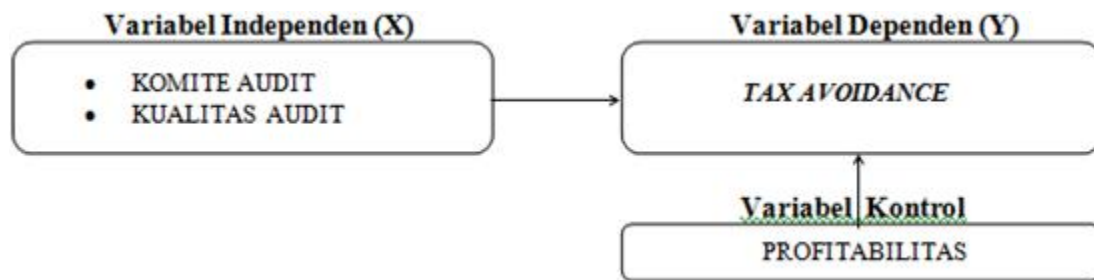
Kualitas audit berdasarkan dua definisi di atas, dapat disimpulkan dari reputasi auditor yang diukur dengan kompetensi cerapan (*perceived*) dan tingkat independensi seorang auditor. Reputasi auditor yang tergabung dalam instansi Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam publik akuntan publik. (Agoes, 2012:43).

Seorang auditor dituntut untuk memiliki independensi, kompetensi dan pertimbangan profesional dalam menilai keadaan entitas dan penilaian risiko perusahaan berdasarkan *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)* dalam bentuk opini atas laporan keuangan perusahaan yang dirilis oleh KAP. Banyak peneliti yang sepakat bahwa penggunaan audit yang berkualitas harus dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen dan menjadi kekuatan pemantauan (*monitoring strength*) (Watkins *et al.*, dalam Tandiontong, 2016).

Kantor akuntan publik *Big 4* dipandang memiliki kualitas jasa audit yang lebih baik dibandingkan dengan kantor akuntan publik yang berskala lebih kecil. Salah satunya dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang direkrut. Lewat proses selektif, auditor dipilih berdasarkan kemampuan yang dimilikinya terkait dengan kemampuannya di bidang akuntansi, auditing, perpajakan dan bidang-bidang pendukung lainnya.

Auditor yang terpilih terus dikembangkan kemampuannya lewat penerapan kemampuan teknis di lapangan dan melalui pelatihan-pelatihan teknis yang dilakukan secara berkala. Hasilnya, auditor yang dimiliki benar-benar menguasai bidangnya dan dapat memberikan jasa profesional terbaik kepada klien. Dengan kata lain, laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big 4* seharusnya lebih berkualitas dibandingkan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP selain *Big 4*. KAP *Big 4* dapat diyakini atau dipercaya akan memberikan jasa audit yang lebih independen dan transparan dalam mengungkapkan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

## 2.4 Model Penelitian



Gambar 1: Kerangka Model Penelitian

Hipotesis:

- H1= Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*  
H2= Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausalitas, yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan yang bersifat sebab akibat antara variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi) (Sugiyono, 2015:62). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada studi empiris untuk membuktikan secara ilmiah pengaruh komite dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* dengan pendekatan *effective tax rate* (ETR) yang berfokus pada perusahaan-perusahaan *go-public* dengan prosedur statistik. Hasil penelitian diolah secara statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS Versi 23.00.

### 3.1 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pada sub sektor infrastruktur dan konstruksi non bangunan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) sejak tahun 2013-2017. Prosedur sampling menggunakan metode *purposive*, yaitu dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015:126), dimana umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan bergerak pada sub sektor infrastruktur dan konstruksi non bangunan.
2. Perusahaan telah menyampaikan laporan tahunan tahun 2013-2017 ke BEI secara lengkap.
3. Perusahaan yang menggunakan satuan mata uang selain rupiah (IDR) sebagai mata uang pelaporan akan dikonversikan menggunakan kurs tengah KMK.

### 3.2 Pengukuran dan Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel independen sering disebut sebagai variabel *stimulus, predictor, antecedent* atau variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen yang dioperasikan sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sudaryono, 2017:154,155).

### 3.3 Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel

Variabel independen sering disebut sebagai variabel *stimulus, predictor, antecedent* atau variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen yang dioperasikan sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang



menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sudaryono, 2017:154,155).

## 1. Variabel Independen

### Komite Audit

Variabel Komite Audit (X1) pada penelitian ini menggunakan skala rasio yang dihitung dari banyaknya keanggotaan komite audit yang dimiliki perusahaan.

### Kualitas Audit

Variabel Kualitas Audit (X2) pada penelitian ini menggunakan variabel *dummy* yang diukur dengan mengklasifikasikan kantor akuntan publik *Big 4* diberi kode "1" sedangkan kantor akuntan selain *Big 4* diberi kode "0".

## 2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax avoidance* (Y). *Tax avoidance* menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR) dengan menggunakan total rasio beban pajak penghasilan kini terhadap *pre-tax income*. (Dyreng *et al.*, 2008 dalam Astuti dan Haryani, 2017).

Beban pajak penghasilan merupakan penjumlahan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. *Pre-tax income* adalah laba bersih sebelum dikurangi pajak penghasilan.

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense i, t}}{\text{Pretax Income i, t}}$$

### Keterangan:

ETR : *effective tax rate*  
Tax Expense : beban pajak penghasilan  
Pretax Income : laba sebelum pajak

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* juga menggunakan variabel *dummy* yang dikodifikasi dengan angka "1" jika nilai CETR positif artinya perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak dan

angka "0" jika nilai CETR negatif artinya perusahaan jelas-jelas melakukan penghindaran pajak.

## 3. Variabel Kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas dengan proksi pengukuran *return on assets* (ROA) melalui perhitungan antara laba setelah pajak terhadap keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan.

### 3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik (*logistic regression analysis*) melalui tahapan-tahapan pengujian berikut ini: (1) analisis statistik deskriptif, (2) uji kualitas data; dan (3) uji hipotesis. Adapun model persamaan regresi logistik dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 ROA + \varepsilon$$

### Keterangan:

Y : *Tax Avoidance*  
X1 : Komite Audit  
X2 : Kualitas Audit  
ROA : Variabel Kontrol  
 $\alpha$  : Konstanta  
 $\beta_1 \dots \beta_3$  : Koefisien Regresi  
 $\varepsilon$  : *Error*

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan sampelnya. Keseluruhan populasi mencakup 13 (tiga belas) perusahaan sub sektor infrastruktur dan konstruksi non bangunan yang terdaftar di BEI dengan mengeliminasi 4 (empat) perusahaan yang *listing* pada periode pengamatan dan 1 (satu) perusahaan tidak dapat diakses melalui *website* BEI. Dengan demikian, terdapat 8 (delapan) rincian nama perusahaan sub sektor infrastruktur dan konstruksi non bangunan yang layak digunakan sebagai sampel penelitian.

Tabel 1: Rincian Nama Perusahaan Sampel Penelitian

Kode Saham	Tanggal IPO	Nama Emiten
CMNP	10-Jan-1995	PT Cipta Marga Nusaphala Persada, Tbk.
JSMR	12-Nov-2007	PT Jasa Marga (Persero), Tbk.
META	18-Jul-2001	PT Nusantara Infrastructure, Tbk.
IBST	31-Agu-2012	PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.
INDY	11-Jun-2008	PT Indika Energy, Tbk.
SUPR	11-Okt-2011	PT Solusi Tunas Pratama, Tbk.
TBIG	26-Okt-2010	PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk.
TOWR	08-Mar-2010	PT Sarana Menara Nusantara, Tbk.
TRUB	16-Okt-2006	PT Truba Alam Mamunggal Engineering, Tbk.

Sumber: Data BEI, 2018 melalui <https://www.sahamok.com/emiten/sektor-infrastruktur-utilitas-transportasi/>

#### 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan cara untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikan informasi tanpa

bertujuan untuk membuat kesimpulan yang digeneralisasi. Statistik deskriptif keseluruhan variabel penelitian yang mencakup nilai rata-rata, minimum, maksimum dan standar deviasi pada tabel berikut ini:

Tabel 2: Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komite Audit	40	3	4	3,20	0,405
Kualitas Audit	40	0	1	0,33	0,474
Profitabilitas	40	-0,100	0,2700	0,048710	0,0470698
Tax Avoidance	40	-1,5770	0,7693	0,191768	0,3418623
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Output SPSS 23.00 (2018)

*Tax Avoidance* (Y) pada penelitian ini mempunyai nilai rata-rata ETR 0,191768 dengan nilai memiliki minimum dan maksimum yang berkisar antara minus -1,5770 sampai dengan 0,76963. Variasi data *tax avoidance* pada sampel 40 perusahaan sub sektor infrastruktur dan konstruksi non bangunan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 relatif besar (nilai mean dibandingkan nilai standar deviasi adalah kurang dari 30% yaitu 0,560951).

Variabel Komite Audit (X1) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,20 anggota komite audit dan Variabel Kualitas Audit (X2) menunjukkan 33,3 persen diantaranya diaudit oleh KAP Big 4 dan sisanya 66,7 diaudit oleh KAP selain Big 4.

Variabel profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,048710 dengan standar deviasi sebesar 0,3418623. Artinya, 40 data sampel penelitian yaitu perusahaan sub sektor infrastruktur dan konstruksi non bangunan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 memiliki rata-rata nilai *return-on assets* (ROA) yang cukup rendah.

#### 4.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data pada penelitian ini tidak melakukan uji normalitas data karena menurut *logistic regression* tidak memerlukan asumsi normalitas pada variabel bebasnya (Ghozali, 2017). Di samping itu, penelitian ini juga mengabaikan

heteroskedastisitas (Gujarati, 2003). Selanjutnya, uji kualitas data dilakukan dengan uji multikolinearitas dengan melihat besaran nilai *tolerance* dan VIF (*variance inflated factor*).

**Tabel 3:** Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai <i>Tolerance</i>	Nilai VIF
Komite Audit	0.875	1.142
Kualitas Audit	0.855	1.170
Profitabilitas	0.972	1.029

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23.00 (2018)

Nilai *tolerance* pada masing-masing variabel independen lebih besar (>) daripada 0,1 dan nilai VIF lebih kecil (<) daripada 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolinearitas antar variabel independen.

Sebelum melakukan pengujian regresi logistik, langkah selanjutnya adalah menilai kelayakan model regresi dengan melihat nilai *hosmer and lemeshow's test*.

**Tabel 4:** Hasil Uji *Hosmer and Lemeshow's Test*

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	8,691	8	,369

Sumber: Output SPSS 23.00 (2018)

Nilai *chi-square* sebesar 8,691 dengan signifikansi sebesar 0,369 pada derajat bebas (df) = 8. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar (>) dari  $\alpha = 5\%$  ( $H_0$  diterima) sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara model dengan nilai observasinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik yang digunakan cukup baik menggambarkan hubungan antara komite dan kualitas audit dengan *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor infrastruktur dan konstruksi non bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Setelah melakukan pengujian kelayakan model regresi yang digunakan, maka langkah selanjutnya adalah menilai keseluruhan model (*over*

*all model fit*) dengan membandingkan nilai *-2 log likelihood* (LL) pada masing-masing *block number*.

**Tabel 5:** Hasil Uji Perbandingan Nilai *-2 Log Likelihood*

Iteration History <sup>a,b,c</sup>			
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0	1	34,433	1,400
	2	33,822	1,701
	3	33,817	1,734
	4	33,817	1,735

- a. Constant is included in the model.
- b. Initial -2 Log Likelihood: 33,817
- c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Output SPSS 23.00 (2018)

**Tabel 6:** Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	30,447 <sup>a</sup>	,081	,142

- a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Sumber: Output SPSS 23.00 (2018)

Hasil perbandingan nilai *-2 log likelihood* (LL) dapat diketahui bahwa nilai *-2 log likelihood* (LL) pada awal (*Block Number* = 0) sebesar 33,817 dan pada akhir (*Block Number* = 1) sebesar 30,447 sehingga terjadi penurunan nilai *-2 log likelihood* sebesar 3,37. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik yang digunakan baik / *fit*.

Setelah menilai keseluruhan model (*overall model fit*) regresi, maka langkah selanjutnya adalah pengujian koefisien determinasi dengan melihat nilai *Nakelkerke R Square*. Nilai *Nakelkerke R Square* (R<sup>2</sup>) diperoleh sebesar 0,142, hal ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat dijelaskan sebesar 14,2 persen oleh variabel independen yaitu komite dan kualitas audit serta profitabilitas sebagai variabel kontrol. Sedangkan sisanya sebesar 85,8 persen diterangkan

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model regresi logistik ini.

### 4.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini ditujukan untuk membuktikan secara ilmiah pengaruh komite dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* yang dilakukan dengan model analisis regresi logistik, pengujian secara simultan (*Omnibus Test of Model Coefficient*), dan pengujian signifikansi parameter individual (Uji Wald). Adapun model persamaan regresi linear logistik yang dihasilkan pada penelitian ini adalah:

$$Y = -58,694 + 19,910X_1 + 0,472X_2 + 5,528ROA + \epsilon$$

Keterangan:

- Y : *Tax Avoidance*
- X1 : Komite Audit
- X2 : Kualitas Audit
- ROA : Variabel Kontrol
- a : Konstansa
- $\beta_1 \dots \beta_3$ : Koefisien Regresi
- e : *Error*

**Constant :** -58,694. Artinya jika komite audit (X1), kualitas audit (X2) dan profitabilitas (ROA) dianggap konstan, maka besarnya *tax avoidance* adalah 58,694 satuan.

**Komite Audit (X1) :** Koefisien regresi untuk variabel independen komite audit (X1) sebesar 19,910 dapat diartikan bahwa setiap penambahan satu anggota komite audit, maka berdampak secara tidak signifikan pada peningkatan *tax avoidance* sebesar 19,910 satuan dengan asumsi variabel lain diabaikan dan konstan.

**Kualitas Audit (X2) :** Koefisien regresi untuk variabel independen kualitas audit (X2) sebesar 4,72 dapat diartikan bahwa setiap penambahan satu satuan variabel kualitas audit, maka berdampak secara tidak signifikan pada peningkatan *tax avoidance* sebesar 4,72 satuan dengan asumsi variabel lain diabaikan dan konstan.

**Profitabilitas (ROA):** Koefisien regresi untuk variabel kontrol profitabilitas (ROA) sebesar 5,528 yang dihitung dengan *return on assets* dapat diartikan bahwa setiap penambahan satu satuan variabel profitabilitas, maka berdampak secara signifikan pada *tax avoidance* sebesar 5,528 satuan dengan asumsi variabel lain diabaikan dan konstan.

Pengujian secara simultan (Uji-F) atau dikenal dengan istilah *Omnibus Test of Model Coefficient* pada analisis regresi logistik dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen.

**Tabel 7:** Hasil Uji-F (*Omnibus Test of Model Coefficient*)

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	3,370	3	,338
	Block	3,370	3	,338
	Model	3,370	3	,338

Sumber: Output SPSS 23.00 (2018)

Hasil pengujian *omnibus test of model coefficient* diperoleh nilai *Chi-Square* sebesar 3,370 pada derajat bebas ( $df$ ) = 3 dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari alpha 5%, yaitu 0,338 sehingga menolak  $H_0$ .

Dengan demikian, variabel independen komite dan kualitas audit secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengujian signifikansi parameter individual (uji-t) atau dikenal dengan istilah uji Wald pada analisis regresi logistik dilakukan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Di samping itu, pengujian ini dimaksudkan untuk memprediksi sejauhmana kontribusi perubahan yang terjadi pada masing variabel independen terhadap besarnya variabel dependen.

Tabel 8: Hasil Uji Wald

Variables in the Equation

Step	X1	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
1 <sup>a</sup>	X1	19,910	14190,438	,000	1	,999	443457426,523	,000	-
	X2	,472	,972	,236	1	,627	1,604	,239	10,771
	ROA	5,528	11,615	,226	1	,634	251,571	,000	1937545587009,904
	Constant	-58,694	42571,313	,000	1	,999	,000		

a. Variable (s) entered on step 1: X1, X2, ROA.

Sumber: Output SPSS 23.00 (2018)

Hasil dari uji signifikansi secara individual (Uji Wald) dijelaskan secara rinci berikut ini:

H1: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Hasil Perhitungan:

Nilai Wald = 0,000; dengan sig.= 0,999  
Variabel komite audit (X1) memiliki nilai wald sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  5 %, yaitu 0,999. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* menjadi **Ditolak**.

H2: Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Hasil Perhitungan:

Nilai Wald = 0,236; dengan sig.= 0,627  
Variabel kualitas audit (X2) memiliki nilai wald sebesar 0,236 dengan tingkat signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  5%, yaitu 0,627. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang

menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* juga menjadi **Ditolak**.

Variabel profitabilitas (ROA) yang diusulkan sebagai variabel kontrol memiliki nilai wald sebesar 0,226 dengan tingkat signifikansi lebih besar dari a 5%, yaitu 0,634. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak terbukti berpengaruh secara signifikan dan berfungsi sebagai variabel kontrol.

**4.4 Pembahasan**

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear logistik diperoleh nilai koefisien  $\hat{\beta}_1$  untuk variabel komite audit (X1) sebesar 19,910 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,999, hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan keanggotaan komite audit sebanyak 1 (satu) kali maka akan berdampak peningkatan *tax avoidance* sebesar 19,910 satuan dan tidak signifikan.

Hasil pengujian hipotesis ke-1 tidak membuktikan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dimana temuan penelitian ini tidak mendukung teori agensi yang

melatarbelakangi timbulnya konflik kepentingan yang terjadi antara pihak manajemen (*agent*) dengan *principal*, komite audit dinilai tidak efektif dalam mengawasi mekanisme manajemen pajak untuk melaporkan beban penghasilan pajak tanpa melanggar ketentuan dan regulasi yang berdampak pada sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Diantari dan Ulupui (2016) yang membuktikan pengaruh komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kondisi ini dapat dipahami bahwa dengan jumlah keanggotaan komite audit yang hanya memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan oleh OJK yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tidak mampu mengevaluasi praktik-praktik *tax avoidance*.

Anggota komite audit juga harus dipilih berdasarkan kompetensi latar belakang keilmuan dalam bidang akuntansi dan keuangan serta kesesuaian dengan jenis industri perusahaan tersebut sehingga dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya dalam mengawasi perusahaan dengan baik.

Sebaliknya, temuan ini membuktikan penelitian Eksandy (2017) dan Vidiyanti (2017) yang tidak membuktikan pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, banyak atau sedikitnya keanggotaan komite audit yang dimiliki perusahaan dalam penelitian ini tidak menjadi faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien  $\hat{\alpha}_2$  untuk variabel kualitas audit (X2) sebesar 0,472 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,627, hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel kualitas yang diukur dengan proksi klasifikasi KAP *Big 4* dan selain *Big 4* sebanyak 1 (satu) kali maka akan berdampak peningkatan *tax avoidance* sebesar 0,472 dan tidak signifikan.

Hasil pengujian hipotesis ke-2 membuktikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, temuan ini mengindikasikan

bahwa kualitas audit yang berasal dari KAP *Big 4* tidak menjadi jaminan untuk mengurangi praktik-praktik *tax avoidance*.

Temuan penelitian ini tidak mendukung penelitian Eksandy (2017) yang membuktikan pengaruh positif kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Setiap kantor akuntan publik (KAP) di Indonesia mengaudit perusahaan-perusahaan yang *listing* di pasar modal akan cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit karena diawasi secara ketat oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fiskus pajak yang menjadi acuan dalam pemeriksaan pajak.

Sebaliknya, temuan ini membuktikan penelitian Vidiyanti (2017) yang tidak membuktikan pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Kebijakan *tax amnesty* juga dinilai tidak cukup efektif dalam mengurangi adanya praktik-praktik *tax avoidance*. Seorang auditor yang bekerja di KAP dituntut untuk memiliki independensi, kompetensi dan pertimbangan profesional dalam mengevaluasi perhitungan pajak penghasilan kini (*current tax*) untuk mengetahui besarnya pajak terutang Auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang (SA Seksi 220.1 SPAP:2013). Dengan demikian, kualitas audit yang berasal dari KAP *Big 4* dan selain *Big 4* dalam penelitian ini juga tidak menjadi faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

- a. Komite Audit tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Kualitas Audit tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Keterbatasan dari penelitian ini antara lain:

- a. variabel komite audit dan kualitas audit tidak membuktikan pengaruh terhadap variabel *tax avoidance* yang diproksikan dengan *effective tax rate* (ETR) yang hanya dikelompokkan secara umum berdasarkan kategori nilai positif dan negatif.
- b. Sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada 8 (delapan) perusahaan sub sektor infrastruktur dan konstruksi non bangunan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 sehingga hasil penelitian ini tidak cukup representatif menggambarkan secara umum perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam mengidentifikasi adanya praktik-praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan keterbatasan dari penelitian di atas, maka saran dari penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menentukan rumus perhitungan *tax avoidance* dengan proksi lainnya seperti *cash effective tax rate* (CETR) dengan skala rasio sehingga dapat lebih baik dalam mengukur tingkat *tax avoidance*.
- b. Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas jumlah sampel dan menambah periode pengamatan agar mendapatkan hasil penelitian yang dapat digeneralisasi dalam mengidentifikasi *trend* adanya praktik-praktik *tax avoidance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agoes, Sukrisno. 2012, *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jilid-1, Edisi Ke-4, Salemba Empat, Jakarta.
- [2] Arens, Alvin A., Elder, Randal J., Mark S. Beasley. 2014, *Auditing and Assurance Service, an Integrated Approach*, (Global Edition), Pearson Education Limited, England.
- [3] Astuti, Titiek P. dan Aryani Y. Anni. 2017, *Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI 2001-2014*, *Jurnal Akuntansi*, 20 (3) 375-388.
- [4] Cahyono, Dedy D., Andini, R. dan Raharjo, K. 2016, *Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (SIZE), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI periode Tahun 2011-2013*. *Jurnal of Accounting*. 2 (2).
- [5] Damayanti, F. dan Susanto, T. 2015, *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return on Assets terhadap Tax Avoidance*, *ESENSI Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5 (2), 187-206.
- [6] Darwin. 2016, *Analisis Perbedaan Kualitas Audit KAP Big 4 dan KAP Second Tier Dinilai dari Independensi Auditor, Manajemen Laba dan Nilai Relevansi Laba*, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- [7] Diantari, P.R dan Ulupui, IGK Agung. 2016, *Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance*, *E-Jurnal Akuntansi*, 16 (1), 702-732.
- [8] Eksandy, Arry. 2017, *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidane) (Studi Empiris pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)*, *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1 (1), 1-12.
- [9] Gujarati, Damodar. 2003, *Ekonometrika Dasar*, Edisi Ke-6, Erlangga, Jakarta.
- [10] Ghozali, Imam. 2017, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program: IBM SPSS 23*, Edisi Ke-8, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- [11] Haryanto, Joko Tri. 2016, *Tax Amnesty dan Kinerja Perpajakan 2016*, Diakses pada 03 November 2018, <https://www.kemenkeu.go.id/media/4377/tax-amnesty-dan-kinerja-perpajakan-2016.pdf>.
- [12] Hasan, M.M, Al-Hadi, A., Taylor G. dan Richardson G. 2016, *Does a Firm's Life Cycle Explain Its Propensity to Engage in Corporate Tax Avoidance?. European Accounting Review*. 1-33.
- [13] Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (....). (2013), *Standar Profesional Akuntan Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- [14] Ismi, Fadhil dan Linda 2016, *Pengaruh Thin Capitalization, ROA, dan Corporate Governance pada Perusahaan JII*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1 (1), 150-165.
- [15] Lako, Andreas. 2017, *Mengusut Pengelap Pajak*, Diakses pada 03 November 2018, <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170518/281638190136165>.
- [16] LPEM FEB UI. 2018, *Seri Analisis Makroekonomi: Indonesia Economic Outlook*, Diakses pada 10 November 2018, <https://www.lpem.org/wp-content/uploads/2017/11/Indonesia-Economic-Outlook-2018-ID.pdf>.
- [17] Mulyani, Sri, Kusmuriyanto, dan Suryarini, T. 2017, Analisis Determinan Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia, *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan (RAK)*. 2(3), 53-66.
- [18] OJK. 2015, *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/ 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*, Jakarta.
- [19] Pradipta dan Supriyadi. 2015, *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak*, Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember (27-30 September).
- [20] Scott, W.R. 2015, *Financial Accounting Theory (7<sup>th</sup> ed)*, Prentice-Hall International, New Jersey.
- [21] Saifudin dan Yunanda, D. 2016, *Determinasi Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak*, *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Wiga*, 6 (2), 131-143.
- [22] Sugiyono. 2015, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- [23] Sudaryono. 2017, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Press, Depok.
- [24] Tandiontong, Mathius. 2016, *Kualitas Audit dan Pengukurannya*, Alfabeta, Bandung.
- [25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- [26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty*.
- [27] Vidiyanti. 2017, *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Return on Assets, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance*, Skripsi STIE Perbanas, Surabaya.



# Pengaruh Keterkaitan Religiusitas, Sosial Ekonomi Dan Sikap *Love Of Money* Dalam Etika Penggelapan Pajak Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Icha Fajriana

STIE MDP

icha.fajriana@stie-mdp.ac.id

**Abstract:** *The purpose of this research is to determine the effect of Religiosity, Social Economy, and Love of Money on the UMKM taxpayer's tax evasion ethics, either simultaneously or partially. The data used are Individual Taxpayers of particular entrepreneur in KPP Pratama Palembang Ilir Barat in 2017. The method of analysis used is quantitative analysis, with the multiple regression models. The research shows that Religiosity, Social Economy, and Love of Money has impact on the UMKM taxpayer's tax evasion ethics, either simultaneously or partially in KPP Pratama Palembang Ilir Barat*

**Keywords:** *Religiosity, Social Economy, Love of Money, tax evasion*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Religiusitas, Sosial Ekonomi, Love of Money berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap etika penggelapan pajak Wajib Pajak UMKM Di KPP Palembang Ilir Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Barat tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak Wajib Pajak UMKM Di KPP Palembang Ilir Barat.

**Kata kunci:** religiusitas, sosial ekonomi, *love of money*, penggelapan pajak

## 1. PENDAHULUAN

Lingkungan dan budaya masyarakat berpengaruh pada pandangan akan bagaimana cara berperilaku yang dianggap baik. Perilaku yang dianggap baik dan buruk dari masing-masing daerah disebut sebagai norma yang nantinya akan diterapkan dalam etika berperilaku.

Etika merupakan cara pandang bagaimana menilai sesuatu apakah dikatakan baik ataupun buruk. Etika diperlukan dalam masyarakat guna meminimalisir adanya perselisihan antar asyarakat pada suatu pandangan, karena setiap orang tentunya memiliki pandangannya masing-masing. Etika hadir sebagai pedoman masyarakat dalam berperilaku serta menentukan apa yang dianggap baik dan buruk sehingga mampu terciptanya keharmonisan hidup.

Menjamurnya kasus penggelapan pajak di Indonesia mengartikan bahwa persepsi masing-masing individu terkait dengan etika penggelapan pajak sangat berbeda. Perbedaan persepsi antara masing-masing individu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yang erat kaitannya dengan psikologis seseorang. Salah satu yang menjadi alasan terjadinya tindakan *Tax Evasion* adalah *Money Ethics* atau etika uang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tang, 2002).

Etika uang berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku yang tidak etis. Tindakan yang tidak etis ini salah satunya adalah kecurangan pajak. Tindakan kecurangan pajak salah satunya dapat dipengaruhi oleh kecintaan yang tinggi terhadap uang. Seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam kehidupannya, akan merasa tindakan

Tax Evasion adalah tindakan yang dapat diterima (Lau, Choe, & Tan, 2013). Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi kecintaan (*High Money Ethics*) seseorang terhadap uang maka orang tersebut cenderung melakukan tindakan *Tax Evasion* dari pada seseorang yang memiliki kecintaan yang rendah terhadap uang (*Low Money Ethics*).

Setiap individu dalam melakukan suatu pekerjaan pada dasarnya memiliki motivasi yang berbeda-beda. Kemungkinan seseorang dalam melakukan perilaku yang tidak etis dalam keadaan status sosial ekonomi yang berbeda dapat terjadi. Semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang, maka ia cenderung untuk berperilaku konsumtif. Hal ini dapat berhubungan dengan perilaku etisnya, karena biasanya seseorang yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi dan berperilaku konsumtif, cenderung dapat berperilaku tidak etis (Sipayung, 2015).

Secara teori, penggelapan pajak dinilai sebagai hal yang mempunyai konotasi negatif dan tergolong tindakan kriminal karena dilakukan atas dasar kesadaran menyalahi aturan undang-undang dan dapat merugikan negara. Penggelapan pajak tergolong ke dalam kerangka hukum dari hukum pajak karena mengindikasikan adanya tindakan eksploitasi dalam hukum pajak untuk mengurangi kewajiban pajak (Sandmo, 2005).

Namun faktanya, etika penggelapan pajak dipandang lebih dari satu sisi sehingga dapat tergolong ke dalam tindakan bahkan diperbolehkan. Banyak kasus skandal penggelapan pajak yang terjadi, misalnya skandal yang terjadi pada perusahaan besar yaitu Enron dan Worldcom, yang melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Kasus manipulasi laporan keuangan juga terjadi di Indonesia dengan adanya rekayasa laporan keuangan PT Waskita Karya (Liputan6.com).

Kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan Toshiba menjadi perhatian serius, penggelapan laba perusahaan sebesar Rp.15,85 Triliun oleh perusahaan Toshiba yang dilakukan sejak tahun 2008 telah merugikan para

pemegang saham. Kasus manipulasi yang dilakukan perusahaan Toshiba tentunya berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan. Profesi akuntan di pandang negatif dan diragukan kualitasnya dalam memberikan jasa penyusunan laporan keuangan.

Selain itu kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh aktris Fan Bingbing yang terjerat masalah hukum karena mengemplang pajak, diketahui bahwa pendapatan yang di dapat Fang Bingbing sebesar US\$ 7,8 juta sementara dokumen lain Fan Bingbing sebutkan hanya dibayar sebesar US\$ 1,56 juta. Terkuak fakta bahwa motif yang dilakukan Fan Bingbing yaitu menyangkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh karena itu Fan Bingbing melakukan mengempangan pajak dengan melaporkan hasil pendapatan yang tidak akurat. (Liputan6.com 2018).

Pemahaman tidak mampu memastikan terbentuknya intelektual serta kematangan etis seseorang. Reaksi seseorang yang melakukan usaha mikro, kecil dan menengah pada berbagai kasus kecurangan pelaporan keuangan yang ada dapat dilihat dari sisi *religiusitas, sosial ekonomi dan love of money* (kecintaan kepada uang).

Dengan adanya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak membuat pemerintah tidak dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Berikut ini adalah tabel jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat tahun 2013-2017.

Di Indonesia yang telah menganut *prinsip Self Assessment System*, pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran, kejujuran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakkan keadilan hukum dan juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, Wajib Pajak akan kewajibannya dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan.

**Tabel 1.**

Jumlah UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah
2013	-
2014	-
2015	3.074
2016	4.001
2017	4.621

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2018

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan UMKM di kota Palembang dari tahun 2013 – 2017 mengalami peningkatan, ini membuktikan bahwa di Indonesia khususnya dikota Palembang UMKM mendapat respon yang baik di masyarakat. Dengan pertumbuhan yang semakin meningkat dan omzet yang juga meningkat membuat masyarakat semakin ingin membuka usaha namun permasalahan yang sering datang yaitu adanya kelalaian dan kecurangan seperti tidak membayar pajak atau melakukan penghindaran pajak.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Teori Motivasi

Teori motivasi menjelaskan bahwa terdapat suatu dorongan atau alasan bagi seseorang untuk melakukan dan menyelesaikan sesuatu (Frederickson, Miller dan Cline, 2008). Dengan adanya motivasi, seseorang akan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Teori motivasi oleh Maslow menjelaskan bahwa seseorang memiliki kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, serta pendapatan (Hasibuan, 2011).

Seseorang akan memiliki motivasi untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya. Status sosial ekonomi dan kecintaan seseorang pada uang erat berkaitan dengan keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan teori motivasi. Dalam teori motivasi, terdapat kebutuhan akan berafiliasi yang erat kaitannya dengan tingkat religiusitas. Teori motivasi digunakan untuk menjelaskan hubungan

religiusitas, status sosial ekonomi, dan sikap *love of money* pada persepsi etis usaha mikro, kecil dan menengah apakah dengan adanya dorongan yang diberikan seseorang akan terpengaruh untuk tidak melakukan suatu tindakan yang tidak etis.

Dari penjelasan diatas terdapat hubungan antara teori motivasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu suatu motivasi yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai suatu gambaran mengenai sikap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, dimana seseorang memiliki niat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan menentukan apakah suatu dorongan yang diberikan kepada Wajib Pajak dapat terealisasi dengan baik sebagai suatu keputusan yang diambil nantinya.

### 2.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

*Theory of Reasoned Action (TRA)* dikembangkan oleh Ajzen dan diberi nama *Theory of Planned Behaviour (TPB)*. Teori ini menjelaskan tentang adanya niat dalam berperilaku yang ditimbulkan oleh individu itu sendiri. Menurut Fishbein dan Azjen (2005), norma subjektif secara umum niat yang muncul dalam berperilaku ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

#### 2.2.1 Behavioral Beliefs

Faktor pertama merupakan hasil yang diperoleh dari bentuk dan evaluasinya dalam suatu keyakinan individu. Wajib Pajak tersebut akan memiliki keyakinan terhadap keadilan telah diterapkan akan menimbulkan taat pada pajak, hal tersebut akan mempengaruhi keyakinan mengenai pentingnya keadilan untuk membuat Wajib Pajak taat pada kewajibannya untuk membantu menyelenggarakan pembangunan *negara (Behavioral Beliefs)*.

#### 2.2.2 Normative Beliefs

Faktor kedua merupakan harapan motivasi yang dipegang teguh oleh keyakinan individu dalam harapan normatif kepada orang lain maupun motivasi

dalam memenuhi harapan. *Normative Beliefs* berkaitan dengan persepsi etis penggelapan pajak, dimana sikap religiusitas, sosial ekonomi, dan *Love of Money* yang baik dapat memberikan motivasi kepada Wajib Pajak agar taat pajak. Lingkungan terkait dengan *Control Beliefs*, lingkungan yang baik adalah lingkungan yang dimana lingkungan tersebut taat kepada pajaknya sedangkan jika lingkungan tidak baik maka akan menimbulkan ketidakpatuhan kepada perpajakan.

### **2.2.3 Control Beliefs**

Faktor yang terakhir ini merupakan keberadaan suatu hal yang dapat mendukung dan menghambat perilaku dalam keyakinan individu yang akan ditampilkan kepada orang lain dan persepsi oleh individu itu sendiri terhadap seberapa kuat suatu hal yang dapat mendukung dan menghambat perilaku individu.

Ketiga faktor tersebut yang menentukan seseorang untuk berperilaku, setelah wajib pajak terdapat 3 faktor tersebut, maka Wajib Pajak masuk ketahap *Intention* kemudian tahap *Behavior*. Tahap *Intention* merupakan tahap dimana seseorang memiliki niat untuk berperilaku sedangkan *Behavior* adalah tahap seseorang berperilaku. Religiusitas, sosial ekonomi, dan *Love of Money* dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku Wajib Pajak, oleh karena itu Wajib Pajak akan memiliki niat untuk membayar pajaknya dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

### **2.3 Religiusitas**

Menurut *Mc Daniel* dan *Burnett* (1990), *religiusitas* adalah sebuah kepercayaan kepada Tuhan dengan berkomitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Tuhan. *Religiusitas* merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku yang buruk (*Basri*, 2015).

*Religiusitas* dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terintegrasi dari keyakinan, gaya hidup,

aktivitas, ritual dan institusi yang memberikan makna dalam mengarahkan manusia pada nilai-nilai yang suci (*Glock dan Strak*, 1965).

*Religiusitas* memiliki dua dimensi yang berbeda, yaitu *religiusitas* ekstrinsik dan *religiusitas* intrinsik. *Religiusitas* ekstrinsik mengacu pada motivasi seseorang dalam beragama dan mencerminkan motivasi seseorang untuk persetujuan sosial. Sedangkan, *religiusitas* intrinsik mengacu pada motivasi yang didasarkan pada inheren dan tradisi keagamaan itu sendiri. *Religiusitas* intrinsik menunjukkan adanya komitmen dan keterlibatan untuk tujuan rohani yang lebih melekat dalam berkomitmen dengan prinsip agama.

*Glock dan Strak* merumuskan *religiusitas* sebagai komitmen yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan dengan agama atau keyakinan yang dianut.

### **2.4 Sosial Ekonomi**

Sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur masyarakat. Pemberian posisi ini disertai pula seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembawa status. Tingkat sosial ekonomi merupakan faktor non ekonomis seperti budaya, pendidikan umur dan jenis kelamin.

Sedangkan, tingkat ekonomi spesifik yaitu pendapatan, jenis pekerjaan, pendidikan dan investasi. Penjelasan sosial dan ekonomi biasa menjadi objek pembahasan yang berbeda. Dalam konsep sosiologi manusia biasa disebut dengan makhluk sosial yang mempunyai arti manusia tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain, sehingga arti sosial biasa diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan ekonomi berasal dari bahasa Yunani yakni *oikos* yang artinya keluar dan atau rumah tangga dan *nomos* artinya peraturan.

Menurut *Soekanto* (2012) mengemukakan bahwa sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam

masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya dan hak-hak serta kewajiban dalam hubungan dengan sumber daya.

## 2.5 *Love of Money*

Uang merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut *Rubenstein* di Amerika Serikat, keberhasilan diukur dengan uang dan pendapatan. Meskipun uang tersebut digunakan secara universal makna dan pentingnya uang tidak diterima secara universal. *Herzberg* mengatakan bahwa uang adalah motivator kebanyakan orang.

Karena pentingnya uang dan interpretasi yang berbeda, *Tang* (2002) memperkenalkan konsep cinta uang untuk literatur psikologi. Konsep ini berusaha mengukur perasaan subjektif seseorang terhadap uang, pengertian seseorang terhadap uang, serta keinginan dan apresiasi seseorang terhadap uang.

*Love of Money* juga diartikan sebagai level kecintaan seseorang terhadap uang, bagaimana mereka menganggap pentingnya uang bagi kehidupan mereka. Sikap terhadap uang dipelajari melalui proses sosialisasi yang didirikan pada masa kanak-kanak dan dipelihara dalam kehidupan dewasa.

*Tang dan Chiu* (2003) menyatakan bahwa orang-orang dengan orientasi *Love of Money* yang tinggi memiliki kepuasan rendah dengan gaji. Mereka juga menyebut bahwa konsep *Love of Money* sangat terkait dengan ketamakan dan akar dari kejahatan. *Basri* (2015) menjelaskan bahwa orang-orang dengan perilaku cinta uang atau *Money Ethics* yang tinggi akan menempatkan kepentingan yang besar pada uang akan kurang etis dan sensitif daripada orang dengan *Money Ethics* rendah.

## 2.6 Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Persepsi etika mempunyai beragam makna yang berbeda, salah satu maknanya adalah prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok. Seperti penggunaan istilah etika profesional, yaitu mengacu pada aturan-aturan dalam lingkup dimana

orang per orang menjalani kehidupan pribadinya. Selain itu, kita menggunakan istilah akuntansi ketika mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur tindakan profesional akuntan.

Untuk makna yang kedua, Persepsi etika adalah kajian moralitas. Hal ini berarti etika berkaitan dengan moralitas. Meskipun berkaitan etika tidak sama persis dengan moralitas. Persepsi etika adalah semacam penelaahan (baik aktivitas penelaahan maupun hasil-hasil penelaahan itu sendiri), sedangkan moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat (*Suminarsasi*, 2011).

*Mardiasmo* (2016) mendefinisikan penggelapan pajak merupakan usaha yang dilakukan Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang. Dikarenakan melanggar Undang-Undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Wajib Pajak melakukan berbagai cara menghindari kewajibannya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Penghindaran pajak dengan melanggar dan menentang peraturan Undang-Undang yang berlaku disebut *Tax Evasion*. Tindakan ini dapat merugikan negara, dan pelakunya akan dikenakan sanksi administrasi ataupun pidana sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ditetapkan. Sedangkan upaya dalam meminimalisirkan beban pajak sepanjang masih menggunakan peraturan yang berlaku diperbolehkan dengan penanganan dan pengolahan yang baik disebut *Tax Avoidence*.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Selain menggunakan teori sebagai landasan di dalam penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus peneliti yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu.

Dewi Sofha (2018) meneliti pengaruh keterkaitan religiusitas, gender, Lom, dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. Hasil pengujian membuktikan bahwa pengaruh antara gender terhadap persepsi etika penggelapan pajak dan terdapat pengaruh antara religiusitas terhadap persepsi etika penggelapan pajak, namun tidak terdapat pengaruh LoM terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Selain itu, religiusitas tidak memediasi pengaruh antara gender dengan persepsi etika penggelapan pajak begitu juga LoM tidak memediasi pengaruh antara gender dengan persepsi etika penggelapan pajak.

A.A. Gde Ari Widhiasmata Pelayan (2018) meneliti Pengaruh Religiusitas, Status Sosial Ekonomi dan Love of Money pada Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi dengan tingkat religiusitas dan *love of Money* yang tinggi akan memiliki persepsi etis yang tinggi dan mahasiswa akuntansi dengan status sosial yang tinggi akan memiliki persepsi etis yang rendah.

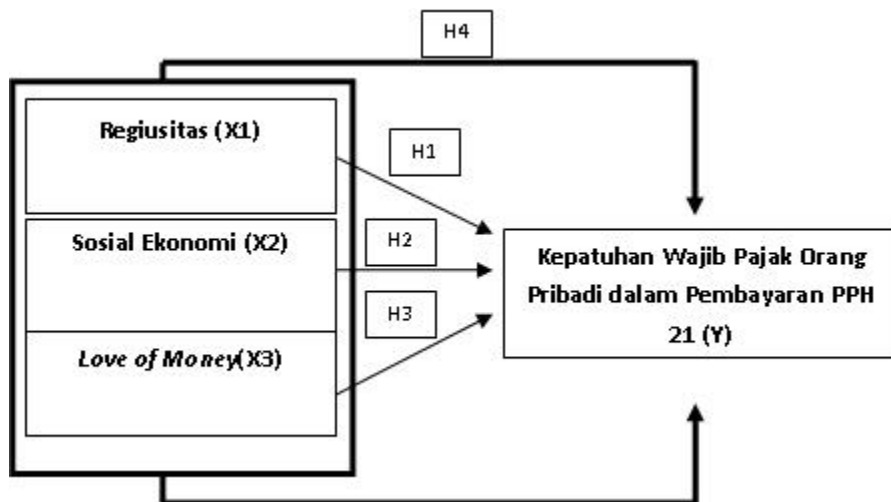
Firdausia, Oktaviana (2016) meneliti Pengaruh *Love of Money*, Religiusitas Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi di Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel gender tidak berpengaruh terhadap *Love of Money*, religiusitas dan persepsi etis mahasiswa akuntansi,

variabel *Love of Money* dan religiusitas berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi. Semakin tinggi *Love of Money* mahasiswa maka akan semakin rendah tingkat persepsi etis mereka. Semakin tinggi tingkat religiusitas mahasiswa maka akan semakin tinggi pula tingkat persepsi etis mereka.

Annisa Zenhy Wankhar (2018) meneliti pengaruh *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion* dengan *religiosity*, *gender*, *materialism* sebagai variabel moderating. Hasil penelitian tersebut adalah *Money Ethics* dan *Tax Evasion* berpengaruh signifikan secara simultan. Interaksi *Money Ethics* dengan *Intrinsic Religiosity* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Evasion*. Interaksi *Money Ethics* dengan *Extrinsic Religiosity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Evasion*. Interaksi *Money Ethics* dengan *Gender* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Tax Evasion*. Sedangkan interaksi *Money Ethics* dengan *Materialism* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Evasion*.

## 2.8 Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa konsep teori dan beberapa penelitian terdahulu, dimana Religiusitas, Sosial Ekonomi dan Sikap *Love of Money* berpengaruh dalam Etika Penggelapan Pajak.

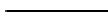


Sumber: Penulis, 2018

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Simultan = 

Parsial = 

Kerangka pemikiran yang terlihat pada gambar 1. menunjukkan hubungan variabel bahwa variabel bebas (X) yaitu religiusitas, sosial ekonomi dan sikap *Love of Money*, sedangkan variabel terikat (Y) yaitu persepsi etika menggelapan pajak (studi empiris UMKM yang terdaftar di KPP Ilir Barat Palembang).

Dimana variabel religiusitas berhubungan apakah dengan tingkat religius seseorang berpengaruh terhadap etika menggelapan pajak, variabel sosial ekonomi berpengaruh apakah dengan tingkat pendidikan dan penghasilan yang tinggi dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam persepsi mereka mengenai etika menggelapan pajak serta *Love of Money* atau kecintaan uang yang berlebihan seseorang mempengaruhi pola pikir mereka tentang persepsi etika menggelapan pajak.

Variabel tersebut memastikan apakah gender, religiusitas, sosial ekonomi dan *Love of Money* telah memenuhi persepsi etika menggelapan pajak sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai etika menggelapan pajak dan dapat juga mengukur sejauhmana pemahaman Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak sehingga tingkat pemahaman bagi Wajib Pajak UMKM dapat berpengaruh yang signifikan.

## 2.9 Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Religiusitas terhadap persepsi etika menggelapan pajak Wajib Pajak UMKM di KPP Palembang Ilir Barat.

H2: Sosial ekonomi berpengaruh terhadap persepsi etika menggelapan pajak Wajib Pajak UMKM di KPP Palembang Ilir Barat.

H3: *Love of Money* berpengaruh terhadap etika

penggelapan pajak Wajib Pajak UMKM di KPP Palembang Ilir Barat.

H4: Religiusitas, Sosial Ekonomi, *Love of Money* berpengaruh terhadap etika menggelapan pajak Wajib Pajak UMKM di KPP Palembang Ilir Barat.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data tersebut dapat diperoleh baik secara langsung (data primer) maupun tidak langsung (data sekunder) yang berhubungan dengan objek penelitian.

Menurut Sanusi (2011), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah berupa data Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Tahun 2018.

### 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016).

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat pada tahun 2017 sejumlah 4.621 orang

Selama tahun 2015 hingga 2017, Wajib Pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat semakin bertambah . hingga di tahun 2017 Wajib pajak yang terdaftar telah mencapai 4.621 dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.**

Jumlah UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah
2015	3.074
2016	4.001
2017	4.621

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2018

Teknik *sampling* dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dari peneliti yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam populasi (Nazir, 2011).

Dalam penelitian ini ada 4.621 jumlah Wajib Pajak UMKM orang pribadi/badan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Berdasarkan data diatas, maka sampel untuk penelitian ini dapat diketahui dengan menggunakan rumus slovin sebesar 10% dengan perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$N = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

**Tabel 3.** Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Ukuran
Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y).	Persepsi etika penggelapan pajak adalah tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok dalam memaknai mengenai penggelapan pajak.	1. Independensi 2. Integritas 3. Profesionalisme 4. Kejujuran 5. Keadilan	Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y).
Religiusitas (X2).	Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut seseorang. Semua agama memiliki tujuan yang sama yaitu mengontrol perilaku baik dan menghambat perilaku buruk.	1. TanggungJawab agama 2. Keyakinan 3. Perenungan • Rasa dosa 4. Dorongan dosa	Religiusitas (X2).
Sosial Ekonomi (X3)	Sosial Ekonomi adalah suatu keadaan yang menentukan posisi seseorang dalam lingkungan masyarakat.	1. Pendidikan a. Penghasilan 2. Jenis Usaha	Sosial Ekonomi (X3)
Sikap Love of Money (X4)	Love of money merupakan sikap mencintai uang yang	Money ethics scales (MES) yang mengukur sikap etis	Sikap Love of Money (X4)

$$n = \frac{4.621}{1 + (4621 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{4621}{47,21}$$

$$n = 97,88$$

Dimana: n = Ukuran Sampel  
N = Ukuran Populasi

e = Tingkat kesalahan dalam memilih anggota sampel yang diteliti (Tingkat kesalahan yang diambil dalam *sampling* ini adalah sebesar 10%)

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 98 dari 4.621 Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

### 3.3 Definisi Variabel Operasional

Dalam Operasional Variabel, indikator pengukuran penelitian ini adalah Religiusitas, Sosial Ekonomi, *Love of Money* dan etika penggelapan pajak. Definisi operasional variabel dependen dan independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.** Operasionalisasi Variabel Penelitian Lanjutan

	berlebihan. Seseorang yang meletakkan kepentingan yang tinggi terhadap uang berarti memiliki <i>money ethics</i> tinggi.	seseorang terhadap penilaian akan uang terdiri dari 6 faktor, yaitu : 1. Baik 2. Kejahatan 3. Prestasi a. Harga diri b. Uang 4. Kekuatan atau kebebasan	
Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y).	Persepsi etika penggelapan pajak adalah tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok dalam memaknai mengenai penggelapan pajak.	1. Independensi a. Integritas b. Profesionalisme c. Kejujuran d. Keadilan	Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y).

Sumber: Penulis, 2018 diolah

### 3.4 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013), penelitian ini termasuk penelitian asosiatif (hubungan) yaitu penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan yang paling tinggi bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif. Melalui penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Penelitian ini digolongkan kedalam hubungan kausal yaitu terdapat variabel independen. Peneliti menggunakan penelitian asosiatif karena peneliti ingin mengetahui hubungan keterkaitan Religiusitas, Sosial Ekonomi dan Sikap *Love of Money* dalam Etika Penggelapan Pajak di KPP Palembang Ilir Barat Tahun 2018.

### 3.5 Model Persamaan

Untuk menguji hipotesis yang telah dikembangkan, maka penelitian ini akan menggunakan analisis regresi berganda yang bertujuan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor*

dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Rumus linear berganda ditunjukkan oleh persamaan:

$$Y = \beta + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + e \dots \dots$$

Dimana:

- Y = Etika Penggelapan Pajak
- $\beta_0$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2 \dots \dots$  = Koefisien Regresi
- X1 = Religiusitas
- X2 = Sosial Ekonomi
- X3 = Sikap *Love of Money*
- e = variabel residual (tingkat *error*)

### 3.6 Uji Asumsi Klasik

#### 3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dan grafik dengan melihat histogram dari residualnya.

Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan data berdistribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

### **3.6.2 Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel independen. Ada tidaknya multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai matriks korelasi (*correlation matrix*) dari semua variabel adalah kurang dari 0,8.

### **3.6.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas. Apabila varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola residual dari hasil estimasi regresi. Jika residual bergerak konstan maka tidak ada heteroskedastisitas. Akan tetapi, jika residual membentuk suatu pola tertentu, maka hal tersebut mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

## **3.7 Pengujian Hipotesis**

### **3.7.1 Uji F**

Uji F digunakan untuk mengetahui bahwa variabel independen (Religiusitas, Sosial, Ekonomi dan Sikap *Love of Money*) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

variabel dependen (Etika Penggelapan Pajak) di KPP Palembang Ilir Barat Tahun 2018. Uji statistik dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

$H_a$  : Religiusitas, Sosial Ekonomi, *Love of Money* tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

a) Dasar pengambilan keputusan:

Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

b) Berdasarkan nilai probabilitasnya (signifikansi) dasar pengambilan keputusannya adalah:

Jika probabilitas  $> 0,10$  maka  $H_0$  diterima

Jika probabilitas  $< 0,10$  maka  $H_0$  ditolak

### **3.7.2 Uji t**

Uji t digunakan untuk mengetahui bahwa variabel independen (Religiusitas, Sosial, Ekonomi dan Sikap *Love of Money*) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Etika Penggelapan Pajak) di KPP Palembang Ilir Barat Tahun 2018.

Uji statistik dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

$H_1$  : Pengaruh Religiusitas terhadap persepsi etika menggelapan pajak

$H_2$  : Pengaruh Sosial Ekonomi berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak

$H_3$  : Pengaruh *Love of Money* berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

$H_4$  : Pengaruh Religiusitas, Sosial Ekonomi, *Love of Money* berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

a) Dasar pengambilan keputusan:

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima

Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

- b) Berdasarkan nilai probabilitasnya (signifikansi) dasar pengambilan keputusannya adalah:

Jika probabilitas  $> 0,10$  maka  $H_0$  diterima

Jika probabilitas  $< 0,10$  maka  $H_0$  ditolak

### 3.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) ini menunjukkan kemampuan garis regresi yang menerangkan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai (R<sup>2</sup>) atau (R<sup>2</sup> adjusted) berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka semakin baik. (Ajija dkk, 2011).

Dalam penelitian ini koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) atau (R<sup>2</sup> adjusted) berguna untuk mengukur seberapa besar peranan variabel Pengaruh Religiusitas, Sosial Ekonomi, *Love of Money* menjelaskan perubahan yang terjadi pada etika penggelapan pajak.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *Jarque Bera (JB Test)*. Bila nilai *Jarque Bera* lebih kecil dari *Chi Square Tabel* maka data dikatakan berdistribusi normal. Berikut tabel hasil uji normalitas sebagai berikut:

**Tabel 4.** Hasil Uji Normalitas

	N Statistic	Skewness Statistic	Kurtosis Statistic
Res	100	0,204	0,475

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23, 2018

Pada penelitian ini nilai toleransi yang digunakan yaitu 5%. Untuk melihat tabel *Chi Square*  $df = n - \text{banyaknya variabel}$ . Untuk persamaan  $df = 100 - 3 = 97$ , maka nilai tabel *Chi Square* sebesar 119,87 sehingga data berdistribusi normal.

### 4.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*, dimana jika korelasi uji *Glejser* antara masing-masing variabel independen dengan residualnya mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 5%, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

**Tabel 5.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig
Religiusitas (X1)	0,183
Sosial Ekonomi (X2)	0,220
<i>Love of Money</i> (X3)	0,347

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23, 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil dari uji heterokedastisitas. Jika semua nilainya signifikan  $> 0,05$  maka tidak terdapat heterokedastisitas. Hasil dari tabel diatas menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05 maka keempat variabel tersebut tidak terjadi heterokedastisitas.

### 4.1.3 Uji Multikolinieritas

Untuk melihat uji multikolinieritas dapat digunakan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Value Inflation Factor (VIF)*, jika nilai VIF  $> 10$  maka terjadi multikolinieritas. Sebaliknya jika VIF  $< 10$  maka tidak terjadi multikolinieritas.

**Tabel 6.** Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Tolerance	Statistic VIF
Religiusitas	0,833	1,200
Sosial Ekonomi	0,975	1,026
<i>Love of Money</i>	0,841	1,189

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 23, 2018

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut tidak terjadi Multikolinieritas karena nilai *Collinearity Statistic*

Religiusitas, Sosial Ekonomi, dan *Love of Money* terdapat nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10,00.

#### 4.1.4 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis, dilakukan uji-F dan uji-t guna mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan maupun secara parsial. Hasil uji simultan menggunakan uji-

F menyatakan bahwa keseluruhan variabel independen yang terdiri dari Religiusitas, Sosial, Ekonomi dan Sikap *Love of Money* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

Namun secara parsial, Religiusitas, Sosial, Ekonomi dan Sikap *Love of Money* terbukti juga berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	3,527	1,164		3,029	0,003
Religiusitas (X1)	0,470	0,048	0,678	9,876	0,000
Sosial Ekonomi (X2)	-0,114	0,049	-0,148	2,335	0,022
<i>Love of Money</i> (X3)	0,088	0,037	0,163	2,389	0,019

Sumber: Data diolah penulis, 2018

Dari tabel di atas juga dapat dibentuk model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,527 + 0,470 X1 + 0,114 X2 + 0,088 X3 + e$$

Pada persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta adalah 3,527 dapat diartikan jika Religiusitas, Sosial Ekonomi dan *Love of Money* bernilai nol, maka besarnya Persepsi Etika Penggelapan Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 3,527 satuan (karena nilai konstanta uji regresi linier berganda positif). Koefisien regresi pada variabel Religiusitas (X1) sebesar 0,470 dimana setiap peningkatan Religiusitas sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan persepsi etika penggelapan pajak sebesar 0,470.

Variabel Sosial Ekonomi (X2) sebesar 0,114 dimana setiap peningkatan Sosial Ekonomi sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan persepsi etika penggelapan pajak sebesar 0,114. variabel *Love of Money* (X3) sebesar 0,088 dimana setiap peningkatan

*Love of Money* sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan persepsi etika penggelapan pajak sebesar 0,088 satu satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

#### 4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Religiusitas adalah sebesar 9,876 sedangkan nilai t tabel dengan probabilitas sebesar 0,05 (5%) adalah sebesar 1,984, maka dapat disimpulkan bahwa Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Hal ini berarti Wajib Pajak UMKM menganggap bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan kepada agamanya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Sebaliknya semakin rendah tingkat kepercayaan kepada agamanya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis. Agama dipercaya dapat mengawasi

perilaku seseorang, karena semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang mengenai Religiusitas, maka ia dapat mengontrol perilakunya seperti menghindari penggelapan pajak.

Sesuai dengan teori Motivasi menjelaskan bahwa terdapat suatu dorongan atau alasan bagi seseorang untuk melakukan dan menyelesaikan sesuatu (*Frederickson, Miller dan Cline, 2008*). Motivasi yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai suatu gambaran mengenai sikap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, dimana seseorang memiliki niat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan menentukan apakah suatu dorongan yang diberikan kepada Wajib Pajak dapat terealisasi dengan baik sebagai suatu keputusan yang diambil nantinya.

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Sosial Ekonomi (X3) adalah sebesar 2,335 sedangkan nilai t tabel dengan probabilitas sebesar 0,05 (5%) adalah sebesar 1,984, maka dapat disimpulkan bahwa Sosial Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat sosial yang dimiliki Wajib Pajak UMKM membuat mereka semakin sadar akan perilaku yang etis. Sesuai dengan teori *Teori of Planned Behavior (TPB)*, tingkat pendidikan yang disandang, pekerjaan yang dimiliki, serta penghasilan yang didapat tidak sepenuhnya membuat seseorang bersikap konsumtif dan mementingkan kepentingan pribadi saja, dengan status sosial yang tinggi tidak mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak etis, semua bisa tergantung dari lingkungan tempat mereka bersosialisasi.

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *Love of Money* (X4) adalah sebesar 2,389 sedangkan nilai t tabel dengan probabilitas sebesar 0,05 (5%) adalah sebesar 1,984, maka dapat disimpulkan bahwa *Love of Money* berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Ini berarti semakin tinggi sifat *Love of Money* atau cinta uang Wajib Pajak UMKM maka persepsi terhadap etika penggelapan pajak juga makin tinggi.

Sanksi hukum dan sosial akan mengakibatkan seseorang enggan untuk berperilaku tidak etis. Seseorang dengan kecintaan terhadap uang akan memiliki motivasi bekerja yang giat dan baik sehingga dihormati dan menjadi tolok ukur keberhasilan di lingkungannya, *Love of Money* akan memacu karir seseorang karena adanya apresiasi baik berupa uang ataupun kekuasaan bagi mereka yang bekerja dengan baik dan berperilaku etis.

Sesuai dengan teori *Teori of Planned Behavior (TPB)* yang menjelaskan bahwa salah satu asal pembentuk perilaku adalah adanya niat seseorang untuk berperilaku, niat yang timbul dari dalam diri seseorang baik atau buruk akan mempengaruhi seseorang tersebut untuk melakukan perbuatan yang tidak etis dan teori motivasi yang menjelaskan bahwa suatu dorongan atau adanya alasan seseorang dalam niat tertentu akan memotivasi seseorang tersebut untuk melakukan tindakan yang cenderung kurang etis.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya maka didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak, hal ini menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan kepada agama yang tinggi akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak etis, Agama dipercaya dapat mengawasi perilaku seseorang, karena semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang mengenai Religiusitas, maka ia dapat mengontrol perilakunya seperti menghindari penggelapan pajak.
2. Sosial Ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak, hal ini membuktikan bahwa status ekonomi yang disandang baik ekonomi tinggi maupun rendah tidak berpengaruh untuk membuat

seseorang melakukan tindakan kurang etis. Semua bisa terjadi karena adanya niat dan faktor pendukung yang membuat seseorang melakukan tindakan kurang etis seperti melakukan tindakan penggelapan pajak.

3. *Love of money* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak, hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi sifat *Love of Money* seseorang maka etika penggelapan pajak juga semakin tinggi. Adanya dorongan atau alasan seseorang dalam niat tertentu akan memotivasi seseorang tersebut untuk melakukan tindakan yang cenderung kurang etis.

## 5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan di sini adalah:

1. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Barat, prosedur dalam pelaksanaan pengawasan harus menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu pihak fiskus dapat memberikan sosialisasi perpajakan bagi Wajib Pajak agar dalam pelaksanaannya mampu dan secara efektif dapat mendeteksi upaya penggelapan pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis, disarankan untuk menambah faktor-faktor lain diluar ruang lingkup penelitian ini sehingga lebih dapat dijadikan sebagai dasar penilaian lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ajija, Shochrul R, dkk. 2011, *Cara Cerdas Menguasai Eviews*, Salemba Empat, Jakarta.
- [2] Ajzen. 2005, *The Theory of Planned Behavior, In: Organizational Behavior and Human Decision Process*, Amherst, MA: Elseive.
- [3] Basri, Yessi Mutia. 2015, *Efek Moderasi Religiusitas dan Gender Terhadap Hubungan Etika Uang (Money Ethics) dan Kecurangan*

*Pajak (Tax Evasion)*, SNA XVII Mataram, Lombok.

- [4] Dewi Sofha, 2018, *Pengaruh Keterkaitan Religiusitas, Gender, Lom, dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak*, Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT) Volume 9 Nomor 2, FEB Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- [5] Frederickson, N., Miller, A. & Cline, T. 2008, *Topics in Applied Psychology: Educational Psychology*, Hodder Arnold, London.
- [6] Glock dan Strak. 1965, *Religion and Society in Tension*, Rand McNally, Chicago.
- [7] Hasibuan, Malayu S.P. 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara*, Jakarta.
- [8] Kementerian Negara Badan Usaha. 2009, *Dua Direksi Waskita Dicopot*, Diakses dari: <https://www.liputan6.com>, Jakarta.
- [9] Lau, Choe, & Tan. 2013, *The Moderating Effect of The Religiosity Between Money Ethics and Tax Evasion, Auditing and Taxation*.
- [10] McDaniel, S. W., & Burnett, J. J. 1990, *Consumer Religiosity and Retail Store Evaluative Criteria, Journal of The Academy of Marketing Science*, A&M University College Station, Texas, USA.
- [11] Mardiasmo. 2016, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- [12] Nazir, Mohammad. 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta.
- [13] Oktaviana, Firdausia. 2016, *Pengaruh Love of Money, Religiusitas Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi di Kota Malang*, Universitas Islam Malang, Malang.
- [14] Pemayun, Widhiasmana. 2018, *Pengaruh Religiusitas, Status Sosial Ekonomi dan Love*

- of Money pada Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi*. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 23, No.2, Mei (2018): 1600-1628, Denpasar, Bali.
- [15] Sipayung, Cahyowati. 2015, *Analisis Pengaruh Aspek Demografi, Status Sosial Ekonomi dan Pengalaman Kerja Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi dengan Love of Money Sebagai Variabel Intervening*, Diponegoro Journal of Accounting, Volume 4, Nomor 2, Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id>.
- [16] Tang, T. L. P. 2002. *Is The Love of Money The Root of All Evil? or Different Strokes for Different Folks: Lessons in 12 Countries, Paper Presented to The International Conference on Business Ethics in The Knowledge Economy*, Hongkong, China.
- [17] Tang, T. L. P., & Chiu, R. K, 2003, *Income, Money Ethics, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: is The Love of Money The Root of Evil for Hongkong Employees? Journal of Business Ethics*, 46.13-30, Hongkong, China.
- [18] Ratnaning, Asih. 2018, *Didenda Lebih dari Rp 1 Triliun, Fan Bingbing Pasrah*, Diakses dari: <https://www.liputan6.com>, Jakarta.
- [19] Sandmo, A. 2005, *The Theory of Tax Evasion: A Retrospective View. National Tax Journal*, 58(4), 643-663, Michigan State University, USA
- [20] Sanusi, Anwar. 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Erlangga, Jakarta.
- [21] Soekanto, Soerjono. 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- [22] Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011, *“Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak,” Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.*
- [23] Sugiyono. 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- [24] Wankhar, Annisa. 2018, *Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion dengan Religiosity, Gender, Materialism Sebagai Variabel Moderating*, Jurnal Riset Akuntansi, Vol 7, No 05, Universitas Islam Malang, Malang.

## Hubungan Kualifikasi Standar Kerja Dengan Penempatan Pegawai Pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pringsewu

Yoeyong Rahsel<sup>1</sup>, Wulandari<sup>2</sup>

STMIK PRINGSEWU

yrahsel@gmail.com, seankoko008@gmail.com

**Abstract:** Human resources factor plays crucial role in achieving the goal of an organization or institution that is more effective and efficient through the placement of employees in accordance with their respective competencies and abilities, thus an accurate decision from a manager or the leader of an agency or organization is needed in determining policies to establish working standard qualification that is able to support the placement of employees in the institution or organization the leader leads. This research was conducted to reveal the relation between working standard qualification and the placement of employees at the Pringsewu Regency Tourism Office (Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pringsewu). The problem of this research is the extent of the relation between working standard qualification and the placement of employees. Working standard qualification (variable x) is measured through some indicators, they are education, work experience, age, health, skills/expertise and personality. Whereas the placement of employees (variable y) is measured through indicators such as job analysis, the accuracy of selection, suitability of ability, discipline, and placement procedure. The method used in this research is descriptive analysis method. As for the population in this research, there are 74 people with the sample of 40 people. The data gathering techniques used are observation, interview, questionnaire, literature studies and documentation studies. Furthermore, the data analysis technique used in this research is Spearman's Rank Correlation with the use of SPSS. Based on the results of the analysis, it is known that the relation between working standard qualification and the placement of employees obtained a correlation coefficient of 0,5591 and the results of correlation coefficient's significance test obtain  $T_{count}$  of 4,16 and  $T_{table}$  of 1,68, therefore it can be concluded that there is a positive relation between working standard qualification and the placement of employees. Consequently, the hypothesis of this research is acceptable. Whilst the suggestions of this research are, it is needed to improve working standard qualification in the placement of employees, it is needed to be improved in terms of accuracy and tidiness of work with regular supervision, it is needed to eliminate the notion that working is a burden, it is needed to improve the lack of discipline and it is needed to raise working condition that is more family-like for the smooth communication and execution of work.

**Keywords:** working standard qualification, the placement of employees, Spearman's rank correlation.

**Abstrak:** Faktor sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan instansi atau lembaga suatu organisasi yang lebih efektif dan efisien melalui penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya masing-masing, sehingga diperlukan suatu keputusan yang tepat dari seorang manajer atau pemimpin instansi atau lembaga organisasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk menetapkan kualifikasi standar kerja yang dapat menunjang terhadap penempatan pegawai dalam instansi atau lembaga organisasi yang dipimpinnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap hubungan kualifikasi standar kerja dengan penempatan pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pringsewu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauhmana hubungan antara kualifikasi standar kerja dan penempatan pegawai. Kualifikasi Standar Kerja (variabel X) diukur melalui indikator pendidikan, pengalaman kerja, umur, kesehatan, keterampilan/keahlian, dan kepribadian. Sedangkan Penempatan Pegawai (variabel Y) diukur melalui indikator analisa pekerjaan, ketepatan seleksi, kesesuaian kemampuan, kedisiplinan, prosedur penempatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 74 orang dengan sampel penelitian sebanyak



40 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan Korelasi Rank Spearman dengan bantuan SPSS. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa hubungan kualifikasi standar kerja dan penempatan pegawai diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,5591 dan hasil uji signifikansi koefisien korelasi diperoleh  $T_{hitung}$  sebesar 4,16 dan  $T_{tabel}$  sebesar 1,68, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara kualifikasi standar kerja dengan penempatan pegawai. Dengan demikian hipotesis penelitian ini dapat diterima. Sedangkan saran hasil penelitian ini adalah perlunya meningkatkan kualifikasi standar kerja dalam penempatan pegawai, perlunya peningkatan dalam hal ketelitian dan kerapihan kerja dengan pengawasan yang berkala, perlu dihilangkannya anggapan bahwa pekerjaan merupakan beban, peningkatan disiplin yang masih kurang serta perlunya ditingkatkan kondisi kerja yang lebih kekeluargaan demi kelancaran komunikasi dan pelaksanaan pekerjaan.

**Kata kunci:** kualifikasi standar kerja, penempatan pegawai, korelasi rank spearman.

## 1. PENDAHULUAN

Pada era reformasi saat ini dan untuk menyongsong era perdagangan bebas, faktor sumber daya manusia menjadi prioritas utama, pengembangan sumber daya manusia sedang ramai digalakkan dengan tujuan meningkatkan profesionalitas manusia Indonesia. Selain itu sumber daya manusia merupakan penentu dalam keberhasilan suatu instansi atau lembaga. Begitu pentingnya faktor manusia bagi suatu instansi atau lembaga maka untuk memperoleh sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan maka diperlukan perencanaan sumber daya manusia yang baik, seperti dikemukakan oleh SP Siagian yang dikutip oleh Faustino Gomes (1999:83) bahwa: “Perencanaan SDM adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat, kesemuanya itu dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sarana yang telah ditetapkan”

Merencanakan sumber daya manusia perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya seperti faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal. Faktor eksternal akan datang dari luar organisasi seperti kemajuan teknologi, sosial budaya, politik dan ekonomi. Sedangkan faktor-faktor internal akan datang dari dalam organisasi seperti tujuan organisasi, anggaran pendapatan dan biaya, kegiatan organisasi dan lain-lain. Maka dengan

memperhatikan faktor-faktor tersebut perlu kiranya pihak manajerial untuk dapat mencari cara agar memperoleh pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi yang dipimpinya.

Menyadari betapa pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi maka dibutuhkan pegawai yang sesuai dengan kualifikasi standar kerja sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan kebijakan dalam menempatkan pegawai dalam suatu instansi atau lembaga organisasi manapun. Dari uraian di atas penulis ingin mengetahui hubungan antara kualifikasi standar kerja dengan penempatan pegawai, mengingat pada kantor dinas pariwisata kota Bandung penempatan pegawai belum memperhatikan kualifikasi standar kerja yang dimiliki oleh para pegawai, maka dengan latar belakang masalah tersebut penulis akan mengadakan penelitian dengan judul: “Hubungan Kualifikasi Standar Kerja dengan Penempatan Pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pringsewu”

## 2. LANDASAN TEORI

Landasan teoritis dimaksudkan untuk memberikan ketajaman pandangan terhadap permasalahan yang akan diteliti, yaitu dengan mengungkapkan berbagai teori dan konsep dengan menganalisisnya terhadap permasalahan yang akan diteliti. Sejalan dengan judul penelitian yaitu: “Hubungan Kualifikasi Standar Kerja dengan Penempatan Pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Kota Bandung”, maka landasan teoritisnya meliputi:

## **2.1 Konsep Kualifikasi Standar Kerja**

Pegawai yang mempunyai kualitas dan kompetensi yang tinggi itu dapat diperoleh dengan suatu standar kerja yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai. Dengan adanya kualifikasi standar kerja yang harus dipenuhi oleh pegawai diharapkan mampu menciptakan hasil kerja yang profesional dan berkualitas, selain itu terdapat kerjasama yang baik antara pegawai dan organisasi dalam usaha mencapai tujuan suatu instansi atau lembaga. Usaha untuk meningkatkan kualifikasi standar kerja harus terus menerus dilakukan dan ditingkatkan, sehingga dengan adanya usaha untuk meningkatkan kualifikasi standar kerja diharapkan setiap pegawai yang berada dalam suatu instansi atau lembaga organisasi mempunyai kesadaran diri untuk meningkatkan profesionalismenya masing-masing.

Berkaitan dengan kualitas yang harus ditingkatkan, Komaruddin mengemukakan bahwa: “ yang dimaksud dengan kualitas disini adalah sesuatu yang berkaitan dengan sifat-sifat fisik dari bahan-bahan yang dipergunakan dan oleh sebab itu kualitas tersebut pada hakekatnya berhubungan dengan kemampuan untuk dipergunakan “. (1994:253).

Antara penetapan kualifikasi standar kerja dengan kualitas kerja sangat erat kaitannya, karena yang dituntut untuk ditingkatkan oleh pegawai adalah profesionalitas dan kualitas kerjanya sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Pengertian kualifikasi menurut WJS Poerwadarminta mengemukakan bahwa “kualifikasi adalah syarat kecakapan untuk melakukan suatu pekerjaan atau menduduki suatu jabatan, dan sebagainya”. ( 1982: 545 ).

Jadi dengan menetapkan kualifikasi standar kerja diharapkan para pegawai dapat mempunyai kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Untuk menentukan kualifikasi standar kerja yang harus dipenuhi oleh pegawai, penulis akan memberikan beberapa pendapat terkait dengan kualifikasi yang harus dimiliki oleh pegawai dari para

ahli, antara lain: menurut Selamet Saksiono ( 1988: 55 ) bahwa: “yang menjadi karakteristik pekerja itu sekaligus juga merupakan suatu kualifikasi yang harus dimiliki oleh pegawai antara lain:

1. Tingkat pendidikan
2. Keadaan fisik
3. Pengetahuan dan kecakapan
4. Status perkawinan
5. Jenis kelamin
6. Usia
7. Keahlian

Menurut Moekijat (1988:69): “mengihtisarkan syarat-syarat dalam penentuan pekerjaan antara lain:

1. Kecakapan (keahlian)
2. Pengalaman usia
3. Jenis kelamin
4. Pendidikan dan latihan
5. Syarat-syarat khusus
6. Penampilan
7. Kecerdasan, inisiatif dan kejujuran
8. Bakat
9. Kematangan dan stabilitas perasaan
10. Sikap terhadap pekerjaan
11. Kepribadian

Dari pendapat di atas pada dasarnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi standar kerja bagi pegawai dalam suatu instansi atau lembaga organisasi yang jika dirangkum terdiri dari:

1. Pendidikan
2. Pengalaman kerja
3. Umur
4. Kesehatan
5. Keterampilan dan kesehatan
6. Kepribadian

Selanjutnya uraian dari keenam faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **2.1.1 Pendidikan**

Pendidikan merupakan syarat yang termasuk penting dan sangat mendasar, karena dengan pendidikan inilah kemungkinan manusia untuk berkembang lebih cepat dan maju menuju kearah yang

penyusunan dan pertimbangan. Dengan dasar pendidikan yang disyaratkan maka dalam pemberian tugas dan pekerjaan akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang dimiliki oleh pegawai agar tercipta relevansi antara ilmu yang dimilikinya dengan karakteristik pekerjaan yang menjadi tugasnya sehingga mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik, selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian dari pegawai yang bersangkutan.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Malayu SP Hasibuan bahwa: “ pendidikan merupakan suatu indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat mengerjakan atau menjabat suatu jabatan. Karena dengan latar belakang pendidikan ini dianggap seseorang akan mampu menjabat suatu jabatan tertentu”. (1997:61).

Dengan demikian pendidikan menduduki peranan yang sangat penting bagi manusia dalam membantu pekerjaannya dan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

### **2.1.2Pengalaman Kerja**

Yang dimaksud pengalaman kerja disini adalah lamanya seorang pegawai bekerja dalam bidang pekerjaannya yang menjadi tanggungjawabnya, semakin lama seseorang bekerja biasanya akan semakin banyak pengalaman yang ia dapatkan. Pengalaman kerja sudah barang tentu sudah dijadikan salah satu kriteria dalam mengisi jabatan-jabatan yang kosong, baik melalui mutasi maupun perekrutan pegawai baru.

Salah satu sisi penting dalam pengembangan instansi atau lembaga organisasi adalah kualitas pegawainya yang didalamnya terkandung pengalaman yang dimilikinya, dengan demikian untuk mengisi suatu pekerjaan harus benar-benar ada kesesuaian antar kebutuhan akan pegawai dengan kualifikasi yang dimiliki oleh pegawai. Pada akhirnya dari kesesuaian ini akan didapat hasil yang maksimal.

Pengalam kerja akan sangat berguna bagi pegawai dalam menjalankan aktivitas kerjanya sebab dari pengalaman kerja ini akan diperoleh gambaran

bagaimana menyelesaikan pekerjaan atau permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu sebaiknya pengalaman kerja juga digunakan sebagai kualifikasi standar kerja, yang juga sejalan dengan pendapat Malayu SP Hasibuan ( 1997:62 ) bahwa: “pengalaman kerja seorang pelamar hendaknya mendapat pertimbangan utama dalam proses seleksi karena orang yang berpengalaman merupakan calon pegawai yang telah siap pakai”.

### **2.1.3Umur**

Masalah batasan umur sebenarnya telah undang-undang yang mengaturnya sehingga untuk menetapkan kualifikasi standar kerja tentang faktor umur ini dengan cara menyesuaikan dengan undang-undang yang ada. Tetapi batasan umur berdasarkan undang-undang juga belum dijadikan patokan yang pasti. Hal ini sejalan dengan pendapat Malayu SP Hasibuan bahwa: “karyawan yang muda usianya umumnya fisiknya kuat, dinamis dan kreatif tetapi cepat bosan dan kurang bertanggungjawab serta cenderung absensi dan turnover-nya tinggi, pegawai yang umumnya lebih tua kondisi fisiknya kurang tetapi bekerja ulet, bertanggungjawab, absensi dan turnover-nya rendah”. ( 1997:60 )

Karena itu untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan yang dibutuhkan, maka perlu disesuaikan pula dengan jenis pekerjaannya, apakah menuntut fisik yang kuat atau membutuhkan keuletan dalam mengerjakannya.

### **2.1.4Kesehatan**

Kesehatan merupakan hal yang penting dalam menentukan pegawai yang akan diangkat. Hal ini didasarkan karena kesehatan dapat mempengaruhi fisik dari pegawai. Fisik yang sehat tentu akan menunjang terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dilimpahkan kepada pegawai, demikian sebaliknya jika seorang pegawai tidak sehat maka tugas yang diberikan kemungkinan tidak dapat dilaksanakan, bahkan mungkin akan merugikan suatu instansi atau lembaga organisasi karena harus menanggung biaya pengobatan pegawai yang sakit.

Maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai kualifikasi standar kerja yang harus dipenuhi oleh pegawai.

### **2.1.5 Keterampilan dan Keahlian**

Keterampilan dan keahlian diperoleh melalui pendidikan khusus, pelatihan atau pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai sudah tentu akan mempengaruhi kualitas kerja yang akan dihasilkannya. Biasanya keterampilan dan keahlian seseorang pegawai akan tinggi pada bidang kerjanya apabila ia sudah lama bekerja pada posisi tersebut. Jadi faktor waktu juga akan dapat mempengaruhi keterampilan dan keahlian seseorang.

Untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian kerja para pegawai, pihak instansi atau lembaga organisasi biasanya selalu melakukan usaha-usaha yang dapat menunjang seperti mengadakan program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan. Malayu SP Hasibuan berpendapat bahwa: “keahlian harus mendapat perhatian utama kualifikasi seleksi, karena hal ini akan dapat menentukan mampu tidaknya seseorang mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Keahlian ini mencakup teknikal skill, human skill, konseptual skill, dan kecakapan untuk memanfaatkan kesempatan serta kecermatan untuk mempergunakan peralatan yang dimiliki perusahaan dalam mencapai tujuan”. ( 1997:60 )

Jadi dengan menetapkan keterampilan dan keahlian sebagai kualifikasi standar kerja kiranya dapat menunjang terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **2.1.6 Kepribadian**

Kepribadian merupakan sifat pembawaan seseorang yang dibawanya sejak lahir. Kepribadian setiap orang akan berbeda-beda, tetapi sifat ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya faktor kebutuhan, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan

lain-lain, seperti yang dikemukakan oleh Malayu SP Hasibuan bahwa: “karakter atau kepribadian merupakan sifat pembawaan seseorang yang dapat diubah oleh lingkungan atau pendidikan”. ( 1997: 62 ).

Dalam lingkungan organisasi kepribadian seseorang akan berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi yang bersangkutan, karena pegawai yang akan melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan organisasi. Maka dalam kualifikasi standar kerja perlu dipenuhi syarat-syarat kepribadian yang baik sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan organisasi.

## **2.2 Konsep Penempatan Pegawai**

Penempatan pegawai merupakan langkah yang diambil setelah proses seleksi pegawai dilaksanakan. Proses penempatan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen kepegawaian, karena pegawai yang akan ditempatkan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dari segi jumlah maupun kualitas pegawainya. Proses penempatan pegawai haruslah direncanakan karena kesalahan dalam proses ini dapat menimbulkan dampak buruk terhadap pelaksanaan kegiatan instansi atau lembaga organisasi yang akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam melaksanakan penempatan pegawai perlu memperhatikan syarat-syarat penting yang dapat menunjang terhadap keberhasilan penempatan pegawai tersebut. Menurut Faustino C. Gomes syarat-syarat yang perlu diperhatikan adalah:

1. Informasi analisa jabatan yang memberikan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan dan standar-standar prestasi yang diisyaratkan setiap jabatan.
2. Perencanaan SDM yang memberikan informasi kepada manajer tentang tersedia atau tidaknya lowongan pekerjaan dalam organisasi.
3. Keberhasilan fungsi rekrutmen yang akan menjamin manajer bahwa tersedianya orang yang akan dipilih. (1999:118)

Selain syarat-syarat tersebut, langkah-langkah dan tanggungjawab proses penempatan juga harus diperhatikan. Menurut Faustino C. Gomes (1999:122) bahwa: “langkah-langkah proses staffing meliputi:

1. Menentukan kebutuhan-kebutuhan SDM.
2. Mengupayakan persetujuan anggaran untuk mengadakan dan atau mengisi jabatan-jabatan.
3. Mengembangkan kriteria seleksi yang valid.
4. Pengadaan (rekrutmen).
5. Mengadakan tes atau sebaliknya menscreening para pelamar.
6. Menyiapkan daftar dari pelamar yang berkualitas.
7. Mengadakan wawancara dan seleksi terhadap para pelamar yang paling berkualitas.

Dari hasil seleksi yang telah dilakukan oleh pihak manajer kepegawaian akan memperoleh informasi penting yang dapat digunakan untuk melakukan penempatan pegawai.

### 2.3 Hubungan Kualifikasi Standar Kerja dengan Penempatan Pegawai

Proses penempatan pegawai bukan merupakan suatu kegiatan yang tersendiri dalam proses pengadaan pegawai melainkan merupakan proses kegiatan yang menyeluruh dalam arti penempatan pegawai terhadap suatu bidang yang akan ditempatinya. Penetapan kualifikasi standar kerja besar manfaatnya bagi pelaksanaan perkembangan organisasi terutama bagi proses penempatan pegawai, karena penempatan pegawai harus sesuai dengan uraian pekerjaan (*job description*) dan posisi jabatan (*job position*).

Hal ini sejalan dengan pendapat Gunawan Jiwanto (1980:38) bahwa: “ penempatan pegawai merupakan proses mencocokkan atau membandingkan kualifikasi pegawai dengan kebutuhan atau persyaratan dari suatu jabatan atau pekerjaan”.

Penempatan pegawai merupakan aktivitas manajemen kepegawaian sebagai suatu proses pengambilan keputusan dimana seseorang akan

dipilih dan ditempatkan pada suatu kedudukan atau jabatan yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Mengingat penempatan pegawai besar pengaruhnya terhadap kegiatan dari suatu instansi atau lembaga organisasi maka untuk mendapatkan pegawai profesional dan berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan maka penempatan pegawai perlu direncanakan.

Pada proses perencanaan inilah dibutuhkan analisa pekerjaan dan analisa jabatan. Melalui analisa pekerjaan dan analisa jabatan dapat ditetapkan kualifikasi standar kerja yang harus dipenuhi oleh pegawai sehingga dapat membantu manajer personalia dalam mengadakan seleksi yang akan dilanjutkan dengan penempatan pegawai pada posisi yang tepat dan benar atau sesuai dengan prinsip *the right man in the right place and the right man behind the right job* dapat dilaksanakan serta dapat menunjang pencapaian tujuan suatu instansi atau lembaga organisasi.

### 3. METODE PENELITIAN

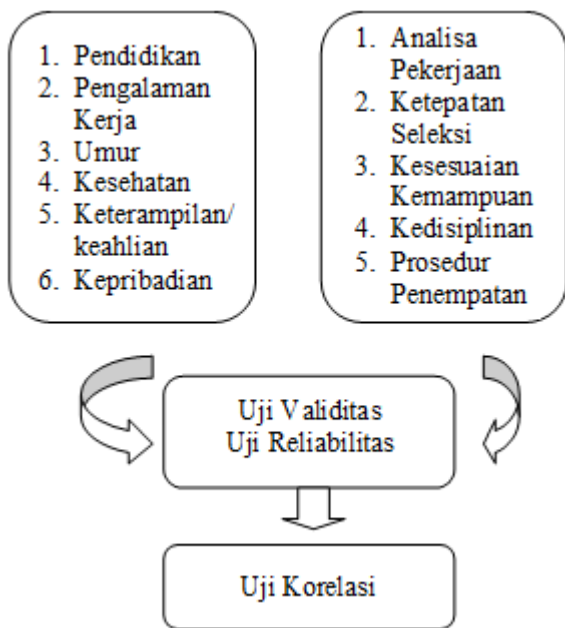
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu untuk melihat keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Dalam pelaksanaannya metode deskriptif lebih menekankan pada suatu studi untuk memperoleh informasi mengenai keadaan suatu gejala yang muncul pada saat penelitian berlangsung, dengan memakai metode ini tidak hanya memberikan suatu gambaran mengenai gejala-gejala yang muncul, melainkan juga memberikan keterangan mengenai keterkaitan variabel-variabel yang bersangkutan.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Consoelo G. Sevilla yang diterjemahkan oleh Alimuddin Tuwu bahwa: “seperti kita ketahui bahwa metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Tujuan utama kita dalam menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian berlangsung dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”. (1993:71).

### 3.1 Definisi Variabel

Tujuan pembuatan definisi variabel adalah untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan dan mengartikan variabel yang terkandung dalam penelitian ini. Maka perlunya untuk menguraikan istilah-istilah variabel-variabel tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Komaruddin bahwa: “umumnya dalam ilmu sosial terjadi istilah-istilah yang berlainan untuk menunjukkan isi atau maksud yang sama, obyeknya sama, tetapi istilah atau nama untuk obyek-obyek itu berbeda, dan sebaliknya terdapat istilah-istilah yang sama untuk maksud yang berbeda”. (1994:57).

Dengan demikian untuk mempermudah dalam penjelasan lebih lanjut, maka penjabaran variabel-variabel itu dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1: Penjabaran Variabel-variabel

### 3.2 Populasi dan Sampel

Setiap penelitian akan selalu berhadapan dengan populasi, karena populasi merupakan sumber data. Dari populasi ini dapat dikumpulkan keterangan-keterangan juga data yang berguna dan diperlukan dalam penelitian untuk mengambil suatu kesimpulan penelitian. Populasi juga dapat diartikan sebagai obyek penelitian berupa manusia, gejala-

gejala, benda-benda, tingkah laku dan sebagainya. Sejalan dengan pendapat dari Winarno Surachmad (1989:93) bahwa: “populasi adalah sekumpulan obyek, manusia, gedung, peristiwa dan benda-benda”.

Populasi untuk penelitian ini adalah para pegawai tetap di lingkungan kantor dinas pariwisata kota Bandung. Jumlah Populasi penelitian ini sebanyak 84 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1: Daftar Pegawai pada Dinas Pariwisata Kota Bandung 2016

Bagian	Jumlah
Kepala Dinas	1
Kepala Sub Bagian TU	1
Kepala Urusan	6
Kepala Seksi	8
Kepala Sub Seksi	10
Staf dan Pegawai	48
<b>Jumlah</b>	<b>74</b>

Penentuan sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu, sehingga sumber data yang diperoleh akan berlaku umum bagi keseluruhan populasi. Berdasarkan masalah yang akan diteliti maka jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 40 orang untuk mewakili jumlah populasi.

Hal ini dilakukan sejalan dengan pendapat dari Nana Sudjana (1989:72) bahwa: “besarnya sampel tidak ada ketentuan yang baku sebab keabsahan sampel terletak pada sifat karakteristiknya mendekati populasi atau tidak bukan pada besarnya atau banyaknya”.

### 3.3 Teknik Pengolahan Data

Rumus yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan Y adalah dengan menggunakan rumus dari Spearman ( $r_s$ ) yang mempunyai rangking kembar (sama) yaitu sebagai berikut:

$$r_s = \frac{\Sigma X^2 + \Sigma Y^2 - \Sigma d_i^2}{\sqrt{2(\Sigma X^2)(\Sigma Y^2)}}$$

Dengan ketentuan:

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$X^2 = \frac{N^3 - N}{12} - T_x$$

$$Y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - T_y$$

(Sidney Siegel, 1997:256)

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh dari analisis data yang dimaksudkan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya hubungan antara variabel kualifikasi standar kerja dengan variabel penempatan pegawai sebagai data yang terkumpul melalui angket. Dalam analisis data ini dilakukan perhitungan-perhitungan terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan analisa koefisien korelasi rank spearman untuk menguji hipotesis.

Langkah awal dalam menganalisis data ini adalah seleksi angket yang dimaksud untuk mengetahui apakah data yang terkumpul telah memenuhi syarat untuk diolah atau tidak. Adapun syarat-syarat suatu angket dapat diolah adalah sebagai berikut:

1. Pengisian angket sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan.
2. Pengisiannya jelas dan tidak diragukan.
3. Angket harus utuh, tidak ada bagian yang hilang atau rusak.

Dari hasil penyebaran seleksi angket yang telah dilakukan, menunjukkan keadaan sebagai berikut:

1. Angket terkumpul sebanyak 40 eksemplar atau 100% dengan pengisian sesuai petunjuk yang telah ditentukan serta pengisiannya tidak diragukan.
2. Setiap eksemplar angket kembali dalam keadaan utuh, artinya tidak ada halaman atau lembaran

yang hilang atau kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2:**

Rekapitulasi Angket yang Tersebar, Terkumpul dan Dapat Diolah

Instrumen	Jumlah		
	Tersebar	Terkumpul	Diolah
Angket	40	40	40

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang terkumpul dapat diolah seluruhnya, yaitu 40 eksemplar atau 100% dari seluruh angket yang tersebar. Setelah data diseleksi, langkah berikutnya adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan memberi bobot atau skor pada setiap alternatif jawaban sesuai dengan pedoman pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3:**

Pemberian Skor Masing-Masing Bulir

Pernyataan	Jumlah			
	SS	S	TS	STS
Positif	4	3	2	1
Negatif	1	2	3	4

Adapun jumlah bulir kedua variabel tersebut sebanyak 40 bulir, yang terdiri dari 30 bulir pernyataan positif dan 10 bulir pernyataan negatif.

##### 4.2 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara penetapan kualifikasi standar kerja dengan penempatan pegawai pada kantor dinas pariwisata kabupaten Pringsewu. Untuk membuktikan hipotesis tersebut maka digunakan analisis koefisien korelasi rank spearman dan hasil perhitungan korelasi antara variabel X dengan variabel Y sebagai berikut:

1. Koefisien korelasi (rs) antara variabel X dengan variabel Y adalah sebesar 0,5591. Dengan demikian koefisien korelasi antara kedua variabel tersebut menurut klasifikasi Guilford termasuk ke dalam korelasi sedang atau cukup.
2. Uji signifikansi koefisien korelasi (uji T student)

diperoleh  $t$  hitung sebesar 4,16 sedangkan  $t_{tabel}$  (0,99) dengan derajat kebebasan  $(dk) = (n - 2)$  adalah sebesar 1,68.

Melihat hasil ini maka dapat diketahui bahwa  $t_{hitung}$  (4,16) lebih besar dari  $t_{tabel}$  (1,68). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y adalah signifikan.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa: “terdapat hubungan positif antara kualifikasi standar kerja dengan penempatan pegawai pada kantor dinas pariwisata kabupaten Pringsewu”. Dengan demikian hipotesis penelitian ini dapat diterima.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Gambaran Kualifikasi Standar Kerja pada Kantor Pariwisata Kabupaten Pringsewu

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kualifikasi standar kerja pada Kantor dinas pariwisata kabupaten Pringsewu, menurut persepsi pegawai apakah dibutuhkan atau tidak dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4:**

Kualifikasi Standar Kerja pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pringsewu

Tinggi		Sedang		Rendah		Rata-rata
JML	%	JML	%	JML	%	Perolehan
26	65	14	35	-	-	63,4

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi pegawai terhadap penetapan kualifikasi standar kerja menunjukkan:

1. Pegawai yang mempunyai persepsi tinggi sebanyak 26 orang atau 65%.
2. Pegawai yang mempunyai persepsi sedang sebanyak 14 orang atau 35%.
3. Pegawai yang mempunyai persepsi rendah tidak ada.

Sedangkan skor rata-rata perolehan sebesar 63,4. Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi para

pegawai cukup tinggi terhadap penetapan kualifikasi standar kerja pada Kantor Dinas Pariwisata Kota Bandung.

#### 4.3.2 Gambaran Penempatan Pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pringsewu

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan penempatan pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pringsewu, menurut persepsi pegawai apakah ada relevansinya dengan kebutuhan pegawai atau tidak dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5:**

Penempatan Pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pringsewu

Tinggi		Sedang		Rendah		Rata-rata
JML	%	JML	%	JML	%	Perolehan
34	85	6	15	-	-	64,7

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi pegawai terhadap penempatan pegawai menunjukkan:

1. Pegawai yang mempunyai persepsi tinggi sebanyak 34 orang atau 85%.
2. Pegawai yang mempunyai persepsi sedang sebanyak 6 orang atau 15%.
3. Pegawai yang mempunyai persepsi rendah tidak ada.

Sedangkan skor rata-rata perolehan sebesar 64,7. Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi para pegawai cukup tinggi terhadap penempatan pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Kota Bandung.

#### 4.3.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap penelitian dapat diketahui bahwa pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kualifikasi kerja yang telah ditetapkan akan mempunyai tingkat pekerjaan yang lebih baik dibandingkan dengan pegawai yang tidak ditempatkan sesuai dengan kualifikasi standar kerja.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penetapan kualifikasi standar kerja akan membantu



pihak manajemen atau pimpinan instansi atau lembaga organisasi dalam menempatkan pegawainya di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Pringsewu berdasarkan hasil uji signifikansi diperoleh  $t_{hitung}$  4,16 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,68 artinya kualifikasi standar kerja mempunyai hubungan dengan penempatan pegawai.

Dengan kualifikasi standar kerja pada dasarnya adalah berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja para pegawai dalam menghadapi pekerjaannya sehingga dapat menunjang terlaksananya tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya yang pada akhirnya dapat membantu pihak manajemen atau pimpinan instansi atau lembaga suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Dalam penelitian ini penulis merumuskan tiga kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan penetapan kualifikasi standar kerja akan memberi keuntungan yang berarti dan positif, artinya kualifikasi standar kerja yang harus dipenuhi para pegawai dapat membantu pihak manajemen atau pimpinan instansi atau lembaga suatu organisasi dalam melaksanakan penempatan pegawai. Sehingga dapat menunjang terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada pegawai tersebut.
2. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara variabel X (kualifikasi standar kerja) dengan variabel Y (penempatan pegawai) adalah 0,5591 yang berarti termasuk dalam sedang atau cukup.
3. Pada uji signifikansi koefisien korelasi menunjukkan  $t_{hitung} = 4,16$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 1,68$ . Artinya korelasi antara variabel kualifikasi

standar kerja dengan variabel penempatan pegawai adalah signifikan.

Akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa terdapat hubungan yang positif antara penetapan kualifikasi standar kerja dengan penempatan pegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pringsewu.

### 5.2 Saran

Dalam penelitian ini penulis merumuskan lima saran, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian korelasi antara variabel X kualifikasi standar kerja dengan variabel Y penempatan pegawai sebesar 0,5591 berarti hubungan antara variabel X dengan variabel Y termasuk dalam kategori sedang, keadaan tersebut merupakan tantangan bagi pimpinan kantor, yaitu meningkatkan kondisi ini di masa yang akan datang. Sehingga tujuan pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pringsewu tercapai dengan efektif dan efisien.
2. Dari hasil angket terlihat kurangnya ketelitian dan kerapian kerja yang jika dibiarkan akan menimbulkan dampak buruk bagi pelaksanaan pekerjaan sehingga perlu dilaksanakan pengawasan yang berkala.
3. Masih kurangnya kesadaran akan pentingnya suatu pekerjaan sehingga menganggap pekerjaan adalah suatu beban.
4. Perlunya peningkatan kedisiplinan yang dirasakan masih kurang dan perlu diperbaiki lagi.
5. Perlunya menciptakan suasana kekeluargaan dalam pelaksanaan pekerjaan yang lebih komunikatif dan kondusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Gomes Faustino Cardoso. 1999, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta.

- [2] Hasibuan, Malayu SP. 1997, *Manajemen Personalia*, PPM UGM, Yogyakarta.
- [3] Jiwanto, Gunawan. 1980, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dasar Kunci Keberhasilan*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- [4] Moekijat. 1988, *Manajemen Tenaga Kerja Dan Hubungan Kerja*, Pionir Jaya, Bandung.
- [5] Poerwadarminta, WJS. 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- [6] Saksono, Selamat. 1988, *Administrasi Kepegawaian*, Kanisius, Yogyakarta.
- [7] Sastradipoera, Komaruddin. 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, Bina Aksara, Bandung.
- [8] Sudjana, Nana. 1989, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Sinar Baru, Bandung.
- [9] Surachman, Winarno. 1985, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknis*, Tarsito, Bandung.
- [10] Sevilla, Consoelo G. 1993, *Pengantar Metodologi Penelitian*, UI Press, Jakarta.
- [11] Siegel, Sidney. 1997, "*Statistik Nonparametik untuk Ilmu-ilmu Sosial*", Dialihbahasakan oleh Zanzawi Suyuti dan Landung Simatupang, Gramedia, Jakarta.

# Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi Perusahaan, Dan Reputai KAP Terhadap Timeliness Dengan *Audit Delay* Sebagai Variabel Intervening

Havieza Dwy Cahya dan Cherrya Dhia Wenny

STIE MDP

haviezadwycahya@gmail.com

cherrya@stie-mdp.ac.id

**Abstract:** *The purpose of this research is to find empirical proof the effect of firm size, complexity of company operations and reputation public accounting firm (KAP) on timeliness with audit delay as intervening variables. The sample used in this research are manufacturing companies that listed on Indonesia Stock Exchange in 2013-2017 period. While the variable used are firm size, complexity of company operations, and reputation public accounting firm (KAP). By using multiple regression analysis and path analysis to examine the effect of intervening variables. The results of this research showed that the firm size and reputation public accounting firm (KAP) affect the timeliness but the complexity of company operations did not affect the timeliness. The firm size and complexity of company operations did not affect the audit delay but the reputation of public accounting firm (KAP) affects the audit delay. The audit delay affects the timeliness. Audit delay is an intervening variable between firm size to timeliness and complexity of company operations to timeliness but audit delay is not an intervening variable between reputations of public accounting firm (KAP) to timeliness.*

**Keyword:** *timeliness, audit delay, firm size, complexity of company operations, reputation of public accounting firm (KAP)*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, dan reputasi KAP terhadap timeliness dengan audit delay sebagai variabel intervening. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan yaitu perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Variabel penelitian yang digunakan ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, dan reputasi KAP. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dan analisis jalur untuk menguji pengaruh variabel intervening. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel ukuran perusahaan dan variabel reputasi KAP berpengaruh terhadap timeliness tetapi variabel kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap timeliness. Variabel ukuran perusahaan dan kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay tetapi variabel reputasi KAP berpengaruh terhadap audit delay. Variabel audit delay berpengaruh terhadap timeliness. Audit delay merupakan variabel intervening antara ukuran perusahaan dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap timeliness namun variabel audit delay bukanlah merupakan variabel intervening antara reputasi KAP terhadap timeliness.*

**Kata kunci:** *Timeliness, Audit Delay, Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi Perusahaan, Reputasi KAP*

## 1. Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini pertumbuhan ekonomi dunia sedang mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Benua Asia sudah

memasuki jaman Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang turut serta mengikuti dan mendukung adanya perdagangan bebas sehingga akan semakin memperketat persaingan antar perusahaan baik di kawasan Asia maupun seluruh dunia. Agar

perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain, maka manajemen perusahaan akan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan agar menjadi perusahaan yang lebih aktif dan berkualitas tinggi. Hal ini akan menyebabkan besarnya dana yang dikeluarkan oleh perusahaan. Agar memperoleh dana yang cukup untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, perusahaan tidak akan cukup hanya dengan menggunakan dana internal dan pinjaman dari bank.

Maka dari itu dibutuhkan investasi-investasi dari para investor. Dalam membuat keputusan investasi, investor membutuhkan laporan keuangan yang andal, transparan dan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi. Untuk membuat laporan keuangan yang andal, transparan dan dapat dipercaya dibutuhkan auditor untuk menilai keakuratan laporan keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan dibuat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Lamanya proses penyelesaian audit dapat mempengaruhi waktu publikasi laporan keuangan. Semakin cepat proses pengauditan laporan keuangan,

semakin cepat pula waktu publikasi laporan keuangan dan sebaliknya semakin lamaproses pengauditan laporan keuangan, semakin lama pula waktu publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan akan mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama. Dengan adanya hambatan-hambatan inilah yang memungkinkan akuntan publik untuk menunda publikasi laporan audit.

Perusahaan *go public* yang melewati batas waktu penerbitan laporan keuangan akan dikenakan sanksi dan denda yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan (LK) berdasarkan Peraturan Bapepam No. X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-346/BL/2011. Ketentuan III.1.6.2 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, menyatakan laporan keuangan tahunan harus disampaikan dalam bentuk laporan keuangan audit, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Walaupun BAPEPAM dan LK telah menetapkan sanksi dan denda bagi perusahaan yang melanggar peraturan, masih banyak perusahaan yang terlambat merilis laporan keuangannya ke publik.

**Tabel 1.** Jumlah Perusahaan yang Tidak Tepat Waktu dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Periode 2013-2017

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perusahaan yang Belum Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu</b>	<b>Jumlah Perusahaan Tercatat di BEI</b>	<b>Persentase</b>
2013	45 emiten	548 emiten	8,21%
2014	52 emiten	563 emiten	9,23%
2015	94 emiten	572 emiten	16,43%
2016	69 emiten	596 emiten	11,58%
2017	70 emiten	640 emiten	10,94%

Sumber: Diolah penulis, 2018

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan pada tahun 2013 sejumlah 45 emiten, tahun 2014 sejumlah 52 emiten, tahun 2015 sejumlah 94 emiten, tahun 2016 sejumlah 69 emiten dan tahun 2017 sejumlah 70 emiten. Jumlah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 sampai 2017 terus mengalami kenaikan.

Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan persentase jumlah perusahaan yang tidak tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya dari tahun 2013 sampai 2015, sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan persentase jumlah perusahaan yang tidak tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya. Salah satu kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang terjadi pada

tahun 2013 adalah perusahaan PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN). Atas keterlambatan ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) pun sudah mensuspensi perdagangan saham BORN sejak 30 Juni 2014.

Presiden Direktur BORN menjelaskan alasan keterlambatan tersebut disebabkan oleh peristiwa diluar kendali perusahaan. Peristiwa yang dimaksud adalah pertama, BORN menunggu penyelesaian laporan keuangan tahun 2013 Asia Resource Minerals Plc (ARMS) dan PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU). BORN tercatat memiliki kepemilikan tidak langsung atas 23,8 % saham ARMS, alasan ini tidak sesuai karena BRAU sudah merilis laporan keuangan 2013 sejak 28 Maret 2014 dan ARMS juga sudah mempublikasikannya pada 11 April 2014.

Kedua, keterlambatan ini disebabkan oleh adanya pemberitaan mengenai potensi *delisting* dan pembagian dividen dari ARMS. Ketiga, *impairment* terhadap dua aset BORN, yaitu investasi di ARMS dan *goodwill* di PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Terakhir, BORN beralasan telat mengirimkan laporan keuangan 2013 lantaran *Pricewaterhouse Coopers (PwC)* menemukan penyimpangan keuangan di BRAU. PwC menjadi auditor BORN dan menganggap BORN sebagai grup yang sama dengan ARMS dan BRAU maka dari itu, PwC menerapkan perluasan *sampling* terhadap pemeriksaan keuangan BORN. (sumber dari [www.investasi.kontan.co.id](http://www.investasi.kontan.co.id)).

Pada tahun 2014 dan 2015, BORN masih mengalami suspensi dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Kondisi seperti ini juga dapat terjadi pada perusahaan *go public* lain. Hal ini berakibat pada peningkatan jumlah perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya tiap tahun. Seperti pada tahun 2013-2015 persentase jumlah perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan tepat waktu meningkat secara signifikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa perusahaan *go public* yang terdaftar di BEI masih mengalami masalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sekalipun BAPEPAM telah memberikan sanksi atas keterlambatan.

*Audit delay* dijadikan sebagai variabel *intervening* dikarenakan untuk mempublikasikan laporan keuangan, perusahaan *go public* harus mengauditkan laporan keuangannya terlebih dahulu. Untuk dapat mempublikasikan laporan keuangan, perusahaan *go public* harus melalui fase-fase audit yang dinamakan *audit delay*. Cepat atau lambatnya perusahaan mempublikasikan laporan keuangan, tergantung dari panjang pendeknya tenggang waktu antara tanggal laporan keuangan (31 Desember) dengan tanggal laporan auditor ditandatangani. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini lebih menekankan pada tenggang waktu publikasi laporan keuangan. Tenggang waktu publikasi laporan keuangan adalah selisih antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan ke bursa.

Dengan masih ditemukannya keterlambatan penyampaian laporan keuangan di beberapa perusahaan yang terdaftar di BEI dan juga masih adanya perbedaan dari beberapa hasil penelitian, penulis memandang perlu untuk meneliti kembali faktor-faktor yang dipertimbangkan mempengaruhi *timeliness* dengan variabel *audit delay* sebagai variabel *intervening*. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang dipertimbangkan mempengaruhi *timeliness* dengan *audit delay* sebagai variabel *intervening* adalah ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, dan reputasi KAP.

## 2. Landasan Teori

Teori keagenan merupakan teori yang membahas penentuan kontrak dalam pekerjaan yang paling efisien dan bisa mempengaruhi hubungan antara pemilik dan agen yang menjalankan. Pengertian *agency theory* menurut Jensen and Meckling (1976) adalah: “*We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.*” Hubungan antara pemegang saham sebagai pihak

yang kekayaannya dipercayakan untuk dikelola oleh manajemen perusahaan. Pemisahan fungsi pengelolaan dan kepemilikan antara manajemen dan pemegang saham ini menyebabkan pengelolaan yang dilakukan oleh manajer akan dikontrol dan diawasi oleh pemegang saham sebagai pihak yang menginvestasikan kekayaannya.

Dalam *agency theory* ini *principal* adalah pemegang saham atau pihak-pihak yang menyerahkan seluruh kekayaannya untuk dikelola oleh pihak lain dan *agent* adalah manajemen perusahaan atau pihak yang mengelola kekayaan pemegang saham. Sedangkan auditor berada ditengah-tengah antara *principal* dan *agent* sebagai penengah untuk menilai apakah pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan standar akuntansi. Auditor juga berfungsi untuk mengurangi biaya yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri oleh manajer (*agent*).

Laporan keuangan adalah sebuah laporan yang disajikan untuk para pengguna laporan keuangan yang berisi informasi keuangan suatu entitas pada periode tertentu yang menggambarkan kinerja dari suatu entitas. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2014), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas, kinerja keuangan suatu entitas, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Para pengguna laporan keuangan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.

Pengertian *Auditing* menurut Alvin A. Arrens, et. Al dan Jusuf (2015) adalah:

*“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by competent, independent person”.*

*Auditing* merupakan akumulasi dan evaluasi dari bukti-bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh

orang yang kompeten dan independen. *Audit delay* adalah lamanya waktu dalam menyelesaikan suatu laporan audit atas laporan keuangan, yang diukur dari penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. BAPEPAM dan BEI menetapkan laporan keuangan tahunan perusahaan harus telah selesai di audit dan diserahkan ke BAPEPAM dan BEI selambat-lambatnya 90 hari dihitung dari penutupan buku tahunan untuk dipublikasikan ke publik.

*Timeliness* merupakan ketepatan waktu pelaporan keuangan yang diukur dengan selisih tanggal akhir penutupan buku (31 Desember) dengan tanggal pelaporan keuangan ke publik. Informasi akan bermanfaat bagi penggunaannya apabila informasi tersebut tepat waktu. Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan secepat mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

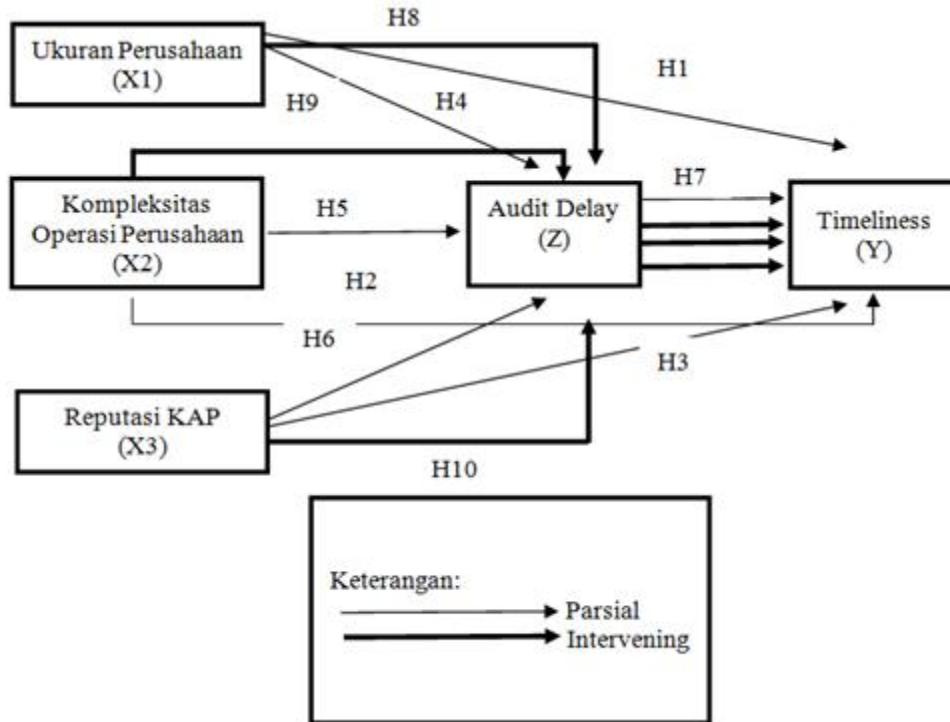
Besar kecilnya suatu perusahaan dinilai dari jumlah total aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dilihat dari jumlah kekayaan dan total penjualan perusahaan dalam satu periode penjualan, jumlah kepemilikan aset suatu perusahaan, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan sebagai suatu skala menentukan ukuran perusahaan.

Kompleksitas organisasi atau operasi merupakan akibat dari pembentukan departemen dan pembagian pekerjaan dalam jumlah unit yang berbeda di suatu perusahaan. Kompleksitas operasi perusahaan saling berhubungan dengan unit-unit lain dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada penelitian ini kompleksitas operasi perusahaan diukur dari ada atau tidaknya anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan induk.

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bekerja dalam bidang jasa profesional akuntansi. Laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan di BEI membutuhkan jasa audit dari kantor akuntan publik (KAP). Jasa

audit digunakan agar informasi dalam laporan keuangan yang berisi kinerja perusahaan akurat dan dapat dipercaya. Untuk menjamin kredibilitas dari laporan keuangan tersebut, perusahaan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik yang mempunyai reputasi

tinggi seperti KAP yang berafiliasi dengan KAP besar yang diakui secara universal yaitu KAP *The Big Four*. Kerangka Pemikiran yang digunakan di dalam penelitian ini pada gambar 1 sebagai berikut:



Sumber: Penulis, 2018

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diidentifikasi bahwa variabel independen terdiri dari ukuran perusahaan (X1), kompleksitas operasi perusahaan (X2), dan reputasi KAP (X3) sedangkan variabel dependennya yaitu *timeliness* (Y) dan *audit delay* (Z) sebagai variabel intervening.

### 3. Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, dan reputasi KAP terhadap *timeliness* dengan *audit delay* sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2017.

Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, dan reputasi KAP terhadap *timeliness* dengan *audit delay* sebagai variabel intervening. Subjek penelitian semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

Populasi dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2013-2017. Sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017 sebanyak 49 perusahaan, dengan 227 sampel dengan menggunakan *metode purposive sampling*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa laporan

keuangan setiap perusahaan sampel yang dilaporkan ke BEI dari tahun 2013-2017. Data sekunder dalam penelitian ini yang mencakup tentang laba bersih setelah pajak, total aktiva, nama auditor independen, bagan struktur organisasi, tanggal penyelesaian audit dan tanggal penyerahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit ke BAPEPAM. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, karena penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber resmi Bursa Efek Indonesia. Pengolahan data dengan persamaan statistic deskriptif, regresi berganda, uji asumsi klasik, analisis jalur, uji t dan uji F.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1 Hasil Penelitian

**Tabel 2.** Uji Multikolonieritas

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Tolerance	VIF
Ukuran Perusahaan	.537	1.863
Kompleksitas Operasi Perusahaan	.871	1.148
Reputasi KAP	.550	1.819
Audit Delay	.979	1.022

a. Dependent Variable: Timeliness  
 Sumber: *Output SPSS 23, 2018*

Dari hasil tabel 2. diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel bebas yang memiliki

nilai *tolerance* kurang dari 0,1 dan juga tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 berarti tidak terjadi gejala multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

**Tabel 3.** Uji Autokorelasi

**Coefficients<sup>a</sup> Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Durbin-Watson
1	1.834

Sumber: *Output SPSS 23, 2018*

Dari hasil tabel 3. menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1.834. Angka tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena masih berada diantara angka 1,81045 sampai dengan 2,18955.

**Tabel 4.** Uji Heterokedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Sig
Ukuran Perusahaan	.231
Kompleksitas Operasi Perusahaan	.243
Reputasi KAP	.124
Audit Delay	.315

Sumber: *Output SPSS 23, 2018*

Dari hasil tabel 4. diatas menunjukkan nilai signifikansi variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap *absolute residual* diatas 0,05, berarti tidak terjadi heterokedastisitas.

**Tabel 5.** Uji Normalitas Menggunakan *Outlier*

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		227
	Mean	0E-7
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	3.34756741
	Absolute	.081
Most Extreme Differences	Positive	.064
	Negative	-.081
Kolmogorov-Smirnov Z		1.226
Asymp. Sig. (2-tailed)		.099

Sumber: *Output SPSS 23, 2018*



Dari hasil tabel 5. diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,099 atau dapat dikatakan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.

**Tabel 6.** Uji Linieritas Hubungan Ukuran Perusahaan Dengan *Timeliness*

ANOVA Table		Sig.
<i>Timeliness *</i> Ukuran Perusahaan	<i>Deviation from Linearity</i>	.737

Sumber: *Output* SPSS 23, 2018

Dari tabel 6. menunjukkan nilai signifikansi pada *linearity* sebesar 0,737 artinya antara variabel ukuran perusahaan dengan *timeliness* mempunyai hubungan yang linear.

**Tabel 7.** Uji Linieritas Hubungan Kompleksitas Operasi Perusahaan Dengan *Timeliness*

ANOVA Table <sup>a</sup>		Sig.
<i>Timeliness *</i> Kompleksitas Operasi Perusahaan		.823

Sumber: *Output* SPSS 23, 2018

Dari tabel 7. menunjukkan nilai signifikansi pada *linearity* sebesar 0,823 artinya antara variabel kompleksitas operasi perusahaan dengan *timeliness* mempunyai hubungan yang linear.

**Tabel 8.** Uji Linieritas Hubungan Reputasi KAP Dengan *Timeliness*

	Sig.
<i>Timeliness *</i> Reputasi KAP	.179

Sumber: *Output* SPSS 23, 20

Dari tabel 8. di atas menunjukkan nilai signifikansi pada *linearity* sebesar 0,179 artinya antara variabel reputasi KAP dengan *timeliness* mempunyai hubungan yang linear.

**Tabel 9.** Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients B
(Constant)	121.653
Ukuran Perusahaan	-1.505
Kompleksitas Operasi Perusahaan	-.406
Reputasi KAP	1.723
<i>Audit Delay</i>	.216

Sumber: *Output* SPSS 23, 2018

Dari hasil tabel 9. diatas menunjukkan bahwa konstanta (Y) sebesar 121.653, koefisien ukuran perusahaan (X1) sebesar -1,505, koefisien kompleksitas operasi perusahaan (X2) sebesar -0,406, koefisien reputasi KAP (X3) sebesar 1,723, dan koefisien *audit delay* (Z) sebesar 0,216.

**Tabel 10.** Hasil Analisis Jalur *R Square* Persamaan Regresi 1

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.145 <sup>a</sup>	.021	.008	9,326

a. Predictors: (Constant), REPUTASI KAP, KOMPLEKSITAS OPERASI PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN

Sumber: *Output* SPSS 23, 2018

**Tabel 11.** Hasil Analisis Jalur *Coefficients* Persamaan Regresi 1

*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	65,203	15,043		4,334	,000
UKURAN PERUSAHAAN	1,134	1,271	,081	,893	,373
KOMPLEKSITAS OPERASI PERUSAHAAN	1,111	1,756	,045	,632	,528
REPUTASI KAP	1,058	1,751	,054	,604	,546

a. *Dependent Variable: AUDIT DELAY*

Sumber: *Output SPSS 23, 2018*

**Tabel 12.** Hasil Analisis Jalur *R Square* Persamaan Regresi 2

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,537 <sup>a</sup>	,288	,276	3,378

a. *Predictors: (Constant), AUDIT DELAY, KOMPLEKSITAS OPERASI PERUSAHAAN, REPUTASI KAP, UKURAN PERUSAHAAN*

Sumber: *Output SPSS 23, 2018*

**Tabel 13.** Hasil Analisis Jalur *Coefficients* Persamaan Regresi 2

*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	121,653	5,673		21,443	,000
UKURAN PERUSAHAAN	-1,505	,461	-,252	-3,264	,001
KOMPLEKSITAS OPERASI PERUSAHAAN	-,406	,637	-,039	-,637	,525
REPUTASI KAP	1,723	,635	,207	2,715	,007
AUDIT DELAY	,216	,024	,510	8,909	,000

a. *Dependent Variable : TIMELINESS*

Sumber: *Output SPSS 23, 2018*

Dari hasil tabel diatas menunjukkan pengaruh langsung variabel ukuran perusahaan ke *timeliness* sebesar -0,252 sedangkan pengaruh tidak

langsung variabel ukuran perusahaan ke *timeliness* sebesar (0,081) x (0,510) = 0,04131 sehingga dapat disimpulkan bahwa *audit delay*

merupakan variabel intervening antara ukuran perusahaan terhadap *timeliness*. Pengaruh langsung variabel kompleksitas operasi perusahaan ke *timeliness* sebesar -0,039 sedangkan pengaruh tidak langsung variabel ukuran perusahaan ke *timeliness* sebesar  $(0,045) \times (0,510) = 0,02295$  sehingga dapat disimpulkan bahwa *audit delay* merupakan variabel intervening antara kompleksitas operasi perusahaan terhadap *timeliness*. Pengaruh langsung variabel reputasi KAP ke *timeliness* sebesar 0,207 sedangkan pengaruh tidak langsung variabel reputasi KAP ke *timeliness* sebesar  $(0,054) \times (0,510) = 0,02754$  sehingga dapat disimpulkan bahwa *audit delay* bukan merupakan variabel intervening antara reputasi KAP terhadap *timeliness*.

**Tabel 14.** Koefisien Determinasi Variabel  
Dependen *Timeliness*

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Adjusted R Square
1	.276

Sumber: Output SPSS 23, 2018

Dari hasil tabel 14. diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.276. Hal ini berarti bahwa 27,6% *timeliness* dipengaruhi oleh ke empat variabel independen yaitu ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP, dan *audit delays* sedangkan sisanya 72,4%  $(100\% - 27,6\%)$  dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

**Tabel 15.** Koefisien Determinasi Variabel  
Dependen *Audit Delay*

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Adjusted R Square
1	.008

Sumber: Output SPSS 23, 2018

Dari hasil tabel 15. diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.008. Hal ini berarti bahwa 0,8% *audit delay* dipengaruhi oleh ke tiga variabel independen yaitu ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, dan reputasi KAP sedangkan sisanya 99,2% dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

**Tabel 16.** Uji t Variabel Dependen *Timeliness*

Model	t	Sig.
Ukuran Perusahaan	-3.264	.001
Kompleksitas Operasi Perusahaan	-.637	.525
Reputasi KAP	2.715	.007
<i>Audit Delay</i>	8.909	.000

Sumber: Output SPSS 23, 2018

Dari hasil tabel 16. diatas menunjukkan nilai t hitung variabel ukuran perusahaan sebesar 3.264 dengan arah negatif karena t hitung > t tabel yaitu  $3.264 > 1.6515$  dan tingkat signifikansi  $0,001 < 0,05$  artinya ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *timeliness*. Nilai t hitung variabel kompleksitas operasi perusahaan sebesar 0.637 dengan arah negatif. Karena t hitung < t tabel yaitu  $0.637 < 1.6515$  dan tingkat signifikansi  $0,525 > 0,05$  artinya kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *timeliness*.

Nilai t hitung variabel reputasi KAP sebesar 2.715 dengan arah positif. Karena t hitung > t tabel yaitu  $2.715 > 1.6515$  dan tingkat signifikansi  $0.007 < 0.05$  artinya reputasi KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap *timeliness*. Nilai t hitung variabel *audit delay* sebesar 8.909 dengan arah positif. Karena t hitung > t tabel yaitu  $8.909 > 1.6515$  dan tingkat signifikansi  $0.000 < 0.05$  artinya *audit delay* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *timeliness*.

**Tabel 17.** Uji t Variabel Dependen *Audit Delay*

Model	t	Sig.
Ukuran Perusahaan	.893	.373
Kompleksitas Operasi Perusahaan	.632	.528
Reputasi KAP	.604	.546

Sumber: Output SPSS 23, 2018

Dari hasil tabel 17. diatas menunjukkan nilai t hitung variabel ukuran perusahaan sebesar 0.893 dengan arah positif. Karena t hitung < t tabel yaitu  $0.893 < 1.6515$  dan tingkat signifikansi  $0.373 > 0.05$  artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *audit delay*. Nilai t hitung

sebesar 0.632 dengan arah positif. Karena  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel yaitu  $0.632 < 1.6515$  dan tingkat signifikansi  $0.528 > 0.05$  artinya kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *audit delay*. Nilai  $t$  hitung sebesar 0.604 dengan arah positif. Karena  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel yaitu  $0.604 < 1.6515$  dan tingkat signifikansi  $0.546 > 0.05$  artinya sehingga reputasi KAP tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *audit delay*.

**Tabel 18.** Uji F Variabel Dependen *Timeliness*

Model	F	Sig
1	22.499	.000

Sumber: *Output SPSS 23, 2018*

Dari hasil tabel 18. diatas menunjukkan nilai F hitung sebesar 22.499 dengan taraf signifikansi 0.000. Nilai F tabel sebesar 2.4114. Hal ini menunjukkan bahwa F hitung  $>$  F tabel yaitu  $22.499 > 2.41$  dan nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$  artinya variabel independen yaitu ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP, dan *audit delay* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *timeliness*.

**Tabel 19.** Uji F Variabel Dependen *Audit Delay*

Model	F	Sig
1	1.605	.189

Sumber: *Output SPSS 23, 2018*

Dari hasil tabel 19. diatas menunjukkan nilai F hitung sebesar 1.605 dengan taraf signifikansi 0.189. Nilai F tabel sebesar 2.6443. Hal ini menunjukkan bahwa F hitung  $<$  F tabel yaitu  $1.605 < 2.6443$  artinya variabel independen yaitu ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, dan reputasi KAP secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

## 4.2 Pembahasan

Salah satu kode etik profesi akuntan publik yang harus ditaati oleh auditor adalah kompetensi dan ketelitian profesional. Auditor harus tetap melaksanakan jasa profesionalnya dengan tepat dan

teliti meskipun perusahaan yang diaudit berukuran besar dan dikatakan memiliki pengendalian internal yang kuat. Maka dari itu, besar kecilnya ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *audit delay*. Namun, disisi lain ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *timeliness*. Perusahaan yang memiliki aset besar memiliki sumber daya yang profesional, staf akuntan yang spesialis dan teknologi yang lebih canggih, sistem pengendalian internal yang kuat, cenderung lebih diawasi oleh investor, analisis keuangan, dan masyarakat sehingga mereka harus menyampaikan dan mempublikasikan laporan keuangan auditan lebih cepat atau tepat waktu..

Dari hasil penelitian juga dapat dikatakan bahwa jumlah anak perusahaan dan lokasi unit operasi cabang perusahaan tidak akan mempengaruhi lamanya auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya dan juga tidak mempengaruhi lamanya waktu penyampaian laporan keuangan auditan ke publik. Auditor akan melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan prosedur audit tidak tergantung pada jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan.

Selain itu, hasil penelitian membuktikan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Auditor dari KAP yang berafiliasi dengan big four ataupun non big four adalah auditor yang sama-sama memiliki keahlian dan sudah profesional di bidangnya sehingga mereka tetap berkewajiban melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan audit. Namun, walaupun reputasi KAP ini tidak berpengaruh terhadap waktu penyelesaian audit, hasil penelitian membuktikan bahwa reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan ke publik. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* adalah perusahaan yang diminati oleh para investor karena dimata investor KAP yang bereputasi baik sudah tentu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu perusahaan akan lebih cepat menyampaikan laporan keuangan auditan ke publik untuk tetap menarik minat investor tersebut.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *timeliness*. Kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *timeliness*. Reputasi KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap *timeliness*. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *audit delay*. Kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *audit delay*. Reputasi KAP tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *audit delay*.

*Audit delay* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *timeliness*. *Audit delay* merupakan variabel intervening antara variabel ukuran perusahaan terhadap *timeliness*. *Audit delay* merupakan variabel intervening antara variabel kompleksitas operasi perusahaan terhadap *timeliness*. *Audit delay* bukan merupakan variabel intervening antara variabel reputasi KAP terhadap *timeliness*.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu bagi penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian ulang dengan menambah jumlah sampel atau periode sampel dan dapat menambahkan variabel penelitian lainnya yang diduga dapat berpengaruh terhadap *timeliness*. Bagi perusahaan, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan jumlah aset yang dimiliki sehingga akan menaikkan nilai ukuran perusahaan. Selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat memiliki lebih banyak sumber daya yang profesional, staf akuntan yang spesialis, teknologi yang lebih canggih dan pengendalian internal yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya.

Hal itu dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat auditor dalam menyelesaikan auditnya sehingga manajemen perusahaan akan lebih cepat dalam menyampaikan dan mempublikasikan laporan keuangannya. Bagi auditor, Auditor diharapkan dapat merencanakan pekerjaannya dengan baik agar proses audit dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga laporan keuangan dapat dipublikasikan tepat waktu. Bagi investor dan calon investor, Sebaiknya memperhatikan kondisi keuangan maupun kondisi non

keuangan suatu perusahaan sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi pada suatu perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arens, Alvin A, Elder Randal J, Beasley Mark S, Amir Abadi Jusuf. 2015, *Auditing dan Jasa Assurance*, Jilid 1, Edisi Keduabelas, Salemba Empat, Jakarta.
- [2] Jensen, Michael C dan William H. Meckling. 1976, *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, *Journal of Financial Economics* Vol. 3 No. 4 pp. 305-360 Harvard University, Massachusetts.
- [3] [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id), *Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Diakses 7 September 2018.
- [4] [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), *Tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur Periode 2013-2017*, Diakses 7 September 2018.
- [5] [www.investasi.kontan.co.id](http://www.investasi.kontan.co.id), *Tentang Alasan BORN Telat Rilis Laporan Keuangan 2013*, Diakses 6 Oktober 2018.

## **PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL**

1. Artikel yang akan dipublikasi dalam jurnal ini merupakan hasil penelitian, dan pengembangan atau usulan gagasan baru yang berhubungan dengan bidang manajemen, akuntansi, ekonomi, dan kewirausahaan.
2. Artikel yang diterima penyunting ditulis dalam bahasa Indonesia baku atau bahasa Inggris dan tidak sedang dikirimkan ke jurnal/terbitan lain serta belum dipublikasikan dalam jurnal lain.
3. Naskah diketik dengan komputer menggunakan *Microsoft Word*, di atas kertas ukuran A4, 2 kolom, spasi 1,5, jenis huruf *Times New Roman* dengan ukuran 11 *point*. Naskah dapat dikirim dalam bentuk *file*. Panjang artikel sekitar 12-20 halaman termasuk daftar pustaka dan lampiran.
4. Judul Artikel harus mencerminkan dengan tepat masalah yang dibahas, dengan menggunakan kata-kata yang tepat, jelas dan mengandung unsur-unsur yang akan dibahas. Ukuran huruf untuk judul adalah *Times New Roman 16 point bold* (huruf besar). Nama penulis ditulis di bawah judul sebelum abstrak tanpa disertai gelar akademik atau gelar lain apapun, asal lembaga tempat penulis bernaung dan alamat email untuk korespondensi dengan ukuran 11 *point bold*.
5. Sistematika Penulisan

### **a. Artikel Hasil Penelitian**

- i. Abstrak dan Kata Kunci  
Abstrak secara ringkas memuat uraian mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Panjang abstrak 50-75 kata yang disusun dalam satu paragraf dengan ukuran 10 *point Times New Roman*. Kata kunci terdiri dari 3-5 kata, yakni istilah yang mewakili ide-ide atau konsep dasar yang dibahas dalam artikel.
- ii. Pendahuluan  
Berisi permasalahan penelitian, batasan masalah penelitian, serta tujuan dan manfaat penelitian.
- iii. Landasan Teori  
Berisi rancangan penelitian atau desain penelitian, sasaran dan target penelitian (populasi dan sampel), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis.
- iv. Metode Penelitian  
Berisi rancangan penelitian atau desain penelitian, sasaran dan target penelitian (populasi dan sampel), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis.

- v. Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Berisi hasil analisis data, pengujian hipotesis, menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, temuan-temuan, dan menginterpretasikan temuan-temuan.
- vi. Simpulan dan Saran  
Berisi ringkasan dan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Saran dapat berisi tindakan praktis, pengembangan teori baru dan penelitian lanjutan.
- vii. Daftar Pustaka  
Diutamakan apabila sumber pustaka atau rujukan berasal dari lebih satu sumber seperti buku, jurnal, makalah, internet, dan lain-lain.

**b. Artikel Konseptual atau non penelitian**

- i. Abstrak dan Kata Kunci  
Abstrak adalah ringkasan dari isi artikel yang dituangkan secara padat bukan komentar atau pengantar penulis. Panjang abstrak 50-75 kata yang disusun dalam satu paragraf dengan ukuran huruf 10 *point Times New Roman*. Kata kunci terdiri dari 3-5 kata, yakni istilah yang mewakili ide-ide atau konsep dasar yang dibahas dalam artikel.
  - ii. Pendahuluan  
Menguraikan hal-hal yang menarik perhatian pembaca, memberikan konteks bagi permasalahan yang akan dibahas, serta tujuan pembahasan.
  - iii. Pembahasan  
Berisi kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, dan pendirian penulis mengenai masalah yang dibahas.
  - iv. Penutup atau Simpulan  
Berisi penegasan sikap penulis atas masalah yang dibahas.
  - v. Daftar Pustaka  
Diutamakan apabila sumber pustaka atau rujukan berasal dari lebih satu sumber seperti buku, jurnal, makalah, internet, dan lain-lain.
6. Tabel/gambar sebaiknya diletakkan pada halaman tersendiri, umumnya diakhir teks. Penulis cukup menyebutkan pada bagian di dalam teks tempat pencantuman tabel atau gambar. Setiap tabel dan gambar diberi nomor urut, judul yang sesuai dengan isi tabel dan gambar, serta dilengkapi dengan sumber kutipan.
7. Daftar pustaka disusun menurut alphabet penulis atau nomor urut. Urutannya dimulai dengan penulisan nama penulis, tahun, judul, penerbit, dan kota terbit. Nama penulis mendahulukan nama keluarga atau nama dibalik, tanpa gelar. Untuk kutipan dari internet berisi nama penulis, judul artikel, alamat *website* dan tanggal akses.

8. Sumber kutipan dalam teks ditulis diantara kurung buka dan kurung tutup yang berisi nama akhir penulis, tahun, dan nomor halaman bila perlu.

Contoh :

- a. Kutipan berasal dari satu sumber dan satu penulis: (Hendra, 2008:22).
- b. Kutipan berasal dari satu sumber dan dua penulis: (Ely dan Thomas, 2001), bila lebih dari dua penulis (Jensen,et.all, 2007) atau (Mulyadi, dkk, 2009).
- c. Kutipan berasal dari dua sumber dengan penulis yang berbeda: Hendra, 2008 dan Mulyadi, 2009).
- d. Kutipan berasal dari dua sumber dengan penulis yang sama: (Hendra, 2008, 2010), jika tahunnya sama (Hendra 2008a, 2008b).
- e. Kutipan berasal dari institusi: (BPS, 2009).

9. Daftar pustaka ditulis menurut urutan alphabet sesuai dengan nama akhir penulis tanpa gelar akademik, baik penulis asing maupun penulis Indonesia.

Contoh:

- a. Satu Pengarang  
Becker, Gary S. 1993, *Human Capital, A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*, Third Edition, Chicago: The University of Chicago Press.
- b. Dua Pengarang  
Van Horne, J. and J. M. Wachowicz. 1997, *Fundamentals of Financial Management*, Eleventh Edition, USA: Prentice Hall Inc.c. Referensi Jurnal/Majalah Ilmiah
- c. Referensi Jurnal/Majalah Ilmiah  
Garbarino, E. and M.S. Johnson. 1999, "The Different Roles of Satisfaction , Trust, and Commitment in Customer Relationships", *Journal of Marketing*, Vol 63, p.70-87.
- d. Referensi dari Institusi  
Ikatan Akuntansi Indonesia. 1994, "Standar Profesional Akuntan Publik", Jakarta, Devisi Penerbitan IAI.
- e. Referensi dari Makalah/Proceeding  
Mayangsari, Sekar, dan Murtanto. 2002, "Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Pembentukan Komite Audit", *Proceeding Simposium Surviving Strategies to Cope With the Future* , Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FE UAJY), Yogyakarta.
- f. Referensi dari Situs Internet  
Sulistyanto, H. Sri. 2003, "Good Corporate Governance: Bisakah Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat?,"<http://artikel.us/sulistyanto1.html>, diakses pada 29/08/2007.



10. Isi tulisan bukan tanggung jawab penyunting. Penyunting berhak mengedit redaksionalnya tanpa mengubah arti. Naskah yang tidak memenuhi syarat atau yang tidak akan diterbitkan tidak dikembalikan kecuali ada permintaan dari penulis.
11. Redaksi berhak menentukan naskah yang akan diterbitkan di jurnal.

## BIODATA PENULIS

**Yulizar Kasih** adalah dosen tetap Program Studi Manajemen STIE Multi Data Palembang. Pendidikan Sarjana Ekonomi (Manajemen) diselesaikannya pada tahun 1990 dari Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang. Pendidikan pascasarjana (M.Si) diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Andalas pada tahun 1998 dengan mengambil bidang Perencanaan Pembangunan. Kemudian pada tahun 2008 memperoleh gelar doctor (Dr.) Program dari Pascasarjana Universitas Andalas Padang dengan spesialisasi Micro Finance. Saat ini mengasuh mata kuliah Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro dan Kewirausahaan.

**Kardinal** adalah dosen tetap Program Studi Manajemen STIE Multi Data Palembang. Pendidikan sarjana diselesaikan tahun 1996 dari Universitas Tridianti Palembang. Pendidikan pasca sarjana diperoleh dari universitas yang sama pada tahun 2006. Mengikuti program pendidikan konsultan keuangan Certified Financial Planner tahun 2014 dan *Qualifield Wealt Planner* pada tahun 2015. Saat ini aktif mengajar di STIE MDP Palembang untuk mata kuliah Pemasaran dan Keuangan selain itu juga menjadi pengajar dalam pelatihan *Register Financial Planner* dan *Certified Financial Planner*.

**Cherrya Dhia Wenny** dosen tetap Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang (STIE MDP). Pendidikan sarjana akuntansi diperoleh dari Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang pada tahun 2007. Tahun 2012 mendapat kesempatan menempuh pendidikan pascasarjana (S2) dalam bidang kajian utama akuntansi pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Mata kuliah yang diasuh antara lain statistik bisnis, akuntansi perbankan, akuntansi sektor public, *E-government*, dan Akuntansi menengah.

**Faradila Meirisa** adalah dosen tetap Program Studi Akuntansi STIE Multi Data Palembang. Pendidikan sarjana diperoleh dari Universitas Sriwijaya Palembang. Sedangkan pendidikan Magister Manajemen diperoleh dari Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 2015.

**Trisnadi Wijaya** adalah dosen tetap Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang (STIE MDP) sejak tahun 2009 hingga sekarang. Pendidikan sarjana diperolehnya dalam dua bidang ilmu sekaligus, yaitu Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi (STIE MUSI) Palembang jurusan Manajemen Keuangan, sedangkan Sarjana Komputer (Sistem Informasi) diselesaikannya di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Multi Data Palembang (STMIK MDP). Saat ini mengasuh mata kuliah Manajemen Keuangan dan Analisis Pasar Uang dan Pasar Modal.

**Megawati** adalah dosen tetap Program Studi Manajemen STIE Multi Data Palembang. Pendidikan sarjana Ekonomi diselesaikan tahun 2008 dari STIE Musi. Pendidikan pascasarjana diperoleh di universitas Sriwijaya pada tahun 2015. Saat ini beliau aktif mengajar dan mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Perilaku Organisasi.

**Sri Megawati Elizabeth.P** adalah dosen tetap Program Studi Manajemen STIE Multi Data Palembang. Menyelesaikan pendidikan Administrasi Niaga dari Politeknik Negeri Sriwijaya pada tahun 2006 dan pada tahun 2009 menyelesaikan kembali pendidikan Sarjana Ekonomi konsentrasi Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang. Pendidikan Pascasarjana (M.Si) diperoleh dari Program Pascasarjana

Universitas Sriwijaya pada tahun 2014 dengan konsentrasi Manajemen Keuangan. Saat ini mengasuh mata kuliah Manajemen Keuangan, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Analisis Pasar Modal dan Pasar Uang, dan Manajemen Keuangan Internasional.

**Trisna Murni** adalah dosen tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Univ. Bengkulu. Pendidikan Sarjana Ekonomi (Manajemen) diselesaikannya pada tahun 1987 dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Pendidikan pascasarjana (M.Si) diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada pada tahun 2000 dengan mengambil bidang Manajemen Operasional. Saat ini mengasuh mata kuliah MOP, Manajemen Mutu, Manajemen Rantai Pasokan dan Metode Kuantitatif

**Siti Khairani** adalah dosen tetap Program Studi Akuntansi STIE Multi Data Palembang. Pendidikan sarjana diselesaikan tahun 1997 dari Universitas Sriwijaya. Pendidikan Pascasarjana diperoleh dari universitas yang sama pada tahun 2008. Mata kuliah yang diampu meliputi, akuntansi dan perpajakan.

**T. Husain** adalah dosen tetap Program Studi Sistem Informasi STMIK Widuri. Pendidikan Sarjana Ekonomi (Akuntansi) diselesaikannya pada tahun 2009 dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti dan Sarjana Komputer diselesaikannya pada tahun 2013 dari STMIK Widuri. Pendidikan pascasarjana ditempuh di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Nusantara pada tahun 2010 dengan mengambil spesialisasi Technopreneurship serta pascasarjana dengan mengambil spealisasi Sistem Informasi Akuntansi pada tahun 2013. Saat ini mengasuh mata kuliah Ekonomi Informasi, Perpajakan dan Sistem Informasi Manajemen.

**Syamsu Alang** adalah dosen tetap Program Studi Akuntansi STIE BPKP Jakarta. Pendidikan Sarjana Ilmu Administrasi (Bisnis) diselesaikannya pada tahun 1993 dari Fakultas

Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Pendidikan Pascasarjana (M.Si) diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Respati Indonesia pada tahun 2011 dengan mengambil bidang Ilmu Administrasi Bisnis. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua I STIE BPKP Jakarta, dan aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi, serta mengelola perusahaan milik sendiri bidang konsultan SDM dan Training Center sebagai Direktur.

**Icha Fajriana** adalah alumni Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Gelar Sarjana Ilmu Administrasi, dengan konsentrasi perpajakan diperoleh pada tahun 2011. Sejak masih dibangku kuliah, beliau aktif mengikuti berbagai seminar dan workshop, khususnya yang terkait dengan ilmu perpajakan.

**Yoeyong Rahsel** adalah dosen tetap STMIK Pringsewu. Pendidikan Sarjana bidang manajemen Perkantoran diselesaikan pada tahun 2008 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Pendidikan Pascasarjana (MM) diperoleh dari program pascasarjana Magister Manajemen Bisnis di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung bidang Konsentrasi manajemen SDM. Saat ini mengampu mata kuliah E-Business, E-Government dan kewirausahaan.

**Wulandari** adalah dosen tetap pada STMIK Pringsewu . Pendidikan Sarjana Ekonomi Manajemen diselesaikannya pada tahun 2010 dari Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Pendidikan Pasca Sarjana (M.M) diperoleh dari Universitas Bandar Lampung pada tahun 2012 dengan mengambil jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Saat ini, mengasuh mata kuliah Manajemen Umum pada STMIK Pringsewu.

**Kathryn Sugara** adalah dosen tetap Program Studi Akuntansi STIE MDP. Pendidikan Sarjana Ekonomi ( Akuntansi) diselesaikannya pada tahun 2011 dari Fakultas Ekonomi STIE MDP

Palembang. Pendidikan Pasca Sarjana (M.Si) di peroleh dari Program Pasca sarjana UNSRI pada tahun 2016 dengan mengambil bidang Akuntansi. Saat ini mengasuh mata kuliah Perpajakan dan Banl Lembaga Keuangan lainnya.

## INDEKS PENYUNTING/MITRA BESTARI

**Betri Sirajudin** adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang. Pendidikan sarjana akuntansi diperolehnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 1994. Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) diperoleh dari Universitas Sriwijaya tahun 2007. Sedangkan pendidikan pascasarjana dalam bidang ilmu ekonomi kajian utama akuntansi umum diperoleh dari PPS Universitas Sriwijaya tahun 2008.

**Kamaludin** adalah Guru Besar tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu dengan bidang keahlian manajemen keuangan dan strategik. Pendidikan magister diperolehnya dari Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang tahun 1995. Sedangkan pendidikan doctoral diperolehnya dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2005 dalam bidang ilmu manajemen keuangan. Saat ini aktif menulis artikel ilmiah di beberapa jurnal baik dalam dan luar negeri, beberapa buku yang sudah diterbitkan antara lain : Manajemen Keuangan, Teori dan Aplikasi, 2011; Manajemen Keuangan Perusahaan, 2009; Manajemen Keuangan Keputusan Jangka Pendek, 2002.

**Luk Luk Fuadah** adalah dosen tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (UNSRI). Pendidikan Sarjana Akuntansi diselesaikannya pada tahun 1997 dari Fakultas Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Sedangkan pendidikan pascasarjana diperoleh dari Flinders University Australia pada tahun 2004 dengan mengambil bidang Internasional Business. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan strata 3 (program doktor) pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau juga pernah mengelola jurnal ilmiah "Jurnal Akuntabilitas" F.E.

UNSRI. Selain mengajar, beliau juga aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah.

**Sri Rahayu** adalah dosen tetap Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP). Pendidikan Sarjana Ekonomi diselesaikannya pada tahun 1991 dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pendidikan pascasarjana diperoleh dari Program Magister Manajemen UNSRI pada tahun 1998 dengan mengambil bidang Manajemen Keuangan. Sedangkan pendidikan strata 3 (program doktor) diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Pancasila Jakarta pada tahun 2010.

**Yulizar Kasih** adalah dosen tetap Program Studi Manajemen STIE Multi Data Palembang. Pendidikan Sarjana Ekonomi (Manajemen) diselesaikannya pada tahun 1990 dari Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang. Pendidikan pascasarjana (M.Si) diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Andalas pada tahun 1998 dengan mengambil bidang Perencanaan Pembangunan. Kemudian pada tahun 2008 memperoleh gelar doctor (Dr.) dari Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang dengan spesialisasi Micro Finance. Saat ini mengasuh mata kuliah Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro dan Kewirausahaan.

**Zakaria Wahab** adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang. Pendidikan sarjana diperoleh dari Universitas Sriwijaya Tahun 1983 dan pascasarjana diperoleh dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2008. Saat ini aktif mengajar pada Program Studi Manajemen dengan mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran, Manajemen Strategik, dan Kewirausahaan.

**Pengaruh *Total Quality Management (TQM)* Dan Penghargaan Terhadap Kinerja Karyawan  
PT. Pos Indonesia Persero Baturaja**

**Noviansyah, S.E., M.Si.**

**Universitas Baturaja**  
Noviansyah65@yahoo.co.id

**Abstract:** *This study aims to determine the effect of Total Quality Management and Award on Employee Performance of PT. Pos Indonesia Persero Baturaja. The data used is primary data through a questionnaire. A sample of 39 respondents was determined by population research techniques. The analysis used is multiple linear regression analysis, t test, F test, and analysis of the coefficient of determination. The results of data analysis show that Total Quality Management and rewards affect the performance of employees of PT. Pos Indonesia Persero Baturaja both partially and simultaneously. The result of the determination coefficient shows the contribution of the Total Quality Management influence and mutual appreciation of employee performance by 65.3% while the remaining 34.7% is influenced by other variables. For companies so that PT. Pos Indonesia Baturaja Persero continues to improve the ability of human resources (HR) in an effort to provide satisfaction for services to the public.*

**Keywords:** *total quality management, appreciation, employee performance*

**Peranan Pembinaan Terhadap Kinerja Usaha Kerajinan Kain Tajung Di Kelurahan Tuan Kentang  
Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang**

**Kardinal, Yulizar Kasih**

**STIE Multi Data Palembang**  
kardinal@stie-mdp.ac.id, yulizar@stie-mdp.ac.id

**Abstract:** *The purpose of this development activity is to enhance the performance of the business partner such as production capacity, production quantity, sales turnover, and understanding in marketing and business promotion, social media usage, business bookkeeping, and alternative source of the capital. Benefit gained is the increase in the capacity and quantity of production, sales turnover, and understanding of marketing, promotion, bookkeeping, and capital aspects. The method used is empowerment by involving direct community participation (participatory learning and action). The partners are Mr. Misro and Mr. Syarifudin, the owner of Kain Tajung craft industry. The partners are selected purposively based on economic needs and productivity criteria. Coaching was done through 4 steps: preparation, implementation, monitoring and evaluation, and reflection of activity result. The problems faced from both partners are the capacity and quantity of production is not optimal, the lack of marketing and promotion activities, the absence of bookkeeping and business financial statements, and lack of knowledge about alternative sources of business capital. To solve the problem, the production capacity was increased through the procurement of ATBM (manual loom), enhancement of marketing and promotion activities through training and procurement of promotion media, bookkeeping and financial reporting, and training of business capital sources. This activities have a positive impact on the business performance of both partners, the increase in capacity and production quantity an average of 30-35% and sales turnover average 25-30% every week.*

**Keywords:** *coaching, craft, business performance*

**Reciprocal Effect: Opini Audit Going Concern Dan Auditor Changes**

**Cherrya Dhia Wenny**

**STIE MDP**  
cherryadhia@yahoo.com

**Abstract:** *The purpose of this research is to determine the effect of going concern opinion on auditor changes and to determine the effect of auditor changes on going concern opinion . The data used in this study are audited financial statements of manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 2013-2016, obtained through the BEI website (www.idx.co.id). This research is a quantitative study using logistic regression models. The results show that going concern opinion has a significant effect on auditor changes, but the auditor changes are not proven to affect the going concern opinion in the following year.*

**Keywords:** *going concern opinion, auditor changes*

**Kontribusi Kecerdasan Emosional Mahasiswa Terhadap Minat Belajar Pengantar Akuntansi**

**Kathryn Sugara**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang**  
kathryn@mdp.ac.id

**Abstract:** *This study aims to examine the influence of emotional intelligence of students towards learning outcomes introductory accounting courses. The research method used in this study is a quantitative method, Sampel was determined by purposive sampling method. The method of analysis is multiple regression analysis. The test result states that the components of the emotional intelligence variable (self-introduction, empathy, and social skills) influence on the introductory accounting course, while the emotional intelligence variable component (self-control variable, and motivation) has no effect on the value of introductory accounting courses. So it can be concluded that the cooperation will greatly affect the value of introductory accounting courses.*

**Keyword :** *emotional intelligence, learning outcomes introduction to accounting course.*

**Pengaruh Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Return On Equity (ROE) Terhadap Price Earning Ratio (PER) Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017**

**Faradila Meirisa dan Trisnadi Wijaya**

**STIE MDP**  
faradilameirisa@stie-mdp.ac.id  
trisnadi@stie-mdp.ac.id

**Abstract:** *Capital markets implement two functions that play an important role for the economy of a country, namely as a means for funding efforts and as a means for companies to obtain funds from investors in the form of investment. Investors using fundamental analysis to consider the intrinsic value of a stock by using company's financial data. In fundamental analysis, there are two approaches that can be used to calculate intrinsic value of the stock, i.e., present value approach and Price Earning Ratio (PER) approach. Companies that have high growth usually have a high value PER, and vice versa with a low growth company has a low PER. This research aims to analyze the effect of Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Equity to Price Earning Ratio either partially*

*or simultaneous. The sample used in this study as many as 15 consumer goods company that was taken using a purposive sampling method. This research using multiple linear regression analysis. Results of the study stated the Current Ratio (CR) has no effect against a partially significant Price Earning Ratio (PER). Debt to Equity Ratio (DER) and Return on Equity (ROE) effect significantly partially against the Price Earning Ratio (PER). Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), and Return on Equity (ROE) of significant effect simultaneously against the Price Earning Ratio (PER).*

**Keywords:** *Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Equity, Price Earning Ratio.*

### **Peningkatan Produktivitas Usaha Jamur Tiram dengan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Di Kota Palembang**

**Megawati, Sri Megawati Elizabeth.P, Kathryn Sugara**

**STIE MULTI DATA PALEMBANG**

*megawati@stie-mdp.ac.id, srimegawati@stie-mdp.ac.id,  
kathryn@mdp.ac.id*

**Abstract:** *The demand for oyster mushrooms in the city of Palembang is quite high, but this is not supported by the stock of oyster mushrooms themselves. The number of oyster mushroom farmers in the city of Palembang has not been able to meet market needs, because some problems faced by oyster mushroom farmers. One of the problems is the unavailability of advanced equipment in processing oyster mushroom seeds because they do not have the capital to buy these advanced equipment. With the manual equipment, the production of their oyster mushrooms is only a small amount and the monthly profit potential is only IDR 2,250,000. The existence of a service program provided by the government to the dedication team can help overcome the problems faced by oyster mushroom farmers in increasing production of oyster mushrooms, with the provision of equipment in the form of press machines, stirring machines for baglog, steam pumps and press tools for packaging can increase the profit of mushroom farmers (partners) to 7,550,000 / month. In addition, the provision of blogging training to market oyster mushroom products with online media was also provided by the service team.*

**Keywords:** *baglog, oyster mushrooms, technology*



**INDEKS JURNAL FORUM BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN**

Vol.	Judul	Halaman	Penulis
Vol. 8 No. 1	Pengaruh <i>Total Quality Management (TQM)</i> Dan Penghargaan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pos Indonesia Persero Baturaja	1	Noviansyah
	Peranan Pembinaan Terhadap Kinerja Usaha Kerajinan Kain Tajung Di Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang	18	Kardinal, Yulizar Kasih
	<i>Reciprocal Effect: Opini Audit Going Concern Dan Auditor Changes</i>	26	Cherrya Dhia Wenny
	Kontribusi Kecerdasan Emosional Mahasiswa Terhadap Minat Belajar Pengantar Akuntansi	34	Kathryn Sugara
	Pengaruh <i>Current Ratio (CR)</i> , <i>Debt To Equity Ratio (DER)</i> , <i>Return On Equity (ROE)</i> Terhadap <i>Price Earning Ratio (PER)</i> Pada Perusahaan <i>Consumer Goods</i> Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017	43	Faradila Meirisa, Trisnadi Wijaya
Peningkatan Produktivitas Usaha Jamur Tiram Dengan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Di Kota Palembang	57	Megawati, Sri Megawati Elizabeth.P, Kathryn Sugara	